

DASAR-DASAR INTELIJEN

Oleh : Letjend (Purn) Z.A. Maulani (Mantan Kepala BAKIN)

Pengertian Dasar

Intelligence is knowledge, demikian secara generik menurut kamus. Jargon militer mengartikan - *intelligence is foreknowledge*. - kemampuan "*weruh sadurunge winarah*". Meski intelijen diharapkan *weruh sadurunge winarah*, tatkala garis pertahanan Bar Lev Israel di Gurun Sinai hancur berkeping-keping pada ofensif Oktober 1973 oleh serbuan yang mendadak dari Jendral Sazely dalam Perang Ramadhan, orang hampir-hampir tidak bisa percaya bahwa badan intelijen *Mossad* yang legendaris itu ternyata tidak memiliki *kawruh* akan adanya ofensif di hari raya *Youm Kippur* sesuai dengan reputasinya yang digembar-gemborkan selama ini.

Cerita tentang intelijen yang tertangkap basah, yang diperdaya oleh lawannya, yang bobol, bukan hanya dialami oleh *Mossad* dan *Aman* (badan intelijen pertahanan Israel) yang konon *sakti mandraguna*, tetapi dialami juga oleh badan-badan intelijen kondang dunia betapa pun handal dan canggihnya.

Sejarah keberhasilan yang legendaris dari raid "*Tora, Tora, Tora*" oleh sayap udara dari armada Kekaisaran Jepang yang melibas habis kapal-kapal armada pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbour pada bulan Desember 1941 dan menjadi pemantik Perang Pasifik, merupakan suatu operasi intelijen yang mempermalukan Amerika yang sungguh sangat monumental. Kejadian sedemikian tetap berulang berkali-kali, bahkan di

penghujung abad ke-20 ini ketika badan-badan intelijen sudah makin *sophisticated*.

Ketika menjelang Natal pada 24 Desember 1979 sembilan divisi Uni Soviet, yang terdiri dari divisi berlapis baja ke-5, ke-54, ke-103, ke-104, lalu divisi mobil udara ke-105, serta divisi infanteri bermotor ke-66, ke-201, ke-357 dan ke-360, terdiri tidak kurang dari 45.000 orang prajurit melancarkan serbuan besar-besaran menyeberangi perbatasan Tajikistan menyerbu dan menduduki Afganistan, tiga badan intelejen Amerika Serikat paling canggih --CIA, DIA (*Defense Intelligence Agency*) dan NIA (*National Intelligence Agency*)-- yang diawaki dengan personil yang paling terlatih dan paling berpengalaman, diperlengkapi dengan sarana penyadap elektronika dan pemantau satelit yang mampu mengawasi tiap jengkal permukaan bumi pada tiap saat, tiba-tiba saja oleh keberhasilan pendudukan itu tampak menjadi badan-badan intelijen paling konyol di dunia. Harap diingat, sembilan divisi bukanlah jumlah kekuatan yang kecil yang begitu saja dapat lolos dari pengamatan.¹⁾

Contoh lain lagi. Ofensif Argentina pada tanggal 2 April 1982 terhadap kepulauan Falkland, atau Malvinas kata orang Argentina, adalah juga ceritera nyata betapa sebuah lembaga intelijen paling bergengsi seperti MI-6 Inggris tertangkap basah tidak mampu mengantisipasi serangan dadakan tersebut sebelumnya. Jadi, badan-badan intelijen, yang paling canggih, paling berpengalaman, dan paling bergengsi seperti Mossad, CIA, MI-6, bahkan KGB sekalipun, ternyata bukanlah lembaga-lembaga dewa yang serba tahu dan serba bisa. Bahwa intelijen sebagai lembaga harus mampu menjalankan empat fungsi utamanya, yaitu --*to anticipate, to*

detect, to identify, and to forewarn— secara mumpuni, memang itulah yang diharapkan.

Maka dari itu, ketika Pemerintah Orde Baru pada waktu yang lalu menginstruksikan untuk membangun “posko-posko kewaspadaan” guna mengantisipasi terhadap berbagai kemungkinan adanya dadakan kerusuhan sosial, perintah semacam itu tak pelak lagi merupakan suatu sindiran *gaya Jawa* terhadap komunitas intelijen, terutama dalam menjalankan keempat fungsi utama yang disebutkan di atas tadi. Kalau tidak, untuk apalah pula “posko-posko kewaspadaan” itu, meski kelemahan itu tidak terletak sebagai tanggung jawab badan-badan intelijen *an sich*. Dalam hal ini aparat pemerintah lainnya perlu diperiksa juga akan peran dan tanggung jawabnya, terutama berkenaan dengan efektivitas dari intelijen fungsional. Sehubungan dengan intelijen tersebut, tokoh guru peperangan gerilya Che Guevara memperingatkan dari dalam belantara Colombia, bahwa “*informasi akan mengalir ke arah ke mana simpati rakyat diberikan.*” Barangkali kaidah besi ini harus menjadi peringatan bagi badan-badan intelijen kita juga.

Dari contoh-contoh di atas tadi, kenyataan empirik memperlihatkan kelemahan-kelemahan alamiah memang akan terus melekat pada badan-badan intelijen kapanpun dan dimanapun, karena kelemahan yang bersifat manusiawi. Kelemahan itu dapat bersifat struktural (artinya, bisa diperbaiki), bisa kultural (sulit diperbaiki). Meski dengan segala kemungkinan akan kelemahan yang ada, yang dapat membatasi kemampuannya, fungsi intelijen sejak zaman dahulu kala telah telah diakui menduduki peran yang menentukan. Sun Tzu (250 s.Masehi) telah

menetapkan adagiumnya yang terkenal "*Ketahui musuhmu, dengan mengetahuinya sudah separuh dari kemenangan*".2)

Intelijen - Profesi untuk Hanya Seorang Klien

Intelijen memiliki watak sebagai *a professional with one client* --profesi yang mengabdikan hanya kepada seorang klien. Istilah tersebut mencerminkan bukan sekedar keunikan intelijen, tetapi juga keterkaitan berbagai perannya dengan *fungsi-fungsi* dari *sekuriti nasional*. Paling tidak ada enam fungsi-fungsi yang mengalir dari aspek sekuriti nasional. Fungsi-fungsi dari sekuriti nasional itu adalah :

1. Membina kepastian hukum (*legal surety*);
2. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat (*civil order*);
3. Menegakkan hukum secara paksa (*law enforcement*);
4. Membangun kemampuan pertahanan (*defence capability*);
5. Melindungi masyarakat dari berbagai bencana, baik karena alam, kelainan, maupun kesengajaan (*public safety from disasters*); dan yang terakhir,
6. Memelihara keamanan negara (*state security*);

yang masing-masing memiliki ciri-ciri masalah dan ancamannya sendiri-sendiri.3)

Karakterisasi ancaman menuntut adanya *spesialisasi* penanganan masing-masing. Spesialisasi intelijen terhadap fungsi-fungsi dari sekuriti nasional tersebut dimanifestasikan ke dalam *crime and law enforcement*

intelligence, yang dilaksanakan oleh badan intelijen kepolisian (seperti FBI, Spesial Branch, Intelpol, dsb). Fungsi berikutnya, yakni *defence intelligence*, dilaksanakan oleh badan badan intelijen pertahanan, mulai yang terbatas pada lingkup intelijen daerah pertempuran (*combat intelligence*) sampai kepada intelijen yang berlingkup strategis. Kemudian oleh berbagai intelijen yang ditujukan untuk melindungi masyarakat (*intelligence for public protection*) dari berbagai wujud bahaya yang tanggung-jawabnya dilaksanakan oleh departemen terkait (mulai dari lembaga pengawasan kegiatan vulkanologi, pengendalian banjir, penanggulangan kenakalan remaja, narkoba dan uang palsu, sampai kepada pengawasan lalu-lintas orang asing, dsb) serta untuk perlindungan kepentingan nasional yang lebih luas, yang mencakup bidang politik, ekonomi, keuangan, sosial-budaya, serta keamanan sosial, yang dilaksanakan oleh badan-badan intelijen nasional (NIA, MI-6/5, BIN, dsb)

Pertanyaan :

1. *Berapa luas dan lingkup wewenang dan tanggung jawab dari BIN?*
2. *Apa saja fungsi dari BIN?*

Meski ada spesialisasi pada berbagai badan intelijen untuk beragam kepentingan tersebut, sebagai realisasi fungsi-fungsi sekuriti nasional pada berbagai tingkat dan wujudnya, kepentingan-kepentingan ini tetap memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.

Oleh karena itu, peran dan fungsi *koordinasi* antar badan-badan intelijen yang ada itu tidak saja tidak boleh dinafikan, bahkan secara fungsional merupakan kebutuhan yang wajib dilakukan. Hambatan dan kelemahan utama dari badan-badan intelijen justru terletak pada fungsi *koordinasi* ada *take and give* dan prinsip intelijen tentang pemberian informasi hanya kepada mereka yang memang mutlak harus tahu (*need to know basis*), turut mengendala proses *koordinasi*. Masalah lain adalah menetapkan "siapa yang memang perlu tahu". Kendala lain terhadap *koordinasi*, yang turut menentukan, lebih bersifat kultural, yaitu faktor subyektif dari badan-badan intelijen -persisnya tokoh-tokoh-- yang terlibat. Faktor gengsi misalnya.

Koordinasi adalah kegiatan tukar-menukar keterangan mengenai masalah-masalah yang "tidak jelas" atau "tidak diketahui" atau "perlu diketahui bersama". Sementara kaum intelijen adalah sosok yang acapkali harus menampilkan kesan yang serba tahu. Oleh karena itu untuk menghindari *embarrassment* akan hal semacam itu, banyak bos-bos intelijen yang sebenarnya memerlukan *exchange of notes*, konsultasi, atau koordinasi dalam rangka memerlukan informasi yang ada di tangan mereka, acap kali merasa enggan dan walaupun terpaksa, cukup mengirim wakil dari eselon rendahan saja, yang biasanya tidak memiliki mandat untuk memutuskan sesuatu.

BIN yang di dalam fungsinya menyandang fungsi *mengkoordinasikan* kegiatan intelijen pada lingkup nasional dikabarkan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi *koordinasinya* di antara badan-badan intelijen yang ada.

Pertanyaan : *Apa kendala yang menyebabkan kesulitan dalam menjalankan fungsi koordinasi oleh BIN terhadap badan-badan intelijen lain?*

Lalu, *rivalitas* (persaingan) yang inheren atau melekat di dalam tubuh berbagai badan-badan intelijen menjadi faktor lain lagi yang mengendala usaha koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengefisienkan kegiatan badan intelijen yang ada. Berbeda dengan *kompetisi* (yang juga berarti *persaingan* dalam bahasa Indonesia), di mana di dalamnya perjuangan merebut prestasi dilaksanakan tanpa merugikan pihak-pihak yang bersaing, *rivalitas* adalah persaingan yang kadangkala tanpa perlu memperebutkan prestasi, justru bertujuan untuk menimbulkan kerugian pada pihak pesaing lainnya. *Rivalitas* adalah permainan *zero-sum-game*. Keadaan yang merugikan ini bias bertambah parah bila penguasa politik menggunakan *rivalitas* itu untuk *power balancing* penguasa. Ciri dari sistem demikian, berbagai kelompok kepentingan bertarung untuk memperebutkan kedekatan atau untuk memperoleh favorit dari penguasa.

Untuk beberapa waktu lamanya badan-badan intelijen di Indonesia, tanpa perkecualian, tidak lain hanyalah instrumen untuk mencapai kepentingan politik. Badan intelijen yang bekerja secara profesional untuk *single client organization* yang pernah ada adalah BRANI (Badan Rahasia Nasional Indonesia), dari tahun 1945 sampai 1950.

Lembaga intelijen Indonesia yang pertama, Badan Istimewa BKR, disusun setelah selesainya penyelenggaraan Pendidikan Penyelidik Militer Khusus dibawah Letnan Kolonel Zoelkifli Loebis, yang menjadi kepala Tjabang

Chusus (staf intelijen) BKR (Badan Keselamatan Rakyat). Badan Istimewa BKR diresmikan pada tanggal 6 Oktober, 1945 di Cileungsi, Bogor, sehari setelah pemerintah meresmikan BKR sebagai badan keamanan dari Republik yang baru lahir. Ketika ditanyakan tentang hal itu Zoelkifli Loebis menyatakan tidak ingat lagi kapan Badan Istimewa BKR itu diresmikan. "Saya tidak ingat tanggal pembentukannya. Yang jelas sesudah 17 Agustus 1945 dan sebelum 5 Oktober 1945," ucap bapak intelijen Indonesia ini. 4)

Letnal Kolonel Zoelkifli Loebis merekrut 40 orang opsir PETA mantan lulusan *Seinen Dajo* (Pusat Pelatihan Pemuda), yang kemudian diikuti dalam pelatihan intelijen oleh *Zanchi Yugeki-tai* (Satuan Intelijen Bala Tentara Ke-16) sebagai kader intelijen. Latihan para kader intelijen itu hanya berlangsung tidak lebih dari seminggu lamanya, ditekankan terutama pada intelijen lapangan dan teritorial, seperti pengumpulan informasi militer, sabotase dan perang urat saraf. Tenaga pelatihnya terdiri dari para perwira dari badan intelijen Jepang *Sambobu Tokubetsu-han* (Beppan), seperti Letnan Yanagawa, Letnan Tsuchiya, Letnan Yonemura dan seorang muslim Jepang Abdul Hamid Nobuharu Ono, yang dikenal dekat dengan perwira-perwira BKR, Selain Zoelkifli Loebis sendiri yang pernah bertugas sebagai perwira intelijen di Singapura.⁵⁾ Ketika pusat pemerintahan publik dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, Badan Istimewa BKR diubah namanya menjadi BRANI (Badan Rahasia Nasional Indonesia) yang secara administratif menginduk ke Kementerian Pertahanan dan secara operasional memiliki akses langsung kepada Panglima Besar Soedirman dan Presiden Soekarno.

Pemimpinnya tetap Zoelkifli Loebis. BRANI melanjutkan melakukan pelatihan terhadap beratus pemuda dalam rangka membentuk FP (*Field Preparation*).

Tugas FPI itu macam-macam, seperti sabotase, propaganda dan perang urat saraf, penggalangan perlawanan terhadap Belanda, menyusup ke daerah lawan, hingga penyelundupan senjata. "*Pokoknya, kami ini intelijen tempur sekaligus teritorial*" ujar Letnan Jendral Soetopo Joewono, mantan kepala BAKIN yang menjadi anggota BRANI.⁶) Untuk mendukung kepentingan politik, misi BRANI kemudian tidak terbatas pada intelijen militer saja, tetapi diperluas kepada intelijen politik dan strategis.

Pada masa Amir Sjarifoeddin menjadi perdana menteri pada April 1947 lembaga intelijen ini dirombak menjadi KP V (Kementerian Pertahanan V). Satuan-satuan intelijen yang berada di luar struktur militer, yakni yang berada di bawah kepolisian dan kejaksaan pada masa sebelum perang, dimasukkan kedalam jajaran kementerian pertahanan pada staf yang berbeda. Seksi-A (bekas BRANI) diserahkan di bawah kepemimpinan Kolonel Abdoerahman, orang kepercayaan Amir Sjarifoeddin, sedangkan Zoelkifli Loebis menjadi wakilnya. Amir Sjarifoeddin dan Abdoerahman kemudian hari terlibat dalam Peristiwa Pengkhianatan PKI di Madiun pada 1948.

Setelah perang kemerdekaan usai, ketika Pemerintah Republik kembali ke Yogya, KP V dibubarkan dan sebagai gantinya *dibentuk intelijen Kementerian Pertahanan (IKP)*. Di bawah menteri pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dalam posisi sebagai kepala IKP, Zoelkifli Loebis

membentuk BISAP (*Biro Informasi Angkatan Perang*), yang bertugas menyiapkan informasi strategis kepada menteri pertahanan dan pimpinan militer.

Setelah terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 IKP "digembosi". Peran intelijen pada lingkup nasional dilakukan oleh SUAD-I. Pada tahun 1959 Presiden Soekarno membentuk sebuah badan intelijen baru di tingkat nasional, *Badan Pusat Intelijen* (BPI), yang dipimpin langsung oleh menteri luar negeri Soebandrio. Dibawah kepemimpinan Soebandrio, BPI dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh kaum komunis dan simpatisannya. BPI menyusup ke dalam Departemen Hankam, Komando-Komando Militer, dan badan-badan pemerintahan lainnya untuk tugas mengamati lawan-lawan politik Presiden Soekarno. Untuk pertama kali sebuah badan intelijen seperti BPI secara sengaja diarahkan dan digunakan sebagai sebuah instrumen politik dengan tugas khusus untuk mengawasi dan menghabisi lawan-lawan pemerintah seperti yang lazim berlaku di negara-negara yang bercorak otoriter.

Dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soekarno, dan bangkitnya Rezim Orde Baru pada tahun 1965, BPI dibubarkan. sebuah badan intelijen baru dibentuk, yaitu *Komando Intelijen Nasional* (KIN) pada tahun 1966, tetapi sebelum berusia setahun KIN dibubarkan dan digantikan oleh BAKIN (*Badan Koordinasi Intelejen Negara*) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Yoga Sugama. Presiden Soeharto tidak sepenuhnya percaya dan menyandarkan dirinya pada BAKIN. Ia membentuk sebuah jaringan Intelijen lain sebagai saingan BAKIN di bawah kendali mayor Jendral Ali Murtopo dengan *Operasi Khusus* (Opsus)-nya, di luar pengetahuan Bakin

maupun staf intelijen Departemen Pertahanan Keamanan/Markas Besar ABRI, serta *komando pemulihan keamanan dan ketertiban* (Kopkamtib) yang ada pada waktu itu. Dalam melaksanakan tugas intelijennya Ali Murtopo bertanggung jawab langsung kepada Presiden Soeharto. Selain itu di luar Opsus, Presiden Soeharto masih membentuk dan mengendalikan jaringan intelijennya sendiri.

Ali Moertopo merupakan tokoh kepercayaan Presiden Soeharto sejak tahun 1948. Ia adalah tokoh yang dikirimkan oleh Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, pada tahun 1965, tanpa sepengetahuan Presiden Soekarno, untuk menemui Des Alwi di Bangkok dalam rangka menjajagi kemungkinan mengakhiri 'Konfrontasi' dengan Malaysia. Sejak saat itu Ali Moertopo dengan Opsus-nya ditugasi untuk menangani bidang-bidang khusus politik, diplomasi, dan bisnis, di bawah kendali langsung Presiden Soeharto.

Permainan yang dijalankan Ali Moertopo tidak senantiasa sejalan dengan kepentingan tentara, yang dipresentasikan oleh Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro, yang didukung oleh BAKIN. Persaingan antara Opsus dengan Kopkamtib berakhir dengan *show down* pada 15 Januari 1978, yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) yang berakhir dengan lengsernya kedua tokoh, baik Ali Moertopo maupun Jenderal Soemitro, dari arena politik.

Sesudah Peristiwa Malari Presiden Soeharto memanggil Brigadir Jenderal Benny Moerdani dari posnya di Seoul untuk menggantikan Ali Moertopo. Ia diangkat sebagai asisten intelijen Dephankam /ABRI, dan

mengambil alih kepemimpinan CSIS dari tangan Ali Moertopo. Pada waktu itu *Pusintelstrat* (Pusat Intelijen Strategis) yang berada di bawah kendali asisten intelijen Dephankam/ABRI, dan mengambil alih kepemimpinan CSIS dari tangan Ali Moertopo. Pada waktu itu *Pusintelstrat* (Pusat Intelijen Strategis) yang berada dibawah kendali asisten intelijen Dephankam/ABRI, berfungsi hanya sebagai "lembaga pusat" dengan tugas pokok terbatas pada merumuskan doktrin dan menyelenggarakan latihan semata. Jenderal Benny Moerdani tidak puas dengan hal itu, dan mereorganisasikan "tenaga pusat" itu menjadi sebuah 'badan' -*agency*- yakni BAIS (Badan Intelijen Strategis) ABRI dengan tugas-tugas yang sangat luas. Di bawah kepemimpinan Jendral Benny Moerdani BAIS tidak saja merambah sampai kepada perumusan politik luar negeri (yang membuatnya tidak disenangi oleh kalangan Pejambon), tetapi terutama ia berhasil menaklukkan Presiden Soeharto untuk memberikannya kewenangan melaksanakan sesuatu "operasi tertutup" melakukan invasi ke Timor Portugis pada tahun 1975. Kegiatan operasi itu sedemikian tertutupnya sampai-sampai Menhankam/Pangab Jenderal Surono tidak mengetahuinya sampai detik-detik terakhir Hari-H serbuan, yang dengan sekaligus menandai berakhirnya peran *Opsus* yang masih melakukan kegiatan intelijen di timor portugis dengan nama sandi "Operasi Komodo".

Untuk "mensinergikan operasi-operasi intelijen" sesudah peristiwa Malari, Presiden Soeharto kemudian menempatkan Jenderal Benny Moerdani sebagai Waka BAKIN, di bawah Jenderal Yoga Sugama. Berdalihkan bahwa BAKIN hanyalah sebuah "badan koordinasi", maka

struktur organisasinya "dilangsingkan" dengan menjadikannya sebuah organisasi yang tidak menjadi badan intelijen yang berfungsi melakukan operasional intelijen secara penuh. Tugas pokoknya lebih ditekankan pada koordinasi. Barangkali karena alasan tersebut, ketika saya mengambil alih pimpinan BAKIN pada bulan April 1999, sarana operasional seperti untuk intelijen komunikasi-elektronika, dan organ untuk operasi lapangan tidak ada. Fungsi komunikasi-elektronika diturunkan menjadi hanya sebuah seksi yang berada pada detasemen markas, yang bertugas untuk pelayanan internal. Karena tiadanya organ operasional lapangan, "laporan intelijen" yang saya terima dari staf, yang diharapkan berisi "analisis" dari intelijen matang, tidak lebih berupa guntingan dari berbagai koran nasional. Sementara itu badan intelijen militer, BAIS, mengendalikan operasi dan kegiatannya mulai dari intelijen lapangan, teritorial dan intelijen strategis, dengan fokus terutama pada intelijen politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, kadang kala kegiatan intelijen merambah kepada bidang-bidang dan tindakan-tindakan yang dikemudian hari membuat nama "intel" tidak terlalu harum di masyarakat.

Intelijen- Kegiatan Mencari Jawaban Terbaik

Tadi di awal pembicaraan telah dikemukakan bahwa kegiatan intelijen terkait erat dengan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta pengendalian hasilnya. Keputusan yang baik ditentukan oleh tersedianya informasi yang benar, faktual, cermat, obyektif, lengkap, terkini, dapat tepat waktu. Dengan kata lain, intelijen adalah kegiatan *mencari jawaban terbaik* guna mendapatkan *solusi terbaik*. Untuk memperoleh *jawaban terbaik* itu, maka pengorganisasian intelijen menuntut segala yang

terbaik dalam segala aspeknya. Sulit untuk mendapatkan *jawaban terbaik* bila organisasi intelijen tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi dasarnya sekalipun, seperti contoh yang dialami oleh BAKIN tadi.

Organisasi intelijen tidak lain hanyalah sekedar *sarana* untuk menjalankan misinya. Misi organisasi intelijen, seperti organisasi-organisasi lainnya ditentukan lingkungan strategisnya, tugas utama dan khusus yang dipikulkan keatas pundaknya, serta tantangan yang sedang dan bakal dihadapinya. Mengingat wataknya sebagai *organisasi yang mengabdikan hanya untuk seorang klien*, badan intelijen harus tajam pada spesialisasinya. Organisasi yang terlampau luas dan lebar tanggung jawabnya dapat terjebak kedalam perangkap *tahu sedikit tentang banyak hal*.

Di bidang *intelijen pertahanan* konon banyak hal Indonesia masih perlu berbenah diri. Salah satu fungsi dari intelijen pertahanan, misalnya saja di bidang *surveillance udara* dan *maritim*, yang belum mampu kita tangani dengan memuaskan. Beberapa kawasan Tanah Air, seperti Laut Natuna, Selat Malaka, Laut Sulawesi, serta laut-laut di kawasan timur Indonesia, tetap masih merupakan *black areas* untuk intelijen kita. Bukan saja karena kawasan-kawasan tadi belum terliput secara penuh dan efektif oleh sistem jaringan kadar kita, juga kalaupun sarana deteksi tersebut tersedia, beberapa faktor baik jenis, kemampuan, dan usia sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan sekarang. Beberapa radar buatan Rusia yang sudah jompo tidak memiliki suku cadang lagi. Beberapa lagi, seperti radar *Plessey* dan *Thomson* tidak kompatibel satu sama lain, sehingga saling tidak mampu memberikan *peringatan dini* yang merupakan inti fungsinya

suatu jaringan radar. Padahal kemampuan *peringatan dini* dan *deteksi dini* dari sistem jaringan radar, baik di atas daratan maupun dibawah permukaan air, akan sangat menentukan kemampuan unsur-unsur *surveillance* udara dan maritim yang juga masih sangat terbatas dalam jumlah, kekuatan, dan kemampuannya- dalam rangka membangun pagar pertahanan tanah air yang dapat diandalkan. Jangan lupa, wilayah nusantara yang harus kita lindungi sekarang ini telah meningkat tiga kali lipat, dari yang semula hanya dua juta kilometer persegi kini menjadi enam juta kilometer persegi, sebagai akibat bertambah luasnya wilayah tanggung-jawab keamanan dengan kawasan zona ekonomi eksklusif.

Intelijen bukan hanya berurusan bagaimana mengamati partai-partai politik, tetapi juga bagaimana harus mampu menegakkan hak-hak kedaulatan nasional di lautan dari pelanggaran lalu-lintas ilegal, penyelundupan dan kejahatan di laut, termasuk antara lain pencurian kekayaan laut yang kini telah mencapai triliunan rupiah, maupun ancaman penggerogotan terhadap garis-garis batas nasional. Lautan telah menjadi *frontier* baru yang menuntut perhatian, karena berkaitan dengan bukan hanya hari ini, tetapi masa depan anak-cucu kita.

Sementara itu negeri ini terbuka telanjang oleh pengamatan pihak-pihak lain melalui *geo-stationary orbiting surveillance satellite* yang diperlengkapi baik dengan *alat pendengar elektronika* serta *thermal* dan *satelit fotografik*, yang mampu mengamati, menyadap berita, dan memotret sampai detil mulai dari nomor kendaraan pasukan darat, di nomor lambung kapal-kapal yang ada di permukaan laut, jumlah dan jenis pesawat yang masih *air serviceable*, sampai pada semua pergerakan

latihan maupun operasi pasukan-pasukan darat, laut dan udara, mulai dari Aceh, sampai dengan Papua. Kesibukan badan-badan intelijen dengan *politicking* selama ini telah menjadikannya alpa membangun intelijen pertahanan yang akhirnya akan menentukan kemampuan kita mempertahankan dan *melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia* dengan sebaik-baiknya.

Keterbatasan kemampuan udara strategis serta telekomunikasi elektronika sangat menghambat kemampuan intelijen strategis di lapangan. Pekerjaan tersebut selama ini terbatas dilakukan secara terbuka oleh para petugas di perwakilan-perwakilan di luar negeri. Tetapi bila saatnya mengharuskan untuk melakukan pengumpulan keterangan secara senyap di daerah yang bermusuhan, maka kemampuan itu patut dipertanyakan. Barangkali unsur intelijen strategis masih mampu melaksanakan misi infiltrasi, tetapi pekerjaan eksfiltrasi terhadap pasukan tersebut setelah misi berakhir masih merupakan tanda tanya besar. Apresiasi intelijen yang menyatakan *dalam tempo sepuluh tahun ke depan tidak akan ada perang* sungguh telah menina-bobokkan kita. Bahwasanya contoh-contoh tentang pecahnya perang dadakan seperti di Falkland, Afganistan, Teluk, dan sebagainya, seharusnya tidak mengizinkan suatu angkatan perang alpa dalam mempersiapkan dirinya. Bukankah, *si vis pacem para bellum*. Titik-titik ledak yang eksplosif berada di tepian Pasifik, seperti semenanjung Korea, kepulauan Daoyu-tai, selat Taiwan, sengketa di pulau-pulau atol Spratley, dan sebagainya, bisa saja terjadi peluberan, karena hampir semuanya berbatasan

langsung dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang menempati posisi silang.

Pertanyaan :

1. *Apakah BIN ada menjalin kerja-sama dengan badan-badan intelijen asing untuk mengatasi kekurangan sarana surveillence tersebut di atas?*
2. *Dengan badan-badan intelijen asing siapa saja dan dalam bidang apa saja?*
3. *Menurut informasi alat informasi pada camera-recorder imigrasi di Bandara Cengkareng dipasang oleh pihak Amerika Serikat, dengan catatan mereka berhak menerima hasil pengamatan lalu-lintas orang di Bandara kita?*
4. *Apa bentuk kerja-sama BIN dengan badan-badan intelijen asing tersebut dalam "pemberantasan terorisme" di Indonesia, serta peran dari badan-badan intelijen asing tersebut di Indonesia?*

Tugas Intelijen adalah Pengabdian Mutlak Tanpa Pamrih

Kemampuan dan kualitas kinerja intelijen ditentukan oleh kehandalan dan kualitas dari sistem pendidikan dan pelatihan yang merupakan wujud upaya untuk menjadikan seseorang cakap dan matang melalui pembekalan kemampuan profesional dan pemberian pengalaman secara sistematis.

Pertanyaan :

Untuk menjadikan BIN sebuah lembaga intelijen yang profesional dengan kinerja yang profesional, bagaimana sistem rekrutmen calon-calon petugas intelijen kita?

Sisi kedua adalah efisiensi sistem pembinaan karier yang memungkinkan seseorang menjadi matang melalui pemberian pengalaman yang sistematis. Para master-spy dunia yang ada pada awalnya terbentuk dari para cantrik (*apprentice*). Melalui kedua sistem tersebut yang dibina secara serasi, bertahap dan berlanjut, para cantrik intelijen yang semula masih hijau dibangun keterampilan, kepercayaan diri, kemampuan, dan kepemimpinannya, dengan rajutan antara pelatihan kejuruan dan keahlian berbagai lika-liku seni intelijen dengan penugasan, dari tugas magang, tugas lapangan (*field operative*), lalu agen *handler*, kemudian *middle analyst*, sampai kepada *senior analyst*. Hasil dari itu semua akan melahirkan *master-spy*.

Pertanyaan :

1. *Bagaimana sistem pendidikan dan pelatihan profesional baik yang berupa 'in-house' maupun 'out-house training' ?*
2. *Bagaimana pola 'tour of area' dan tour of duty' (mutasi dan promosi) para pejabat BIN ?*

Akibat iklim politik yang serba tidak menentu, bidang pembinaan karier kepegawaian yang belum mengacu kepada prestasi, yang juga berlaku

pada aparat intelejen, telah mengendala kaidah itu. Para petugas dan pejabat intelejen, terutama yang berasal dengan latar belakang non militer berdasarkan ketentuan pemerintah harus mengikuti 'pendidikan karier' berjenjang regular pegawai negeri, seperti SPAMA, SPAMEN, dan SPATI, untuk mengapatkan kenaikan jabatan yang mengandung juga kenaikan tanggung jawab, sementara sebagaimana dinaklumi, sistem pendidikan karier pegawai negeri tersebut tak ada sangkut pautnya sama sekali dengan peningklatan keterampilan profesionalisme intelijen yang seharusnya mereka peroleh dalam sistem pendidikan karir mereka. Sebaliknya, *in-house training* yang dilakukan oleh lembaga intelijen selama ini di bidang *tradecrafts* mereka ternyata tidak memiliki efek karier, belum mendapatkan pengakuan dari badan administrasi pembinaan kepegawaian negara, BAKN, kecuali sekedar sebagai *credit points* semata.

Sosok Intelijen

Bagian terpenting dari rangkaian pembinaan sumber-daya manusia untuk menjadikan seseorang sisik intelijen dalam rajutan pembinaan pendidikan dan pembinaan karier atas tadi bermula pada tahapan awal, yaitu *recruitment*.

Kekeliruan pada tahapan awal ini akan berdampak panjang. Pencarian bibit (*talent-scouting*) menjadi pengalaman penting dari usaha *recruitment*. Dari sederet panjang tuntutan yang mutlak ada pada tiap calon rekrut ialah *integritas pribadi*, *loyalitas* dan *kemampuan profesional* (*professional competence*).

Integritas pribadi merefleksikan sosok seorang yang jujur, dapat diandalkan, satu kata dengan perbuatan, memiliki keberanian moral, adil dan bijaksana. Kesemuanya mutlak diperlukan, mengingat pekerjaan intelijen akan lebih banyak dilaksanakan dengan mengandalkan pribadi demi pribadi. Pengetahuan, analisis, dan laporan dari seorang sosok intelijen akan sangat tergantung pada *judgement* dari pribadi yang bersangkutan. Dengan kata lain, keberanian mengambil keputusan pada saat-saat kritis yang terkait erat dengan integritas pribadi seseorang.

Loyalitas menjadi tuntutan mutlak yang kedua. Loyalitas, atau kesetiaan, mengandung keteguhan akan komitmen seseorang kepada misi yang diembannya, kepada etika profesinya, kepada organisasinya, dan terutama kepada bangsa dan negaranya, diatas segala-galanya tanpa pamrih. Sosok dan lembaga intelijen tidak boleh menyimpangkan kesetiiaannya kepada kelompok atau golongan, atau kepentingan-kepentingan sempit di luar kepentingan nasional.

Pertanyaan : *Bagaimana mengawasi loyalitas para petugas intelijen dalam tugasnya kepada misinya dan sumpahnya?*

Pengalaman keterlibatan badan-badan intelijen di masa silam dalam konflik-konflik yang bernuansa kepentingan *kelompok* dan *politik aliran* dari sejak awal sejarah republik sebagaimana dituturkan pada riwayat lembaga BRANI, KP V, PBI dan sebagainya, cukup menjadi pelajaran yang telah menorehkan trauma ke dalam tubuh bangsa, yang telah menjadikan badan-badan intelijen kita tidak terlepas dari trauma masa lalu, di mana sosok intelijen kerap cenderung memperlihatkan subjektifitas politik

alirannya, primordialisme yang kental, sehingga tidak dapat menghindari diri dari perlibatan dengan kegiatan politicking dalam politik praktis.

BIN sebagai badan koordinasi intelijen negara, tidak peduli siapa pun yang memimpin dan kapan pun, pada dasarnya harus senantiasa terikat kepada misinya, yaitu menyampaikan informasi yang objektif dan faktual --pertimbangan tentang apa yang sepatutnya dilakukan atau tidak dilakukan-- kepada presiden/kepala negara dalam rangka mengamankan segala upaya untuk "*melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*"

Pertanyaan : *Bagaimana usaha Kepala BIN untuk menjamin agar badan-badan intelijen kita, khususnya BIN, tidak menjalankan politik kelompok, politik aliran dan atau primordialisme, yang selama ini telah menjadi trauma besar di kalangan masyarakat Indonesia?*

Kemampuan profesional menjadi syarat mutlak ketiga menuju terbinanya sosok intelijen yang profesional. Professionalisme tidak terbatas hanya pada penguasaan teknis dari trade-craft intelijen. Di dalamnya terkandung kewajiban dan kemampuan untuk menegakkan etika profesi yang menjadikan intelijen menjadi profesi yang disegani dan terhormat, bukan pekerjaan yang menimbulkan rasa takut dan jijik. Profesionalisme menuntut dalam kegiatan intelijen penghormatan kepada hukum dan ketentuan yang berlaku, hak-hak asasi manusia, nilai-nilai budaya yang

ada, karena negara yang kita impikan bukanlah negara polisi (*police state*) atau negara kekuasaan (*machts staat*) yang kekuasaannya didukung oleh polisi rahasia semacam Kempetai, Gestapo, GRU, atau Stazei. Badan-badan intelijen fungsional, diharapkan oleh rakyat agar "*berhenti melakukan hal-hal di luar fungsi dan misi intelijen, dan terutama dengan kegiatan yang menzalimi rakyat.*" Jangan sampai berlaku pemeo, "sukses di semua bidang, terkecuali di bidang intelijen."

(**Catatan** : Oleh karena itu dalam upaya melakukan profesionalisasi sosok intelijen, dalam rekrutmen calon petugas intelijen di luar tiga tuntutan dan persyaratan tersebut diatas, badan-badan intelijen strategis mensyaratkan tenaga didik *serendah-rendahnya* strata-1; berkepribadian hangat dan menyenangkan-bukan yang berpenampilan sangar; mudah dan enak bergaul dalam berbagai lingkungan ; menguasai paling tidak satu bahasa asing, yaitu bahasa inggris, dengan fasih; mampu membangun struktur berpikir logis dan analitik; serta mampu menyampaikannya secara jernih baik secara lisan maupun tertulis).

Menengok perkembangan intelijen ke belakang dan memandang gelagat perkembangan lingkungan dalam dan luar negeri ke masa depan, usaha untuk melakukan reposisi kedudukan dan peran intelijen dalam kehidupan negara merupakan langkah yang perlu dan harus diambil, dengan secara jujur berusaha menarik pelajaran dari masa lampau serta dari kekurangan-kekurangan objektif yang masih ada di masa kini.

Acuan misi intelijen di masa depan harus terkait dengan usaha untuk mendukung komitmen bangsa, yaitu turut mengamankan terbentuknya, 1)

masyarakat madani yang demokratis; 2) yang menghormati supremasi hukum; 3) mendukung terbentuknya pemerintahan yang bersih; 4) serta menjunjung tinggi pluralitas bangsa dalam wujud penghormatan kepada perbedaan dengan tetap berada dalam pigura Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertanyaan : *Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, apakah Saudara Kepala BIN sepakat akan perlunya melegislasikan suatu 'Undang-undang tentang Intelijen', yang isinya menetapkan secara tegas tugas pokoknya ('mission'), fungsi-fungsinya, bidang-bidang yang menjadi lahan garapannya, jenis tugas ('tasks') agar badan-badan intelijen kita tidak terjebak menjadi "polisi rahasia" yang bertentangan secara mendasar dengan prinsip negara kita sebagai negara hukum ('recht-staat'); undang-undang itu perlu menetapkan kepada siapa ia bertanggung-jawab, bagaimana hubungannya dengan DPR, dari mana sumber alokasi anggaran belanja bagi lembaga intelijen, dan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung-jawab administratif badan-badan intelijen.*

Tantangan Baru – Cakrawala Baru

Tantangan masa depan bukan hanya berwujud ancaman fisik. Runtuhnya Tembok Berlin pada 1985 bukan hanya meniadakan dua kubu yang bersaing, yang nyaris akan meluluh-lantakkan dunia. Berakhirnya Perang Dingin dengan kemenangan blok Barat telah membuka pintu bendungan yang tak tertahankan, munculnya suatu fenomena baru, yakni globalisasi. Globalisasi, atau *proses pensejagatan*, terjadi berkat berlangsungnya revolusi dahsyat di bidang teknologi transportasi, telekomunikasi, dan

informasi. Revolusi tersebut telah mengubah secara total konsep tentang ruang dan waktu. Dunia dibuatnya makin menciut. Kenichi Ohmae menyebutnya *-a new borderless world-* suatu dunia yang tidak lagi mengenal tapal-batas. 7) Tanpa tapal-batas gelombang informasi dalam era globalisasi mendorong *proses uniformisasi* umat manusia. Uniformisasi itu terutama berkiprah dalam visi dan aspirasi, seperti tampak pada gerakan perjuangan untuk menghormati hak-hak asasi manusia, demokratisasi, hidup yang lebih ramah lingkungan. Terhadap gejala uniformisasi tampak gerakan regionalisme yang kini tumbuh bak cendawan di musim hujan dan kian menguat, di Amerika Utara, Eropa, dan Asia (Timur, termasuk Tenggara), serta munculnya *entitas non-negara* yang ditujukan untuk kerja-sama ekonomi seperti WTO, APEC, ASEM, dan sebagainya.

Gejala yang memerlukan kewaspadaan dalam uniformisasi ini ialah terbentuknya *entitas non-negara*, di mana yang terpenting adalah menguatnya kesadaran kesetia-kawanan *diaspora* etnis Cina secara mondial maupun regional, yang kini bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia yang harus diperhitungkan. Di negara-negara tepian Pasifik, di luar RRC dan Taiwan, jumlah etnis Cina yang hanya 25 juta jiwa memiliki pendapatan 30 triliun dolar setahun, yang berarti delapan kali lipat GDP Cina Daratan yang berpenduduk 1,3 milyar jiwa.

Jaringan etnis Cina perantauan tersebut sangat rumit, terdiri dari jaringan-di-dalam-jaringan, baik jaringan berdasarkan *she* (marga), perkongsian, maupun negara, dimana mereka bertempat tinggal, yang terkait rumit satu dengan yang lain. Sudono Salim masih salah seorang

ketua organisasi dari *she* Lim sedunia. Bersama-sama dengan Mochtar Riyadi keduanya menjadi anggota dewan penasehat dari perhimpunan etnis Cina perantauan sedunia yang bermarkas-besar di *Chinese Heritage Center* Singapura.

Dalam hubungan ini Lee Kuan Yew, menteri senior Singapura, dan para pemimpin Singapura, mengidap impian menjadikan Singapura sebagai ibukota para *Hoa Xiao* di dunia. Ketika terjadi *Tragedi Mei 1998* menjelang tumbangnya Presiden Suharto, kerusuhan besar yang menimpa etnik-Cina di Jakarta, adalah Singapura yang paling kencang suaranya mengecam Indonesia dalam rangka memberikan kesan Singapura sebagai negara yang paling peduli dengan nasib etnik Cina *Hoa Xiao*.

Lalu apa kaitannya dengan solidaritas *diaspora* etnis Cina ini? Kekuatan duit mereka. Siapa saja yang ingin berpolitik butuh duit. Tetapi juga sebaliknya, duit menjadi basis dari kekuatan politik. Artinya, sewaktu-waktu kepentingan ekonomi dan atau keuangan dari kelompok etnis Cina perantauan terancam di salah satu atau beberapa negara *klien*, sudah dapat dipastikan akan ada reaksi berupa ramifikasi politik. Terpuruknya moneter, ambruknya perbankan, dan rusaknya ekonomi Indonesia, merupakan salah satu contoh dari kekuatan sistem senjata ekonomi. Tumbangnya rejim Orde Baru bukan karena ada divisi berlapis-baja menggelinding di jalan-jalan Thamrin atau Sudirman di Jakarta, atau penerjunan pasukan payung di lapangan Monas, atau berjatuhnya peluru-kendali di Cilangkap. Presiden Soeharto tumbang karena jatuhnya nilai rupiah, yang membuka pintu kepada krisis moneter dan kemudian ekonomi yang akut. Minat intelijen nasional harus disesuaikan dan

dilebarkan antara lain dengan adanya tantangan berupa ancaman baru tersebut.

Duit juga menjadi faktor kuat yang mempengaruhi perumusan kebijakan nasional. Dalam hal ini contoh konkrit adalah ketika melalui tokoh-tokoh *Hoa Xiao* seperti Tong Joe, Tommy Winata, dan James Riyadi, Presiden Megawati mengeluarkan kebijakan R & D (*Release and Discharge*), kepada para obligor yang pada umumnya adalah konglomerat keturunan Cina yang melarikan diri ke Singapura, pembebasan dari kewajiban mengembalikan hutang-hutang mereka yang mencapai angka sampai 170 trilyun rupiah yang berasal dari *Kredit Likuiditas Bank Indonesia* (KLBI) bermasalah. Bersama dengan penjualan Indosat kepada *Singapura Telecommunications*, dan keputusan untuk menaikkan tarif bahan bakar minyak (BBM), listrik dan telepon, kesemuanya telah menjadi pemantik demonstrasi-demonstrasi besar-besaran yang dilancarkan oleh mahasiswa, pemuda, buruh, pengusaha, kaum miskin dan ibu-ibu rumah tangga di Jakarta pada awal Januari 2003.

Kemudian masalah lain yang memerlukan perhatian adalah runtuhnya *imperium* Uni Sovyet pada tahun 1989 yang telah menampilkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya *super-power* di dunia. Menanggapi peristiwa tersebut Amerika Serikat telah memutuskan untuk mempertahankan dan meningkatkan peran tersebut sebagai pemimpin dunia yang dipandanginya "*lebih efektif ketimbang pemimpin Perserikatan Bangsa-bangsa.*" Untuk itu, berdasarkan doktrin Bush yang disampaikan di depan kongres Amerika Serikat pada tanggal 20 september 2002, di dalam dokumen sebanyak 31 halaman dengan berjudul "*The National Security Strategy*

of United States of Amerika", Amerika Serikat harus meningkatkan upaya untuk memperluas kehadiran militer Amerika Serikat ke seluruh kawasan Eropa dan Asia, dengan membangun pangkalan yang semula hanya ada di 120 negara, diperluas menjadi 160 negara, untuk menjamin kedudukan dan peran *White Americana*, perannya sebagai pemelihara perdamaian dunia di bawah kekuasaan Amerika Serikat untuk mengamankan kepentingan itu Amerika Serikat membentuk sebuah organisasi super-intelligence bernama '*Proactive Pre-Emptiv Organization Group*' (P2OG), dengan tugas melakukan operasi-operasi intelijen atas dasar '*Pukul dahulu urusan belakang*'. Prinsip ini sesuai dengan ancaman presiden Bush kepada semua negara, "*if you're not with use, you're against us*" (kalau tidak mendukung kami, anda adalah musuh kami). Serangan Bom Bali pada 12 Oktober 2002 dan Makasar pada 6 Desember 2002 merupakan bentuk dari kampanye intelijen *proactive* yang baru dari Amerika Serikat sebagaimana kata Menteri Pertahanan Donald Rumfield operasi semacam itu berjuang untuk memancing keluarnya "*tikus-tikus muslim radikal dari sarangnya*."

Peran Intelijen Asing Di Indonesia

Makin meningkatnya operasi intelijen asing, terutama intelijen Barat di Indonesia, terlihat dengan munculnya propaganda hitam di *situs* internet TIME.com edisi 17 September 2002, yang menurunkan berita menarik tentang Omar Al-Faruq, sebagai awal dari suatu operasi intelijen yang sistemik untuk mengubah Indonesia tidak lagi menjadi "*Mata rantai paling lemah di Asia Pasifik dalam rangka upaya memerangi jaringan terorisme internasional*". Munisinya adalah tentang hadirnya gerakan

islam fundamentalis yang digerakkan oleh suatu organisasi, *Jama'ah Islamiyah*, yang gerakannya oleh kaum fundamentalis muslim warga negara Indonesia untuk mendirikan "super-state" Islam di Asia Tenggara. Tujuan akhir dari kampanye intelijen ini adalah untuk menguasai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kampanye anti-terorisme Amerika Serikat di Indonesia seluruhnya hanya didasarkan pada pengakuan Al-Farouq segera diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya menekan Indonesia dari para *proxy* Amerika, seperti "sheriff Amerika" John Howard dari Australia, "jurubicara" menteri senior Singapura Lee Kuan Yew, yang menuduh melalui majalah *the Far Eastern Economic Review Hongkong*, bahwa ada "*ratusan gerakan Islam radikal di Indonesia yang berpotensi sebagai organisasi teroris.*" Pernyataan Lee Kuan Yew itu *menggebyah-uyah* semua organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia adalah organisasi teroris.

Konon menurut CIA Al-Farouq adalah tokoh kakap Al Qaeda di Asia Tenggara yang berhasil dididuk, dikesankan sebagai prestasi terpenting CIA di Asia Tenggara. Mengapa? Karena ia dinyatakan sebagai tangan kanan Usamah bin Ladin, yang mendapat tugas untuk mengkoordinasikan gerakan Islam radikal di Asia Tenggara. Ia tokoh penting terutama dengan kegiatan untuk mendirikan sebuah "super-state" Islam di Asia Tenggara. Ia disebutkan banyak menjalin hubungan drngan tokoh-tokoh Islam radikal Indonesia, antara lain dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, pemimpin pondok pesantren Al Mukmin, Ngruki, Solo. Ia juga adalah Amir *Majelis Mujahidin Indonesia*, yang dituduh sebagai "sayap" Al Qaeda di Indonesia.

Dalam dokumen CIA itu ada banyak nama Arab tokoh-tokoh Al-Qaeda yang berada dalam jaringan korespondensi Al Farouq. Antara lain, ada nama-nama Dr. Ayman Al Zawayhiri dan Mohammad Atef. Kedua tokoh puncak Al Qaeda itu dilaporkan pernah mengunjungi Poso dan Ambon pada tahun 2000, dua tempat bergolak yang oleh CIA dituduh akan dijadikan sebagai basis baru Al Qaeda, sebagai Afghanistan kedua.

Dari laporan-laporan CIA yang dibocorkan melalui media massa, Amerika Serikat ingin membangun kesan bahwa jaringan Al Qaeda di Indonesia merupakan serius. Laporan itu juga mengatakan Al Qaeda berhasil membangun sebuah "kamp latihan militer" di Poso. Selain Poso ada tiga buah lagi di Kalimantan, antara lain sebuah di Balikpapan. Tanggal 18 Januari 2002 melalui juru bicara BIN Muchyar Mara mengulang kembali bahwa di Poso ada pusat kamp pelatihan teroris Islam meski berkali-kali dibantah oleh pejabat setempat.

Sekedar sebaagai contoh, pusat latihan militer kaum Islam radikal di Kalimantan yang disebut-sebut dalam laporan CIA itu ternyata pondok pesantren *Hidayatullah*, yang ada di desa Gunung Tembak, Balikpapan. Kampus pondok pesantren Hidayatullah itu terdiri dari suatu hamparan seluas 30 hektar dengan bangunan masjid, gedung pertemuan umum, ruang belajar, bedeng-bedeng perbengkelan mesin dan alat-alat pertanian, hamparan lahan ladang tempat para santri praktek bertani, sebuah danau buatan yang asri sebagai reservoir air bagi kawasan desa Gunung Tembak, dan asrama bagi santri putra maupun putri serta kawasan perumahan para ustadz. kawasan ini, karena design lengkapnya, pernah

mendapatkan penghargaan *Kalpataru* karena jasa-jasa Hidayatullah mengubah tanah gersang di sana menjadi lahan subur.

Bertetangga dengan pesantren *Hidayahtullah* di desa Mandar berdiri tegak pangkalan Yonif 600 Lintas-Udara, pasukan cadangan pemukul dari Kodam VI/Tanjungpura, dan agak ke selatan lagi berdiri basis kompi Kopasgat TNI AU yang bertugas mengamankan kawasan bandara internasional Sepinggang, Balikpapan. Di antara pangkalan-pangkalan ini dengan pesantren, yang dahulunya hanyalah hutan dan semak belukar, berkat bimbingan pesantren Hidayatullah. Itulah "pusat latihan militer" di Balikpapan menurut versi CIA.

Pertanyaan : *bagaimana keterrangan dari kepala BIN tentang informasi tentang adanya kamp-kamp latihan kaum teroris di Poso dan Kalimantan yang dinyatakan oleh juru-bicara BIN Machya Mara?*

Yang termasuk dalam daftar "wanted"- orang yang dicari di Indonesia menurut versi Amerika Serikat kalau diteliti ternyata adalah mereka yang turut memperjuangkan berlakunya syariat islam di Indonesia. Sebagai contoh, Agus Dwi Karna yang bersama-sama Tamsil Linrung mestinya sudah dibebaskan oleh pengadilan Manila, ternyata keputusan itu dicabut kembali dan tidak berlaku bagi Agus Dwi Karna, karena dia adalah ketua dari *Laskar Jundullah*, organisasi yang bernaung di bawah "panitia persiapan pelaksanaan Syari'at Islam Sulawesi Selatan". Dosa dari ustadz Abu Bakar Ba'asyir, karena ia menyatakan mendukung gagasan "*berlakunya syari'at Islam bagi para pemeluknya*" di Indonesia. Sebenarnya Agus, ustadz Ba'asyir, tidak sendirian. Banyak orang

Indonesia dan bahkan beberapa Partai politik di Indonesia, masih terus memperjuangkan gagasan berlakunya syari'at Islam "*bagi para pemeluknya*" di Indonesia, dan aspirasi itu sudah menjadi publik dan legal-konstitusional sejak bulan Juni 1945 dalam debat-debat terbuka di sidang *Dokuritsu Zyoonbi Choosa-kai*, kemudian di sidang *Konstituante* pada tahun 1959, dan terakhir di sidang MPR 1999. Jadi apa salah mereka? Dan sampai dengan hari ini gagasan pemberlakuan syari'at Islam "*bagi para peneluknya*" di Indonesia masih menjadi wacana terbuka di tengah-tengah publik di Indonesia.

Pertanyaan : *Sampai dengan hari ini pihak kepolisian belum juga berhasil mengungkapkan bukti-bukti keterlibatan dari Al Ustadz Abu Bakar Ba'syir dengan kegiatan terorisme sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak keamanan selama ini. Bagaimana keterangan dari kepala BIN tentang tuduhan terhadap Al Ustadz Abu Bakar Ba'syir yang hanya berdasarkan testimoni tunggal 'in absentia' dari seorang tokoh Omar Al-Faruq?*

Pada tanggal 12 Oktober 2002 pukul 23.05 sebuah ledakan bom di Bali yang begitu dasyat, konon dilihat dari jumlah korban yang jatuh adalah yang kedua terbesar sesudah serangan terhadap gedung WTC New York. Bom yang meledak di depan Sari Night Club menewaskan 184 jiwa mencederai berat dan ringan 300-an orang, seratusan lagi hilang, menghancurkan atau merusak 47 buah bangunan, dan membakar seratusan kendaraan berbagai jenis.

Para pengamat dan para ahli demolisi pada umumnya berpendapat bahan-ledak yang digunakan di pantai Legian-Kuta itu bukan dari bahan konvensional. Tim investigasi gabungan Polri dan Australia berusaha melunakkannya dengan menyebutkan bahwa bahan ledaknya, yang semula dikatakan dari bahan C-4, kemudian diturunkan menjadi RDX, kemudian diturunkan lagi menjadi HDX, kemudian TNT, lalu bahan ledak yang diimprovisasi dari bahan pupuk dan akhirnya dari bahan karbit. Ada kesan perubahan keterangan tentang bahan-ledak agaknya dimaksudkan untuk meniadakan tuduhan bahwa bom itu ulah dari kekuatan luar.

Ledakan bom Bali itu harus dibaca sebagai *coup de grace* kepada Indonesia yang melengkapkan hegemoni Amerika Serikat di Asia Tenggara. Bom Bali sengaja dibuat sedemikian hebatnya, bukan termasuk kategori bom lokal agar gaungnya mengglobal, sebagai *pretext* bahwa bangsa dibelakang peledakan itu adalah Muhammad Khalifah, adik-ipar Usamah bin Ladin, dari Al Qaidah. 8)

Ketika Presiden Bush mengancam negara-negara termasuk Indonesia dengan dalil "*If you not with us, you're against us*", ancaman itu tidak menyisakan alternatif lain, kecuali "ikut, atau menjadi musuh Amerika". Terima wortel atau mau pentungan. Kebijakan satu arah semacam itu tidak membuka peluang bagi negara lain untuk mengembangkan politik nasional yang netral, politik yang bebas-aktif. Sikap Amerika itu telah menjadi ancaman terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional Indonesia selama ini yang bebas dan berkedaulatan baik dalam pengembangan kebijakan dalam-negeri, luar-negeri maupun keamanan, yang tidak selalu searah dengan selera Amerika Serikat. Seorang

Indonesianis, Daniel Lev, memberikan saran kepada pemerintah Indonesia, agar tidak terseret pada kepentingan asing jangka-pendek, dan lebih baik memberikan perhatiannya kepada kepentingan nasional Indonesia jangka-panjang.

Menghadapi dilema seperti itu, maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah dan badan intelijen nasional kita kecuali melaksanakan tugasnya dengan tetap mengacu kepada amanah konstitusi, *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."*

Sumber : Khalifah 1924.Org

WAWASAN INTELIJEN

Intelijen?

Apakah definisi Intelijen?

Intelijen dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan langsung dari Intelligence (N) dalam bahasa Inggris yang berarti kemampuan berpikir/analisa manusia. Mudah-mudahan kita lihat saja test IQ (Intelligence Quotient), itulah makna dasar dari Intelijen.

Intelijen atau Intelligence berarti juga seni mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi strategis yang diperlukan sebuah negara tentang negara "musuh". Dari definisi ini berkembang istilah counterintelligence yang merupakan lawan kata dari intelligence.

Intelijen juga merujuk pada organisasi yang melakukan seni pencarian, pengumpulan dan pengolahan informasi tersebut di atas. Dengan definisi ini intelijen juga mencakup orang-orang yang berada di dalam organisasi intelijen termasuk sistem operasi dan analisisnya.

USA, Russia (sejak era Uni Soviet) adalah dua negara yang mengembangkan intelligence mengarah pada sebuah field science baru. Keberadaan sejumlah Akademi di Russia, bahkan Sekolah Tinggi sampai Graduate School di USA (bersepesialisasi di bidang intelijen) merupakan langkah-langkah gradual menuju penciptaan field science of intelligence.

Sementara di sebagian besar negara "besar" seperti Inggris, Perancis, dan China, Intelligence masih dianggap sebagai seni yang dirahasiakan dan hanya diajarkan pada calon-calon agen intelijen selama beberapa tahun.

Hakikat Keberadaan Organisasi Intelijen

Mungkin kebanyakan orang menyangka keberadaan organisasi intelijen semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah atau elit politik yang berkuasa. Hal ini merupakan kekeliruan persepsi yang sangat membahayakan bagi nama baik sebuah organisasi intelijen. Dalam kasus kebijakan represif negara junta militer, otoriter, rejim komunis dan revolusi sejenisnya, memang terjadi penyimpangan fungsi intelijen yang hakikatnya ditujukan untuk menghadapi ancaman dari luar negara menjadi alat represi bagi pemerintah.

Teknik, mekanisme kerja, sistem analisa dan produk yang dihasilkan organisasi intelijen di manapun di dunia adalah sejenis, yaitu berupa hasil olah analisa berdasarkan data-data yang akurat dan tepat serta disampaikan secepat mungkin kepada para pengambil keputusan dalam sebuah negara.

Tidak ada yang misterius, aneh ataupun luar biasa dalam organisasi intelijen. Secara historis dan alamiah, organisasi intelijen memiliki ciri tertentu yang telah diketahui masyarakat luas, yaitu **prinsip kerahasiaan**. Ciri utama inilah yang kemudian menimbulkan tanda-tanya bagi masyarakat. Selanjutnya timbul pula praduga-praduga yang belum tentu benar sehingga mitologi intelijen menjadi semakin kabur dalam bayang-bayang cerita atau kisah nyata, cerita fiksi dan fakta terjadinya peristiwa yang sulit diungkapkan secara transparan kepada khalayak.

Definisi tugas pokok intelijen di seluruh dunia cukup jelas, yaitu pada umumnya bertugas mengumpulkan intelijen (informasi) dan melakukan operasi tertutup (kegiatan rahasia) di luar negeri. Intisari dua kegiatan utama tersebut adalah mengidentifikasi dan mencegah ancaman terhadap negara dan warga negara serta untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan negara.

Sementara itu, apa yang dimaksud dengan kegiatan intelijen di dalam negeri adalah kontra-intelijen (kontra-spionase), yaitu kegiatan rahasia yang ditujukan untuk mendeteksi kegiatan intelijen negara asing di dalam wilayah teritorial negara kita. Dalam perkembangannya kegiatan kontra-intelijen lebih ditujukan untuk menangkal kegiatan terorisme internasional maupun kejahatan trans-nasional.

Tidak ada istilah meng-inteli warga negara yang "kontra" pemerintah. Model ini hanya ada dan muncul di negara-negara blok komunis, junta militer dan negara otoriter dengan tujuan melanggengkan kekuasaan. Sementara di negara demokrasi, transparansi dan persaingan politik yang sehat dalam koridor hukum sewajibnya diterima sebagai aturan main dan intelijen harus "bersih" dari soal dukung-mendukung kekuatan politik yang bersaing di dalam negeri. Sangat mirip dengan peranan militer dalam negara demokrasi.

Apa yang sering disebut sebagai intelijen tingkat instansi dan intelijen polisi lebih mengarah pada spesifikasi sasaran operasi, dan mereka tidak melakukan operasi intelijen seperti hakikatnya intelijen. Apa yang mereka lakukan adalah penyelidikan dan penyidikan atas suatu

pelanggaran hukum. Adapun teknik dan mekanisme kerjanya bisa saja sama dengan intelijen "murni".

Intelijen militer bisa dianggap sebagai saudara kandung intelijen sipil. Tujuan, motivasi dan hakikat operasinya bisa dikatakan sama. Hanya saja cakupan ruang operasinya yang sedikit berbeda, bahkan seringkali terjadi operasi gabungan sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing. Perbedaan hanya sedikit dalam tujuan operasi taktis (jangka pendek), sekedar contoh misalnya saja signal intelligence (SIGINT) sangat vital bagi intelijen militer karena terkait dengan pendeteksian mobilisasi militer asing yang menjadi pihak lawan (oposisi). Sementara itu, SIGINT bagi intelijen sipil lebih bermanfaat dalam mengamankan operasi tertutup di negara lawan dengan melakukan coding informasi yang rumit dan sulit dipecahkan lawan.

Meskipun dinamakan Organisasi Intelijen Sipil, organisasi intelijen yang baik tidak bisa hanya berwarna sipil karena pentingnya sentuhan militer. Hakikatnya merupakan gabungan antara kemampuan militer (tempur) atau combatants dan petugas intelijen (intelligence officers). Dengan kata lain, meskipun seorang anggota intelijen berlatar belakang militer dia juga punya kemampuan seluwes orang sipil. Sebaliknya petugas intelijen sipil wajib mempunyai kemampuan militer yang cukup. Mereka semua wajib untuk loyal dan bersumpah setia demi keselamatan rakyat dan negara. Intelktual, bakat, dedikasi dan keberanian adalah beberapa hal yang menjadi modal utama insan intelijen baik sipil maupun militer.

Sebagai orang Indonesia yang peduli dengan reformasi intelijen Indonesia, terus terang saya sangat sedih dan kecewa dengan perkembangan, dinamika, serta prospek intelijen di Indonesia.

Mudah-mudahan tulisan singkat ini dibaca dan dipahami oleh generasi muda, intelektual dan mereka yang aktif di dunia intelijen. Harapan saya adalah bangkitnya semangat dan berkembangnya kreatifitas serta kesungguhan dan tekad yang kuat dalam membangun organisasi intelijen di Indonesia yang ideal, bisa diaplikasikan serta memiliki citra positif di mata masyarakat Indonesia dan disegani oleh lawan yang menjadi ancaman bagi negara dan warga negara Indonesia.

Internal Security

Internalisasi konsep pengamanan ke dalam kesadaran seorang intel merupakan dasar dari segala tindak tanduk intelijen dalam situasi apapun. Dalam operasi maupun dalam kehidupan sehari-hari seorang intel tidak akan pernah bisa mengabaikan konsep internal security.

Konsep internal security paling inti terletak pada kewaspadaan seorang intel atas keamanan dari ancaman maupun potensi ancaman terhadap dirinya sendiri. Kemudian bisa diperluas ke lingkungan unit kerjanya, organisasi, keluarga, dan masyarakat.

Pelatihan dasar berupa penyelamatan pertama dari bahaya kecelakaan, kebakaran, serangan/ancaman orang jahat, pengamatan intel asing, dan ancaman dari "pemerintah" yang bisa jadi ingin mengorbankan dirinya adalah pelajaran-pelajaran harus melekat di dalam kesadaran seorang intel. **Trust No One**

Antara Polisi, Militer dan Intelijen

Sebenarnya saya ingin istirahat sejenak, tetapi mumpung lagi ingat dan sangat aktual jadi saya tuliskan saja, mudah-mudahan ada anggota polisi, militer atau intelijen yang membacanya, atau setidaknya ada diantara pembaca yg melaporkannya kepada aparat keamanan di Indonesia.

Seperti lagu antara aku, engkau dan bekas pacarmu, hubungan antara polisi, militer dan intelijen menjadi semakin kompleks dan mengkhawatirkan dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Bila situasi "tidak enak" diantara ketiga lembaga yang bertanggung jawab menciptakan rasa aman bagi rakyat Indonesia itu tetap ada, tidak tertutup kemungkinan kondisi yang semakin buruk akan menciptakan "persoalan" yg tak kunjung selesai di tanah air.

Dimana letak persoalan yang saya maksudkan? Hari ini saya hanya akan bicara soal kehormatan (dignity ataupun pride). Ketiga lembaga tersebut sangat menjunjung tinggi kehormatan korps, sehingga sangat perlu untuk menjaga *respect* baik diantara mereka maupun dari rakyat. Bayangkan perasaan korps TNI yang pada masa lalu demikian dihormati (mungkin lebih tepat ditakuti), sekarang setelah diupayakan untuk kembali dalam kotak-kotak barak demi profesionalitas, masih saja dituduh macam-macam. Ketakutan kembalinya dominasi TNI dalam dunia politik kekuasaan justru menciptakan rasa muak dari tubuh korps TNI terhadap sikap konyol yang meragukan reformasi TNI (meski lambat tetapi pasti, ini lebih baik ketimbang perubahan drastis). Misalnya dalam kasus koter

(komando teritorial), tidak ada yg salah dengan struktur ini sepanjang fungsinya memang untuk menjamin pertahanan negara. Artinya TNI tidak masuk secara semena-mena ke dalam ruang publik masyarakat, karena kewajiban penjagaan keamanan publik secara hukum menjadi tanggung jawab Polisi. Tetapi bagaimana bila tidak ada Polisi? tentunya siapapun yang memiliki kemampuan perlu mengambil tindakan untuk setidaknya menjaga ketentraman dan ketertiban tidak secara berlebihan tentunya. Dalam kaitan ini bisa saja dibuat semacam prosedur yang resmi secara hukum.

Ketakutan terhadap bangkitnya militerisme tidak sepatutnya ditunjukkan dengan sikap anti militer yang cenderung lahir dari rasa benci atau tidak suka. Akan lebih elegan bila kita sikap adil dalam penyusunan struktur pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Juga sangat diperlukan kehati-hatian dalam menggagas masa depan struktur tersebut. Sikap arogan yang terus-terusan mengecilkan peranan TNI, saya perhatikan bukan saja telah menggores kehormatan TNI, tetapi lebih jauh sangat sembrono karena bandulnya terlalu jauh di dorong ke sisi ekstrim yang berpotensi melahirkan sikap "perlawanan" dari hati siapapun yang telah dididik untuk menjadi patriot bangsa. Saya ide dasar dwifungsi di masa awal adalah bukan untuk penguasaan Indonesia oleh militer, melainkan bagaimana militer tetap bisa menyumbangkan tenaga dan pikiran di masa damai, tetapi sayang.... sejarah telah mencatat prestasi buruk dari dwifungsi tersebut.

Sebuah titik balik tercermin dari kebangkitan Polisi sebagai korps yang sejatinya memang untuk menjaga keamanan publik. Keberhasilan reformasi memisahkan Polisi dari belenggu militer tidak seyogyanya menciptakan arogansi baru dari tubuh korps Polisi yang akan menjadi pemain utama dalam keamanan domestik Indonesia. Tidak ada yang salah dengan reformasi tersebut dari kaca mata pemerintahan sipil yang demokratis. Hanya saja pemulihan kehormatan Polisi sebagai salah satu penegak hukum seyogyanya tidak melahirkan rejim keamanan Polisional yang kemudian cenderung merendahkan korps keamanan yang lain, seperti militer dan institusi intelijen. Pernyataan "sombong" dari Kepolisian Republik Indonesia yang saya akui semakin berprestasi, seringkali bertentangan dengan kerendahan hati dunia intelligence community dan kevakuman agen-agen militer. Semua tahu siapa yang berkuasa dan dijamin hukum sekarang, tetapi tidak berarti dengan kekuasaan tersebut Polisi menjadi agen tunggal keamanan negara Republik Indonesia. Dengan semakin besarnya organisasi Polisi, berarti kita telah melangkah dari negara semi militer menuju negara Polisi, pada saatnya nanti kerawanan penyalahgunaan wewenang untuk keperluan di luar tugas akan muncul satu per satu.

Saya tidak anti Polisi bahkan sangat mendukung terciptanya supremasi sipil dalam negara demokratis Indonesia. Tetapi struktur keamanan negara tidak sepatutnya terlalu berat pada hanya satu korps saja, bagaikan pilar tunggal. Rencana pembentukan semacam National Security Council sangatlah penting dalam rangka memperjelas arah dan ruang lingkup pekerjaan masing-masing korps keamanan di Indonesia. Dengan

keanggotaan yang lengkap dari berbagai element keamanan yang didukung kalangan praktisi hukum, akademisi saya yakin format keamanan dan struktur yang menjadi penjanganya akan menghilangkan rasa tidak enak antara korps.

Hal tersebut di atas adalah fakta mengapa KOORDINASI keamanan itu menjadi omong kosong, karena masing-masing bergerak sendiri-sendiri.

Lalu bagaimana dengan intelijen?

Intelijen militer terbagi dalam dua kubu besar yaitu intelijen tempur (taktis) dan intelijen strategis. Intelijen strategis di masa Orde Baru hampir tidak ada bedanya dengan Intelijen Sipil seperti BAKIN yang kemudian menjadi BIN, semuanya terlalu berat dalam menangani soal-soal politik dalam negeri dan mengantisipasi ATHG yang didefinisikan dari Bina Graha atau Cendana. Pada masa ini, intelijen yang juga didominasi oleh orang-orang intel militer memiliki kehormatannya sendiri berupa prestasi di tingkat nasional dan internasional. Meski tidak diketahui oleh publik, tapi stabilitas terjaga melalui pola-pola penanganan "masalah" dengan cepat. Di bidang politik, peranan intelijen dalam memastikan kelanggengan kekuasaan adalah sangat vital. Suasana ini jelas berubah pasca reformasi, intelijen tidak lagi bisa mengabdikan secara membabi buta dalam mendukung kekuasaan politik seorang presiden, inilah salah satu penyebab utama mengapa presiden Indonesia pasca reformasi tampak tidak kuat. Keinginan kuat dari agen-agen muda untuk juga berperan secara profesional dan obyektif menyebabkan kelumpuhan

dalam mendukung kekuasaan presiden. Bila pimpinan intelijen tidak mendeteksi gejala ini dalam tubuh organisasi, saya kira amatlah disayangkan.

Lebih jauh, Intelijen lebih suka berperan dalam bidang-bidang yang benar-benar ancaman serius bagi masa depan bangsa Indonesia seperti terorisme, kontra-intelijen, spionase aktif, transnational crime, intelijen ekonomi, juga dalam kasus korupsi dan konflik lokal/regional.

Sementara itu, Intelijen tempur menurut saya tetap berada dalam posisi yang sama persis dengan era Orde Baru, mereka membutuhkan dukungan teknologi satelit, radar, sistem deteksi dini, dan operasi-operasi pengamatan di wilayah perbatasan dan yg berpotensi menjadi daerah konflik. Dukungan kepada mereka saya kira sangat minimal, dan keberadaan mereka justru di garis depan komando teritorial yang banyak diperdebatkan itu. Bila yang dimaksud komando teritorial itu berupa kepanjangan kepentingan menjaga kekuasaan model Orde Baru, maka garisnya mengarah pada intelijen strategis. Namun jangan salah, intelijen strategis juga mendata dan menyelidiki secara mendalam gerakan yg menciptakan kekacauan di dalam negeri mulai dari aksi individual, gerakan separatis, gerakan ideologi kiri dan kanan, dan tentu saja gerakan teroris. Hal ini boleh dikata sangat mirip dengan BAKIN atau BIN sekarang. Bahkan baik intelijen strategis maupun intelijen negara memiliki kepanjangan tangan di luar negeri. Intelijen strategis melalui atase hankam, intelijen negara melalui agen.

Sebenarnya saya hanya mau bilang kalo penataan intelijen, polisi dan militer seyogyanya dilakukan secara terpadu dan hati-hati tanpa menyinggung kehormatan korps. Sangat diperlukan kejelasan hukum yang menjadi landasan bagi terciptanya pembagian kerja yang sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Jangan seperti patriot bebek yang hanya aktif pada sektor-sektor yang sedang populer dan aktual, ada masalah teroris semua aparat mengerubungi tanpa koordinasi, bahkan ada keinginan untuk menjadi yang paling hebat/dominan. Perlu ada kejelasan pembagian tugas dan definisi pekerjaan masing-masing. Jadi meskipun seseorang itu anggota TNI aktif, bila dia seorang spesialis infiltrator ke organisasi teroris, tidak ada salahnya bila diaktifkan dengan tugas khusus. Demikian juga juga dengan anggota-anggota Polisi yang berada di bagian anti teror, seyogyanya saling mengenal dengan anggota anti teror di tubuh militer dan intelijen. Dengan demikian tidak perlu terjadi silang pendapat yang sifatnya saling membantah di antara sesama aparat keamanan, baik polisi, militer maupun intelijen, karena hal ini cuma memperjelas tidak adanya koordinasi, tidak adanya saling menghormati. Tentunya hal ini kembali pada segenap jajaran pimpinan Polisi, Militer dan Intelijen.

Aku...Engkau dan Bekas Pacarmu....

Bidang Studi Intelijen

Apa sebenarnya yang wajib dipelajari dalam studi intelijen secara akademik?

Pertanyaan itu terus menggelitik hati dan pikiran saya sejak Pak Hendropriyono menggagas dan akhirnya mewujudkan sekolah Intelijen setingkat S1 dan S2 beberapa tahun silam. Tanggung jawab dalam mencetak kader intelijen yang memiliki kapasitas keserjanaan yang tinggi secara akademis terus membayangi sekolah Intelijen. Karena saya tidak bisa ikut campur dalam penyusunan kurikulum maupun penyelenggaraan sekolah tersebut, maka saya akan ungkapkan apa-apa yang wajib dipelajari dalam studi intelijen berdasarkan survey internet dan pengalaman sekolah saya, sbb:

1. Konteks studi intelijen seyogyanya lebih luas dari studi politik, ekonomi, hubungan internasional, kebijakan luar negeri, hukum internasional, kriminologi, etika, psikologi, dan usaha-usaha negara bangsa dalam memelihara keamanan politik, sosial, ekonomi, dan militer. Dengan kata lain studi **intelijen bersifat multidisplin**.
2. Sebagai pondasi, diperlukan studi logika, matematika dan statistik serta dasar-dasar ilmu alam, filsafat manusia dan filsafat ilmu pengetahuan, geografi, dan sejarah dunia.
3. Sebagai pengetahuan praktis dan teknis perlu dikembangkan spesialisasi khusus seperti bahasa asing, fotografi dan teknologi audio video, ilmu komputer, teknologi komunikasi, dan teknologi sistem pengamanan.

4. Sebagai pilihan studi bisa disusun berdasarkan area studies (kajian wilayah/kawasan misalnya Asia Tenggara) atau issues studies (kajian masalah misalnya Terrorisme).
5. Sebagai studi utama, tentu saja tetap mengajarkan dasar-dasar intelijen mulai dari internal security sampai pada analisa intelijen strategis tingkat advance.

Dalam waktu studi 4-5 tahun tentu saja variasi studi yang bisa disusun dalam sebuah kurikulum studi intelijen bisa diperluas ke bidang-bidang lain yang juga menjadi perhatian intelijen, bisa juga memasukkan studi lingkungan hidup, studi tentang gerakan NGO, studi tentang analisa psikologi (khususnya tentang personality), teori komunikasi beserta teknik praktisnya, dll.

Semoga saja, sahabat Blog I-I yang sedang atau sudah menempuh studi intelijen baik yg S1 maupun S2, juga mendapatkan apa yg saya tuliskan di atas. Karena dengan demikian, saya yakin cukup memadai untuk menjadi dasar dalam melangkah secara mantap dan profesional khususnya dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kapabilitas organisasi intelijen secara umum.

Catatan dari saya tersebut di atas bisa jadi masih sangat kurang. Bila ada yang ingin menambahkan ide silahkan.

Sekian

Perputaran Intelijen

Sedikit memenuhi harapan sebagian pembaca tentang teknik intelijen, berikut ini saya sarikan apa yang disebut perputaran intelijen atau lingkaran kerja intelijen atau the intelligence cycle. lebih nyaman rasanya menggunakan istilah asing the intelligence cycle.

The intelligence cycle adalah proses mengolah informasi mentah menjadi produk intelijen yang disampaikan kepada pengambil kebijakan untuk digunakan dalam penentuan kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan. Ada 5 langkah dalam perputaran intelijen.

1. **Planning and Direction.** Merupakan manajemen informasi mulai dari identifikasi data-data yang diperlukan sampai pengiriman produk intelijen ke pengambil kebijakan atau pengguna produk intelijen. Merupakan awal dan akhir dari lingkaran. Menjadi awal karena berkaitan dengan penyusunan rencana yang mencakup kebutuhan pengumpulan informasi yang spesifik dan menjadi akhir karena produk akhir intelijen yang mendukung keputusan kebijakan, menciptakan permintaan-permintaan produk intelijen yang baru. Keseluruhan proses mengacu pada petunjuk pengambil kebijakan seperti Presiden atau Perdana Menteri, pembantu-pembantu di jajaran eksekutif seperti Dewan Keamanan Nasional, anggota kabinet....yang kesemua itu mengawali permintaan khusus kepada intelijen.
2. **Collection.** Adalah pengumpulan data/informasi mentah yang diperlukan untuk memproduksi analisa intelijen. Ada banyak

sekali sumber-sumber informasi termasuk informasi terbuka seperti berita radio asing, surat kabar, majalah, internet, buku, dll. Informasi terbuka merupakan salah satu sumber utama intelijen yang harus dimekanisasikan secara disiplin menjadi sebuah rutinitas sehari-hari yang menjadi supply tidak terbatas yang akan mendukung analisa intelijen. Bila anda pernah berkunjung ke CSIS di Tanah Abang III Jakarta, perhatikan bagaimana intelijen masa Orde Baru berbagi teknik dengan lembaga penelitian dan menjadikannya sebagai salah satu lembaga yang disegani. Guntingan Koran CSIS adalah khas pekerjaan membosankan yang sangat vital bagi intelijen, khususnya bagi perwira analis, karena dengan mengikuti setiap waktu perkembangan terkini dari media massa akan melatih insting analisanya. Di samping itu, ada juga informasi rahasia dari sumber-sumber yang rahasia pula. Informasi ini hanya memiliki prosentase yang kecil namun sifatnya amatlah sangat penting sehingga sering juga menjadi penentu dari sebuah produk intelijen. Biasanya diperoleh dari operasi tertutup oleh para agen intelijen atau melalui informan. Secara teknis pengumpulan data juga dilakukan oleh peralatan canggih secara elektronik dan fotografi serta satelit.

3. **Processing.** Berkaitan dengan interpretasi atas data/informasi yang sangat banyak. Mulai dari penterjemahan kode, penterjemahan bahasa, klasifikasi data, dan penyaringan data. Dalam organisasi intelijen tradisional dan konservatif, seorang agen baru seringkali harus melalui masa-masa membosankan

melakukan pemilahan data berdasarkan kategori yang ditentukan atasannya. Hal ini sangat penting untuk membiasakan diri dalam menyusun jurnal pribadi maupun jurnal unit yang sangat vital dalam mempercepat proses penemuan kembali data-data lama yang tersimpan. Juga membiasakan diri untuk segera melihat data dari sudut pandang potensi spot intelijen atau memiliki potensi ancaman.

4. **All source Analysis and Production.** Merupakan konversi dari informasi dasar yang telah diproses menjadi produk intelijen. Termasuk didalamnya evaluasi dan analisa secara utuh dari data yang tersedia. Seringkali data yang ada saling bertentangan atau terpisah-pisah. Untuk keperluan analisa dan produksi, seorang analis, yang biasanya juga spesialis bidang tertentu, sangat memperhatikan tingkat "kepercayaan" data (bisa dipercaya atau tidak), tingkat kebenaran dan tingkat relevansi. Mereka menyatukan data yang tersedia dalam satu kesatuan analisa yang utuh, serta meletakkan informasi yang telah dievaluasi dalam konteksnya. Bagian akhirnya adalah produk intelijen yang mencakup penilaian atas sebuah peristiwa serta perkiraan akan dampaknya pada keamanan nasional. Salah satu unsur vital dari produk intelijen adalah peringatan dini dan perkiraan keadaan. Sementara model laporan ada macam-macamnya mulai dari yang sangat singkat berupa telpon lisan yang menjadi laporan kepada pimpinan negara, sampai laporan yang cukup tebal mencakup analisa perkiraan keadaan tahunan. Dari beberapa kasus yang terungkap di media massa, terlihat jelas bahwa baik BIN maupun

BAIS TNI sangat lemah di sektor analis ini, entah karena sumber daya manusia-nya yang levelnya masih sebatas lulusan akademi militer, D3 atau S1 saja, atau karena memang keterbatasan dana yang menyebabkan lembaga intelijen tidak berkulit soal peningkatan SDM. Bandingkan misalnya dengan CIA atau Mi6 yang secara aktif mengirimkan para analisnya ke universitas-universitas di berbagai negara untuk menempuh studi doktor sekaligus memantapkan spesialisasi masing-masing.

5. **Dissemination.** Merupakan langkah terakhir yang secara logika merupakan masukkan untuk langkah pertama. Adalah distribusi produk intelijen kepada pengguna (pengambil kebijakan) yang biasanya adalah mereka yang meminta informasi kepada intelijen. Untuk kasus Indonesia, pengguna disini hampir identik dengan Presiden.

Sekian.

Kegiatan Rahasia

Metode pengumpulan informasi oleh organisasi intelijen di seluruh dunia selalu mengandalkan human intelligence (humint). Pertanyaannya kemudian adalah apakah metode klasik penyampaian informasi ke kantor pusat masih saja berlangsung. Pola-pola operasi dead drop microfiche dan brushpass, dll tampaknya semakin rawan. Sementara komunikasi melalui internet jelas sangat terbuka oleh program-program deteksi semacam cyberspy dan kaum hacker serta sistem pengawasan oleh provider internet dan pemerintah.

Sistem pengawasan lingkungan yang semakin ketat sejalan dengan perkembangan teknologi mau tidak mau akan menyulitkan kegiatan rahasia di luar negeri.

Berbeda dengan kegiatan rahasia di dalam negeri, kegiatan rahasia di luar negeri tidak saja beresiko karena melanggar hukum sebuah negara melainkan juga karena bisa merusak kredibilitas sebuah negara di mata negara yang dimata-matai. Lebih jauh merusak hubungan diplomatik.

Hal yang paling lucu dari kegiatan rahasia di luar negeri belakangan ini adalah para intel dari berbagai negara akhirnya minum kopi bersama-sama di Starbuck sambil berdiskusi tentang terorisme internasional, tentang masalah internasional, dengan pengecualian masalah di negara masing-masing, lha bagaimana ini...mungkin abad 21 ini merupakan akhir dari kasus-kasus espionage antar negara. Hal ini saya perhatikan terjadi di Paris, Washington DC, Tokyo, Hongkong, Singapore, dan bahkan

Jakarta.

Tentu tidak seluruhnya demikian, hal tersebut di atas hanya terjadi diantara organisasi yang sudah menjadi counterpart dan memiliki kesepakatan untuk bekerjasama. Tentu masih ada hal-hal yang bersifat spionase dalam kadar yang relatif berbeda-beda.

Bagaimana dengan kegiatan rahasia di dalam negeri? Dahulu salah seorang junior saya yang berwajah sangar tapi baik hati sering mengajarkan pada calon agen untuk mengutamakan keberanian, karena operasi di wilayah sendiri. Apapun persoalannya bisa diatasi karena kita memiliki "hak" untuk melakukan operasi keamanan. Keberanian yang kadangkala melangkah terlalu jauh dari sisi kerahasiaan, akibatnya ada beberapa agen yang sangat baik harus mengakhiri karirnya dari operasi lapangan karena terekspos ke pihak lawan atau ke publik, contohnya agen yang membongkar jaringan Jamaah Islamiyah.

Mengingat pentingnya kegiatan rahasia dengan segala prinsip-prinsipnya, saya ingin menghimbau kepada seluruh jajaran intelijen untuk kembali menerapkan standar baku kerahasiaan, khususnya dalam membentuk calon agen menjadi agen rahasia.

Agak aneh membahas kegiatan rahasia di media yang tidak rahasia, tetapi dengan variasi pembaca yang tidak saya ketahui, mungkin ada pesan yang tertangkap entah oleh siapa.

Teori Konspirasi Intelijen

Sebuah artikel menarik dalam sebuah Blog anak muda progressif patut untuk disimak. Intisari tulisan tersebut adalah tentang teori konspirasi intelijen yang mengambil kasus Pilkada Aceh. Lihat [konflik-pilkada-aceh-dan-teori konspirasi intelijen](#) yang ditulis oleh [Syafii Haq](#). Catatan yang ingin saya berikan atas tulisan tersebut adalah sbb:

1. Tulisan kritis atas kemungkinan intelijen mengembangkan teori konspirasi yang kemudian membentuk sebuah opini ada benarnya. Misalnya ketika membahas bahwa teori konspirasi menjadi masalah besar ketika masuk pada tiga area (Syafii Anwar). Pertama, ketika teori konspirasi mengarah kepada apa yang disebut sebagai *paranoia within reason*. Selalu ada semacam paranoia atau ketakutan yang berlebihan, yang selalu mengikut dalam akal manusia. Kedua, teori konspirasi juga mengembangkan apa yang dalam ilmu komunikasi disebut sebagai *systematically distortion of information*. Informasi yang di didistorsi sedemikian rupa secara sistematis sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan. Tentu kita ingat pepatah, kebohongan yang diulang seribu kali akan menjadi sebuah kebenaran. Ketiga, teori konspirasi juga selalu mengarah kepada *terrorizing of the truth*, karena sulit dibuktikan maka pernyataan yang berbau konspiratif justru menjadi teror bagi kebenaran. Tetapi ada hal-hal yang lebih penting ketimbang ketiga hal tersebut di atas.
2. Ketakutan yang berlebihan bisa dilabelkan kepada rejim-rejim yang mengharamkan keterbukaan (otoriter-militer). Indonesia

yang sekarang lebih terbuka dengan sistem politik demokratis tidak lagi dihantui oleh ketakutan yang berlebihan. Pernyataan Kepala BIN saya kira lebih cocok bila dianggap sebagai peringatan dini yang bertujuan mendorong semua elemen masyarakat Aceh untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa ataupun kegagalan dalam pemilu.

3. Distorsi informasi? dalam dunia ini tidak ada informasi yang murni tanpa distorsi. Apabila intelijen melakukan dengan sengaja sebuah proses distorsi, maka hal itu akan lebih jelas bila kita mengambil contoh kasus perang ideologi komunisme versus liberal kapitalisme di dunia. Dalam kasus-kasus negara kesatuan vs gerakan separatisme, distorsi informasi juga terjadi. Tetapi dalam pilkada Aceh yang terjadi adalah sinergi informasi yang bertujuan meminimalkan potensi-potensi konflik yang bisa timbul dari pelaksanaan pilkada terbesar di Indonesia tersebut. Potensi konflik tidak secara eksklusif ditujukan kepada kelompok GAM, karena GAM telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki hak yang sama dalam pilkada. Melainkan secara general mengarah pada persaingan antara elit lokal yang dikhawatirkan bisa mengarah pada tindakan kerusuhan dari pihak yang kalah dalam pilkada. Karena itulah dikembangkan saling pengertian dan ikrar untuk menghormati hasil pilkada dari seluruh kandidat. Semua tujuannya untuk memperkecil potensi konflik dalam pelaksanaan pilkada.
4. Teror terhadap kebenaran? sungguh aneh bila sebuah peringatan dini dianggap sebagai teror. Peringatan dini bukanlah sebuah

fakta mutlak yang harus diterima, melainkan sebuah pengingat bagi semua pihak.

Tulisan ini bukan pembelaan untuk komentar-komentar pimpinan BIN, hanya sebuah respon yang mudah-mudahan bisa diterima. Lebih jauh lagi seorang pimpinan intelijen tidak sembarangan dalam berkomentar di depan publik. Ada tujuan-tujuan mulia untuk kepentingan yang lebih luas bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kasus Aceh, kepentingan untuk mensukseskan pilkada yang damai jauh lebih penting daripada menyoroti soal GAM, non-GAM serta analisa separatisme lainnya.

Ah....sekarang saya tuliskan bagian benarnya. Disadari ataupun tidak, potensi kekeliruan ke arah tiga area yang menimbulkan teori konspirasi intelijen bisa saja terjadi. Hal ini perlu didukung oleh kebijakan nasional/institusional yang serius dalam mendefinisikan ancaman. Sebagai contoh, komunisme dalam era Orde Baru mendapat julukan bahaya laten, sehingga harus ditumpas hingga akar-akarnya. Lebih luas lagi, pada periode tsb sangat jelas terjadi teori konspirasi intelijen yang memberangus setiap potensi pemikiran tentang ide-ide yang melawan dominasi negara (komunis, agama, demokrasi, dll).

Apabila di era demokrasi ini terjadi lagi penciptaan teori konspirasi intelijen, maka akan sangat mudah bagi masyarakat untuk segera melihatnya. Hal ini disebabkan oleh keterbukaan yang menyediakan segudang informasi untuk segera mengcounter sebuah teori konspirasi intelijen. Sekian

Foreign Counter-Intelligence

Akhirnya saya memutuskan untuk terus menulis dengan idealisme dan niat demi kejayaan dan kemajuan dunia intelijen Indonesia. Terima kasih atas dukungan dan nasehat dari semua rekan-rekan sahabat Blog I-I.

Catatan: Untuk sementara waktu saya belum bisa berkomunikasi via e-mail, mohon maaf dan pengertian dari sahabat Blog I-I.

Pada masa saya masih aktif, Intelijen Indonesia dalam hal ini BAKIN dan BAIS cukup disegani oleh lembaga-lembaga intelijen di dunia. Khususnya kehandalan unit khusus Kontra Intelijen (Istilah kerennya Foreign Counter-Intelligence -- FCI). Unit khusus yang wajib ada di seluruh lembaga intelijen di dunia tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi setiap gerak-gerik intelijen asing di negara kita. Sejumlah kasus besar yang melibatkan lembaga bergengsi seperti MI6, CIA dan KGB pada era perang dingin telah berhasil diungkap oleh unit khusus BAKIN yang seringkali juga bekerjasama dengan BAIS. Dalam tulisan ini saya tidak akan membahas kasus demi kasus yang menjadi prestasi tersendiri tersebut, tetapi saya akan mempertanyakan mengapa di era reformasi ini malahan justru saya menerima begitu banyak e-mail yang mengeluhkan sebuah trend kemunduran.

Beberapa masukkan tentang kemunduran tersebut misalnya semakin kurangnya pelatihan di luar negeri atau minimal bersama counter-part untuk membiasakan deteksi dini pola operasi intel asing. Lebih jauh lagi, pola pelatihan bahasa asing secara praktis yang ditujukan untuk

penguasaan secara maksimal atas satu atau beberapa bahasa asing juga belum ada peningkatan berarti. Hal ini lebih disebabkan kekeliruan manajemen sumber daya manusia, singkatnya ada cukup banyak kasus salah penempatan dan perlunya peningkatan SDM. Faktor yang juga cukup penting adalah lambatnya update teknologi dan variasi teknik operasi yang memanfaatkan teknologi baru.

Pada masa perang dingin, memang peranan CIA dalam melatih unit khusus Kontra Intelijen tidak bisa diabaikan. Unit Khusus Intelijen Indonesia yang bahkan menggunakan simbol yg lebih mirip lambang lembaga intelijen Amerika tersebut, begitu efektif dan efisiennya dalam hampir setiap operasi. Para senior tentunya masih ingat bagaimana majalah Playboy bisa ada di meja kerja kita pada era mesranya hubungan BAKIN dengan CIA. (Bagi para pejuang moral dalam tubuh intelijen, mohon maaf atas fakta ini).

Counter-Intelligence atau Kontra-Intelijen mencakup intelijen domestik (dalam negeri), fungsi pengamanan informasi dalam negeri, kontra-spionase, dengan tujuan melakukan penetrasi terhadap kegiatan rahasia intelijen asing di negara kita. Salah satu tujuan utama operasi Kontra Intelijen adalah mengungkapkan agresi, subversi dan sabotase rahasia. Kegiatan berupa agresi, subversi dan sabotase rahasia tersebut biasanya merupakan rangkaian rumit dari jaring kegiatan intelijen asing yg juga melibatkan "penghianat" dari kalangan bangsa kita sendiri.

Setidaknya ada 4 prinsip utama kegiatan Kontra-Intelijen, yaitu: (Jeffrey Richelson)

1. **Penetrasi** terhadap kegiatan intelijen asing yang bermusuhan di negara kita
2. **Rekrutmen agent dan defector (pembelot)** yang mendukung negara dan bangsa kita
3. **Riset dan pengumpulan data mengenai intelijen asing** atau oposisi (baik yg bermusuhan maupun yg bersahabat).
4. **Penghancuran dan Netralisasi kegiatan intelijen asing** yang bermusuhan.

Dari prinsip-prinsip tersebut di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua kegiatan intelijen asing bisa kita anggap "membahayakan" NKRI. Hanya intelijen asing yg bermusuhan saja yang perlu dinetralisir kegiatannya, sementara kegiatan intelijen asing yang bersahabat bisa memberikan manfaat berupa warning, melalui jalur counter-part. Definisi bermusuhan tersebut bisa ditentukan dari fakta di lapangan maupun atas keputusan pimpinan yang memiliki informasi yang lebih lengkap. Biasanya unit-unit pelaksana operasi hanya memiliki potongan informasi dan tidak bisa menentukan kategori bermusuhan atau bersahabat.

Pekerjaan unit Kontra-Intelijen merupakan kebalikan dari pekerjaan unit Spionase aktif yang beroperasi di luar negeri. Karena sifat pekerjaannya yang bertolak belakang tersebut, maka tidak mengherankan bahwa setiap anggota intelijen yang bertugas ke luar negeri wajib memiliki pengetahuan mengenai Kontra Intelijen. Sebaliknya, anggota Kontra Intelijen juga perlu tahu cara kerja Spionase aktif.

Sejarah akan terus bergulir dan tercatat dalam setiap periode. Ada kalanya catatan itu begitu baik adakalanya catatan itu bagaikan noda. Semua tergantung dari kesungguhan para pelaku sejarah dalam menjalani hidup dan pekerjaannya. Sehubungan dengan pertanyaan dan cibiran terhadap pekerjaan intelijen, ingin saya tegaskan bahwa:

Intelijen hanyalah sebuah pilihan profesi dari sekian banyak profesi lain yang juga memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak bisa dinilai dari salah satu sudut saja, misalnya soal sifat dasar pekerjaan yang diliputi kerahasiaan. Banyak orang menilai pekerjaan ini terlalu kotor karena kepura-puraan, tidak menyenangkan dan bahkan cenderung jahat. Padahal semua itu sudah menjadi bagian alamiah pekerjaan intelijen yang melakukan semua itu demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan seluruh elemen bangsa untuk survive dan juga untuk negara agar tetap eksis di dunia. Bila segenap komunitas intelijen meyakini itu dan sungguh-sungguh profesional, niscaya tidak akan ada perasaan rendah diri ataupun over confident.

Catatan ini khusus buat menyemangati seluruh rekan-rekan yang mengalami tekanan, depresi, ketidaknyamanan dan segala dampak negatif dari sistem kerja, situasi dan kondisi pekerjaan intelijen Indonesia.

Sekian

Latihan Sederhana

Bagaimana seorang intelijen mampu mengendalikan segala macam emosi dalam situasi yang sangat genting sekalipun? Bagaimana seorang intelijen yang mengalami perdebatan bathin antara nurani dan tugas mampu mengambil keputusan yang tepat?

Apakah dua hal di atas bisa tercipta secara tiba-tiba? Berikut ini sebuah latihan sederhana yang biasa dilakukan intel junior yang baru masuk dalam lingkaran pendidikan intelijen.

1. Setiap intel junior membawa 1 pak korek api yang isinya 10 box.
2. Seluruh batang korek api yang ada di dalam box dibuka dan dihamburkan diatas meja secara acak.
3. Di acak-acak lagi hingga tidak beraturan.
4. Kemudian batang korek yang berantakan itu disusun satu persatu dengan prinsip satu arah. Misalnya kepala batang korek disebelah barat semua.
5. Demikian berulang-ulang sampai kurang lebih dua jam. Biasanya kebosanan sudah mulai terlukis di wajah calon intel karena tidak bisa melihat manfaatnya.
6. Setelah berulang-ulang menyusun batang korek dalam satu arah terjadi proses penyalarsan pikiran, dalam satu tujuan target dan memperteguh motivasi.
7. Sambil melakukan penyusunan batang korek instruktur menjelaskan bahwa kekisruhan dalam diri manusia yang merupakan pertentangan bathin (kesadaran/consciousness) dan pertentangan dalam pikiran adalah hal yg wajar. Yang perlu

dilakukan oleh seorang intel adalah mengarahkan kekisruhan itu dalam tujuan ideal yang secara etis bisa diterima oleh prinsip-prinsip individual seorang intel.

8. Contoh paling ekstrim adalah penghilangan nyawa manusia. Secara etika universal hal ini tentu tidak bisa diterima oleh siapapun. Tetapi ketika telah diargumentasikan dengan maksud dan tujuan penghilangan nyawa tersebut untuk apa, maka diharapkan proses penyalarsan lahir-batin seorang intel menjadi semakin kuat.
9. Puncaknya adalah terciptanya determinasi dalam diri seorang intel dan penghilangan motif pribadi dalam suatu operasi pembunuhan misalnya. Hal ini jelas akan mengurangi beban rasa bersalah seseorang yang secara etika universal melakukan salah satu kesalahan atau dosa besar.
10. Banyak ahli psikologi menuduh proses latihan ini sebagai bentuk cuci otak untuk menciptakan mesin pembunuh. Sesungguhnya tidak demikian, karena pembunuhan sangatlah jarang dilakukan oleh intelijen baik di masa perang dunia, perang dingin maupun pasca perang dingin. Hal ini menjadi dasar survival seorang intel yang harus bertugas di wilayah lawan (negara lain), dimana dalam operasi bisa disamakan dengan situasi perang, membunuh atau dibunuh. Lebih tepat bila hal ini terkait erat dengan prinsip keselamatan pribadi dan pengamanan pribadi seorang intel yang sedang bertugas.
11. Pembunuhan aktif dalam bentuk operasi lebih banyak dilakukan oleh tim khusus yang biasanya dikenal dengan istilah Black Cell

Task Force yang sengaja diciptakan untuk mengerjakan pekerjaan kotor pemerintah. Pada umumnya mereka yang tergabung dalam Task Force tersebut sudah pernah membunuh dengan menatap langsung mata korbannya, tanpa ada emosi pribadi. Contoh paling jelas dalam sejarah adalah Tim Pembunuh yang dibentuk oleh PM Israel Golda Meir sebagai balasan atas tragedi pembunuhan atlet Israel di Muenchen, Jerman. Tim tersebut tidak melakukan operasi intelijen melainkan melakukan operasi penghilangan nyawa musuh negara. Latihan mereka tentunya jauh dari sekedar menyusun batang korek api. Satu prinsip yang sangat menarik adalah bahwa setiap pembentukan Tim Khusus dimanapun didunia pasti tidak akan memiliki garis hubungan dengan institusi resmi intelijen sebuah negara. Apabila ada yang kemudian mengaitkan dengan Mossad atau Sinbeth dalam kasus Tim Golda Meir, ini hanya karena ada keinginan dari Mossad/Sinbeth agar institusinya disegani di dunia. Itulah sebabnya Tim yang sejenis ini disebut Black Cell.

12. Latihan menyusun batang korek adalah suatu bentuk disiplin diri yg paling kecil dari ratusan teknik intelijen lainnya untuk menciptakan insan intelijen yang handal dan profesional.

Latihan Sederhana

PENGAMATAN

Melanjutkan serial latihan sederhana, kali ini saya ingin menyampaikan salah satu keterampilan yang sangat penting bagi seorang insan intelijen, yaitu pengamatan.

Seringkali kita tertipu oleh film-film ala James Bond yang menggambarkan keterampilan prima seorang agen rahasia, padahal kenyataan tidak berkata demikian. Bahkan film remake model Jason Bourne mengulangi kekeliruan citra seorang agen super, saya lebih senang versi lama yang diperankan oleh William Hurt. Dimana letak kejanggalannya? dalam kaitan latihan kali ini saya ungkapkan satu kejanggalan saja, yaitu daya ingat super dari seorang agen rahasia, seolah-olah otak bisa merekam seluruh pandangan mata kita. Kenyataannya adalah ingatan manusia pada umumnya tidaklah terlalu bagus, tetapi hal ini bisa dilatih untuk ditingkatkan ke level di atas rata-rata.

Melatih ingatan pengamatan mata kita. Dilakukan oleh dua orang, sebut saja pelatih dan yang berlatih.

1. Gunakan salah satu kamar kerja lengkap yang biasa dipakai sehari-hari sebagai tempat berlatih. Tentunya di dalam kamar tersebut ada banyak barang-barang seperti meja, kursi, lemari file, komputer set, alat tulis, majalah, koran, hiasan dinding, dll.

2. Tentukan berapa lama seorang yang akan berlatih itu melakukan pengamatan di dalam kamar, untuk tahap awal bisa satu jam atau setengah jam, tetapi semuanya tidak boleh ada yang dicatat dalam notes sekecil apapun. Harus mengandalkan daya ingat.
3. Setelah melakukan pengamatan, silahkan keluar dari ruangan dan mulai menuliskan apa-apa saja yang sudah terekam dalam ingatan. Pelatih dalam hal ini berperan mengawasi jalannya waktu dan pengecekan ulang ke dalam kamar.
4. Hasil yang baik adalah bila anda dalam waktu yang relatif singkat mampu mengingat banyak benda di dalam kamar tersebut.
5. Setelah beberapakali berlatih dengan kamar yang sama tentunya sudah semakin baik hasilnya. Lalu masuk pada tahap berikutnya, pelatih menentukan salah satu benda di kamar itu untuk dipindah tempat, digeser atau di hilangkan. Kemudian, yang berlatih masuk ke kamar dan melakukan pengamatan dan segera menyebutkan benda yang mana yang digeser, dipindah atau di hilangkan. Bila yang berlatih mampu dengan cekatan untuk menjawab soal ini, maka dia bisa dinilai memiliki pengamatan yang baik. Hal yang sama bisa dilakukan dengan gambar ilustrasi kamar atau foto.
6. Bila kita punya teman dekat yang memiliki ketertarikan yang sama dalam soal pengamatan, kita bisa berlatih bersama dalam suasana yang menyenangkan karena seperti tebak-tebakan, misalnya ketika kita mengunjungi rumah makan, segera mengetahui ada berapa meja yang tersedia, atau ada berapa

orang yang sedang makan, dan seterusnya dan seterusnya bisa divariasikan sekehendak hati.

7. Meski demikian, dalam dunia intelijen tidak semua benda diperhatikan, tetapi ada hal-hal tertentu yang selalu menarik perhatian, hal ini hanya bisa lahir dari kebiasaan dan terbentuknya insting intelijen yang mampu membaca situasi, sangat mirip dengan keahlian pencari jejak di hutan yang membaca setiap detil bermakna.

Problem Solving ala Intel

Begitu banyak metode atau cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tetapi begitu sedikit skill/kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempraktekkan metode-metode tersebut. Keterjebakan kita dalam sebuah kerangka teori atau cara otak berpikir atas suatu masalah seringkali membuat kita lupa tentang pokok permasalahan yang dihadapi. Akibatnya tentu saja mendorong kita untuk mengambil langkah-langkah yang jauh penyelesaian pokok permasalahannya.

Sebuah cara sederhana adalah dengan mengurutkan secara terstruktur jawaban yang kita temukan atas sebuah persoalan. Pada bagian akhirnya kita mengkonfrontasikan jawaban akhir dengan persoalan awal.

Contoh kasus. Dengan pertanyaan pokok Bagaimana.

Masalah 1. Bagaimana Meningkatkan Kemampuan Otak Kita?

Jawaban 1. Belajar

Masalah 2. Bagaimana belajar yang efektif?

Jawaban 2. Membaca berbagai sumber dan Berdiskusi dengan para ahli

Masalah 3. Bagaimana memilih sumber bacaan? Bagaimana mendapatkan pencerahan dari para ahli?

Jawaban 3. Studi ke perpustakaan. Mendengarkan pendapat para ahli dengan seksama dan menanyakan hanya hal-hal yang benar-benar belum dimengerti.

Bila kita berhenti sejenak, perhatikan apakah jawaban ketiga masih menjawab soal pertama.....mungkin jawabnya masih mungkin juga tidak.

Karena pertanyaan pertama yang terlalu umum seharusnya bisa dipecah lagi, kemampuan otak yang mana?

Misalnya pertanyaan dilanjutkan/diperdalam dengan pertanyaan, sbb:

Masalah 1. Bagaimana meningkatkan kemampuan otak kita? (Keinginan general)

Masalah 2. Kemampuan otak yang mana? (Klasifikasi)

Masalah 3. Ada berapa banyak tipe kemampuan otak? (mencari sebaran horisontal)

Masalah 4. Ada berapa tingkatan kemampuan otak itu? (mencari informasi ttg level vertikal)

Masalah 5. Mengapa meningkatkan kemampuan otak? (mencari alasan dst...dst... pastikan pendalaman pertanyaan itu relevan dengan pertanyaan awal....

Singkat kata, anda akan takjub dengan permainan pertanyaan maupun permainan tanya jawab di otak kita. Contoh di atas tentu terlalu sederhana dan umum dan tidak berdasarkan pada penelitian empiris ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.

Tetapi disadari ataupun tidak, mekanisme cara berpikir manusia yg telah "terotomatisasi" menjadi bagian dari bawah sadar yang tidak lagi disadari, karena kita pada umumnya hanya terpaku pada tujuan-tujuan praktis, taktis ataupun strategis.

Pelajaran sederhana ini saya terima dalam bincang-bincang ringan di sebuah ruangan berlantai marmer coklat di mana miniatur pesawat model U2 dan A12 melayang tergantung pada langit-langit, somewhere in USA.

Riset Intelijen Akademik

Baru-baru ini ada beberapa orang yang mengaku sedang mendalami ilmu intelijen secara akademis menanyakan tentang ciri khas sebuah penelitian intelijen dibandingkan dengan penelitian ilmu sosial yang sudah mapan seperti ekonomi, sosiologi dan politik, dll yang sudah menjadi program di Universitas atau Perguruan Tinggi. Bagaimana dengan landasan teori dan metodologinya?

Sejujurnya saya bingung, karena dunia akademis adalah sebuah dunia dengan disiplin dan metode pembuktian yang berbeda dengan praktek intelijen yang saya pahami. Untungnya saya masih pernah berkenalan dengan dunia akademis meski tidak diembel-embeli PhD ataupun master. Berkat perkenalan dan diskusi saya dengan sejumlah profesor berpengaruh di negeri Paman Sam, saya bisa memahami cara pandang dunia akademis dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat bagaimana memahami sebuah fenomena dan memecahkan persoalan yang ada di dalamnya.

Meskipun intelijen juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat teknologi tinggi dan eksakta khususnya matematika, namun saya melihat bahwa pengaruh ilmu sosial (social sciences) multidisplin adalah lebih dominan. Saya lebih cenderung memasukkan intelijen ke dalam studi tersendiri yang boleh-boleh saja menggunakan berbagai pendekatan dari metologi ilmu sosial lain. Di pusat pendidikan CIA sendiri tidak terlihat adanya upaya memantapkan sebuah teori ataupun paradigma intelijen, yang ada cuma bagaimana cara memahami berpikir secara intelijen.

Salah satu cara berpikir misalnya dengan The Analytic Hierarchy Process (AHP) yang meskipun sudah lama digunakan oleh berbagai studi teknis, manajemen dan organisasi, juga digunakan oleh kalangan intelijen sebagai sebuah cara yang luwes dalam membantu seseorang menyusun prioritas dan mengambil keputusan yang terbaik pada saat aspek kualitatif dan kuantitatif dari sebuah keputusan perlu dipertimbangkan. Meski saya memandang teknik tersebut hanya memadai untuk mereka yang baru lulus SMA kemudian mencoba mengaplikasikannya..., saya kira cukup lumayan sebagai alat bantu analisa. Bahkan pendekatan The Lockwood Analytical Method for Prediction (LAMP) yang pernah saya tampilkan di blog ini beberapa bulan yang lalu hanya bermanfaat untuk mempermudah seseorang dalam memfokuskan pusat analisa dan pertanyaan yang ingin dijawab. Untuk model yang seperti ini bahkan kita bisa belajar dari model-model pendekatan analisa psikologis tentang bagaimana manusia menyikapi sebuah fenomena yang menjadi perhatian studi intelijen.

Singkatnya, riset intelijen akademik bersifat luwes dan tidak terpaku pada bentuk scientific inquiry tertentu yang telah distandarkan dalam studi intelijen. Lebih jauh, penggunaan metodologi ilmu-ilmu yang sudah mapan secara akademis adalah sangat vital bagi unit analis intelijen. Misalnya untuk melakukan analisa intelijen di bidang ekonomi, seorang analis tentu harus paham ekonometrik, ekonomi makro dan mikro, serta teori-teori ekonomi sejak masa Adam Smith hingga yang kontemporer seperti penggunaan game theory dalam menjelaskan konflik dan kerjasama di bidang ekonomi. Demikian juga dengan analisa intelijen di bidang politik, juga diperlukan dasar pemahaman tentang teori-teori

politik dari zaman Aristotles hingga sekarang. Setidaknya ada 5 bidang utama yang bisa menjadi pusat perhatian riset intelijen akademis, yaitu :

1. **Politik**, fokus perhatian pada analisa terhadap pembangunan/perkembangan/dinamika politik dalam rangka meramalkan kecenderungan dan skenario masa depan, menyajikan peringatan adanya perubahan dan mengidentifikasi ancaman dan peluang bagi pembuat kebijakan di sebuah negara. Pengetahuan yang mendalam tentang ilmu politik menjadi wajib dan harus dilengkapi dengan pengetahuan yang luas tentang isu-isu politik internasional. Secara umum bisa dibagi dua, politik domestik dan politik internasional.
2. **Kepemimpinan individu maupun kolektif dari sebuah negara**. Meskipun sangat dekat dengan ilmu politik, ada tambahan aspek psikologi sehingga tercipta pendekatan psikologi politik dalam bidang ini. Lebih jauh juga dilengkapi dengan pendekatan analisa organisasi (struktur, budaya, dan mekanisme). Hasil riset akan mengarah pada pemimpin nasional negara asing dan calon pemimpin potensial di bidang politik, militer, ekonomi, Iptek, sosial-budaya
3. **Ekonomi**. Mencakup perdagangan, keuangan energi, dan berbagai aspek yang mempengaruhi pembangunan nasional serta potensi ancaman bagi kepentingan ekonomi sebuah negara.
4. **Militer**. Mencakup studi terpadu dari intelijen strategis, studi pertahanan, studi perang dan perdamaian, Statistika militer, dll yang ditujukan untuk melakukan analisa tentang potensi ancaman

dan kalkulasi perimbangan kekuatan. Kedalaman pengetahuan strategi militer darat, laut dan udara perlu dilengkapi dengan wawasan yang luas tentang perkembangan/dinamika keamanan global dan regional.

5. **Science & Technology.** Ini agak berbeda namun juga vital bagi studi intelijen, yaitu mereka dengan latar belakang insiyur (sarjana teknik) dan ilmuwan yang mengaplikasikan keahlian mereka untuk menganalisa persoalan kritis seperti perang informasi lewat media internet, perkembangan teknologi baru (nano science, robotika), senjata kimia dan biologi serta ancaman kesehatan nasional dan masalah sumber-sumber energi.

Dari kelima bidang tersebut di atas rekan-rekan yang sedang menjadi tema untuk penelitian intelijen akademis, bisa mempersempit masalah dengan studi kasus.

Kembali ke soal metodologi, saya kira hal ini sangat tergantung dengan tema yang diminati untuk diteliti. Misalnya seseorang yang memutuskan untuk meneliti jaring terorisme di Indonesia dan dampaknya bagi sikap politik umat Muslim, tentunya harus memiliki pemahaman tentang metodologi penelitian sosial yang mencakup bagaimana mengukur sebuah sikap (survey), bagaimana memvalidasi hubungan kausal antara terorisme dengan sikap umat Islam, yang mana kesemua itu merupakan hal yang elementer bagi ilmuwan sosial-politik.

Atau bila ingin menganalisa sikap elit pelaku bisnis di Indonesia terhadap kebijakan ekonomi liberal pemerintahan SBY, tentunya diperlukan pemahaman ekonomi makro yang cukup.

Lalu.....dimana letak studi intelijen-nya, apa bedanya dengan studi politik atau ekonomi dalam dua kasus di atas?

Perbedaannya akan terlihat dalam penulisan hasil penelitian, yaitu setelah menguasai teknik menulis laporan yang komunikatif, singkat dan efektif, hasil penelitian yang lengkap/detail beserta analisisnya, harus bisa diformulasikan dalam sebuah laporan singkat yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain ilmu intelijen akademis mencakup seluruh multibidang studi yang terkait dengan intelijen ditambah pemikiran dan disiplin praktis dunia intelijen.

Mudah-mudahan rekan-rekan yang sedang bergelut dengan studi intelijen bisa mengambil manfaat dari tulisan ini.

Sekian.

Competitive Intelligence (CI)

Salah satu alasan mengapa saya tidak memilih karir di dunia bisnis atau bekerja di perusahaan nasional atau internasional adalah karena saya kurang nyaman dengan sebuah kondisi yang biasa kita kenal dengan istilah kompetisi atau persaingan. Fair competition atau persaingan sehat dalam dunia usaha adalah sebuah syarat penting terselenggaranya sistem pasar bebas yang stabil.

Saya bukan ahli ekonomi, tapi pengalaman pekerjaan yang menyebabkan saya juga pernah bersentuhan dengan dunia ekonomi cukup membantu dalam menuliskan artikel ini. Sebuah artikel yang saya coba untuk bisa melengkapi artikel saya tentang intelijen ekonomi dalam kacamata makro.

Competitive Intelligence bukan sebuah terminologi baru dalam dunia intelijen bisnis. Dalam banyak cerita sering digambarkan bahwa pemanfaatan teknik-teknik intelijen dalam dunia bisnis memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan ataupun langkah strategis sebuah perusahaan. Dalam rangka "survive" atau "penguasaan" pasar atau peningkatan laba, sering pula digambarkan bahwa teknik intelijen yang digunakan adalah "pencurian" informasi dari perusahaan pesaing. Cerita-cerita tentang bagaimana pentingnya operasi intelijen dari sebuah perusahaan yang berupaya membangkrutkan perusahaan saingannya dan kemudian mengakuisinya sebenarnya agak jauh dari kenyataan. Dengan pengecualian "permainan" dalam dunia usaha energi (minyak bumi, gas alam, nuklir), teknologi informasi, bisnis peralatan militer, jasa keamanan,

serta media massa, maka dunia bisnis lainnya cenderung untuk tidak melakukan operasi intelijen berupa operasi rahasia.

Apa yang dilakukan pada umumnya perusahaan-perusahaan besar di dunia adalah proses seleksi, koleksi, interpretasi, dan distribusi informasi terbuka yang bisa diakses publik namun memiliki nilai penting bagi perusahaan. Usaha-usaha tersebut bisa disingkat dengan istilah *Competitive Intelligence* -- CI. (lihat Richard Coombs, *Competitive intelligence handbook*. University Press of America, Bab I). Lebih jauh Richard Coombs memberikan contoh definisi lain bagi CI sbb: kutipan buku ini bisa dilihat sedikit pada combsinc.com.

1. **Intelijen Bisnis** adalah sebuah alternatif terminologi bagi *Competitive Intelligence*. Definisinya adalah kegiatan-kegiatan monitoring lingkungan eksternal sebuah perusahaan untuk mendapatkan informasi yang relevan bagi proses pembuatan kebijakan perusahaan tersebut.
2. Istilah lain CI adalah **Competitor intelligence**, yaitu proses analisa yang mentransformasikan keseluruhan competitor intelligence yang utuh menjadi pengetahuan strategis tentang kompetitor, posisi, performance, kapabilitas, dan niat/tujuan. Pengetahuan strategis tersebut harus relevan, akurat, dan bisa digunakan.
3. **Competitive intelligence** adalah sebuah cara berpikir (way of thinking).

4. CI menggunakan sumber-sumber informasi publik untuk mengetahui lokasi dan membangun informasi tentang persaingan dan pesaing-pesaing yang ada.
5. Competitor intelligence adalah informasi yang sangat spesifik dan tepat waktu tentang sebuah perusahaan.
6. Tujuan dari CI adalah bukan mencuri rahasia perusahaan kompetitor, rahasia pasar kompetitor ataupun properti rahasia lainnya. CI adalah sebuah teknik pengumpulan informasi secara sistematis, secara terbuka (legal) dalam jangkauan informasi yang begitu luas, yang ketika telah terseleksi dan disatupadukan serta dianalisa akan menyediakan sebuah pemahaman yang utuh tentang struktur perusahaan pesaing, budaya perusahaan, kebiasaan, kemampuan/kelebihan dan kelemahannya.

Berangkat dari definisi-definisi tersebut di atas, maka cukup jelas bahwa seorang analis dalam dunia Competitive Intelligence bisa jadi memiliki pengetahuan dan kemampuan yang relatif sama dengan Intelijen Analis (INTAN) dalam dunia intelijen sesungguhnya. Perbedaannya hanya terletak dalam sasaran, bahan keterangan, atau dengan kata lain isinya (content). Sebaliknya seorang INTAN yang telah lama berkecimpung dalam analisa intelijen, akan dengan mudah mengadaptasikan dirinya dalam dunia pekerjaan Competitive Intelligence. Sebenarnya memang demikianlah faktanya di dunia ekonomi liberal. Banyak mantan anggota intelijen dari lembaga bergengsi seperti yang terjun di dunia Competitive Intelligence. Minimal menjadi penasihat atau pengarah unit khusus dalam perusahaan yang biasanya berada di divisi riset dan pengembangan.

Competitive Intelligence adalah alternatif yang sangat menarik bagi kalangan intelijen aktif untuk mengaplikasikan pengetahuan di masa pensiun. Selain bisnis keamanan yang juga sering merekrut mantan-mantan anggota intelijen, maka dunia bisnis intelijen pun tidak ketinggalan.

Dalam prakteknya, tidaklah mudah membangun sebuah unit riset dan pengembangan dalam sebuah perusahaan untuk cepat tanggap dalam merespon kebutuhan perusahaan. Seringkali perusahaan kurang memperhatikan pemanfaatan unit riset dan pengembangan untuk hal-hal yang lebih strategis. Kebanyakan riset dan pengembangan hanya mengarah pada peningkatan mutu produksi, peningkatan kualitas SDM, dan kalkulasi pasar serta keuntungan yang mungkin diperoleh dalam satu periode. Dengan sedikit pengecualian riset dari kalangan marketing, maka kebanyakan riset yang dilakukan perusahaan kurang memperhatikan aspek taktis maupun strategis yang berpotensi membesarkan sebuah perusahaan.

Kita tentunya tidak bisa selalu berasumsi positif bahwa semua pemain ekonomi akan berlaku jujur dan patuh pada persaingan bebas yang sehat. Hal ini bis dibandingkan dengan dunia intelijen pemerintah yang tidak pernah bisa percaya 100% pada negara asing, maka dalam dunia bisnis-pun tidak ada bedanya. Bila dilihat dari sistem kerja maupun tujuannya untuk memberikan pertimbangan yang sangat penting bagi perusahaan, maka nyaris tidak ada bedanya dengan intelijen pemerintah. Perbedaan

yang mendasar adalah bahwa CI harus tetap bekerja sesuai koridor hukum karena resiko yang ditanggung terlalu besar bila melangkah di luar hukum. Meski demikian, sudah menjadi hal wajar bila dalam kenyataan, pekerjaan CI sangat mirip dengan pekerjaan intelijen pemerintah.

Bisnis informasi memang bisnis yang sangat menarik, sehingga tidak mengherankan bila mereka yang terjun dalam dunia ini begitu bervariasi. Mulai dari petugas perpustakaan publik, legal atau corporate dan analis pusat informasi sampai ke manajer personil, spesialis dalam data finansial, mereka yang berkecimpung dalam business-development, dan perencana strategis, sampai ke mantan anggota intelijen, pensiunan intelijen militer, pakar informasi dan kalangan akademisi.

Saya beri contoh misalnya Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) yang pernah dikomando oleh Drs Christianto Wibisono. Model institusi seperti ini cenderung bekerja semacam menjadi agen bagi perusahaan yang membutuhkan jasa mereka. Tentu tingkat kepercayaan terhadap bentuk CI yang cenderung independen ini harus melalui evaluasi Board of Executive sebuah perusahaan. Karena sebuah perusahaan tidak akan pernah bisa tahu sejauh mana level keamanan memanfaatkan institusi yang bespesialisasi semacam ini.

Oleh karena itu, tetap diperlukan unit internal perusahaan yang berspesialisasi dalam CI. Nah unit CI perusahaan inilah yang intensif berinteraksi dengan Pusat Data Bisnis atau dengan lembaga-lembaga data dan riset lainnya seperti Biro Pusat Statistik, Pusat Studi, Marketing Riset, pemantau persaingan, perpustakaan, lembaga survey, ataupun

dengan kalangan akademisi yang memiliki spesialisasi tertentu. Bahkan bila perlu mengembangkan sendiri teknik pengumpulan informasi berdasarkan teknik-teknik intelijen.

Semua akhirnya akan kembali pada kemampuan analisa, karena di era modern ini boleh dibilang data sangat mudah diperoleh dan tersebar luas secara terbuka. Persoalannya terletak pada kemampuan menyeleksi dan menemukan data yang tepat. Hanya analis-analis yang selevel dengan INTAN-lah yang saya yakini mampu memberikan masukan kepada unit operasional untuk memperoleh dan memilih data yang diperlukan. INTAN pulalah yang akhirnya akan mengolah dan mentransformasikan informasi tersebut menjadi produk jadi CI yang diperlukan perusahaan.

Tidak terlalu mudah bukan?

Sayangnya saya tidak tahu bagaimana situasi dunia Competitive Intelligence saat ini di Indonesia.

Membedakan Informasi Terbuka dengan Informasi Rahasia

Sebuah Catatan untuk Komunitas Intelijen dan Aktivis Pembela Kebebasan

Cara berpikir linear dalam sebuah garis lurus dari sebuah kelompok masyarakat adalah hal yang biasa. Hal ini terpola karena setiap anggota kelompok terekspos dalam cara pandang tertentu dalam periode waktu yang cukup lama. Dalam ilmu politik kita mengenal budaya politik, dalam psikologi kita mengenal *mass behavior*, dalam dunia ekonomi kita mengenal motivasi ekonomi. Sesungguhnya apa yang terjadi secara berkelompok tersebut adalah pembentukan cara berpikir dan cara menganalisa seseorang terhadap suatu persoalan menjadi khas dari sudut pandang tertentu. Kata sudut pandang sudah mencerminkan sebuah cara berpikir linear yang seringkali bersifat bersilangan dengan sudut pandang lain.

Hal inilah yang menjadikan perdebatan soal informasi rahasia dan terbuka terasa alot, khususnya bila dikaitkan dengan prinsip kebebasan memperoleh informasi dan prinsip kerahasiaan negara.

Sudut pandang seseorang sangat ditentukan oleh latar belakang, perjalanan hidup dan lamanya terekspos dalam sebuah komunitas. Komunitas intelijen adalah sebuah contoh komunitas yang dicekoki oleh prinsip kerahasiaan, seolah-olah segala sesuatu menjadi rahasia. Hal ini sudah menjadi budaya perusahaan intelijen di seluruh dunia, diterima

begitu saja sebagai sebuah keyakinan yang tidak bisa ditawar. Sebaliknya, komunitas pers dan aktivis paham liberal adalah contoh-contoh komunitas yang sangat menghargai kebebasan mengakses informasi demi tersedianya informasi yang benar dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kekeliruan utama komunitas intelijen dan pengambil kebijakan dalam memandang kerahasiaan sebuah informasi seringkali lebih didasari oleh proses bagaimana memperoleh informasi tersebut. Apa-apa yang diperoleh dari hasil operasi intelijen hampir bisa dipastikan sebagai informasi berklasifikasi rahasia terlepas dari apa isi informasi tersebut. Seringkali informasi yang diperoleh dari sebuah operasi sebenarnya relatif tidaklah terlalu rahasia, sebaliknya apa yang dituliskan oleh seorang wartawan investigasi justru bisa bersifat lebih rahasia. Jadi bagaimana menilai kerahasiaan tersebut?

Selama komunitas intelijen bersikukuh dengan cara berpikir linear yang diselubungi oleh tabir kerahasiaan dan tidak benar-benar menerapkan metode penyusunan tingkat/level kerahasiaan maka segala sesuatu yang ada dalam organisasi intelijen akan menjadi rahasia, padahal sebagian besar saya yakini tidaklah bersifat rahasia. Sebaliknya, bila komunitas pers maupun aktivis pendukung kebebasan informasi hanya melihat dari satu sudut pandang pengungkapan informasi sejelas-jelasnya untuk masyarakat, mereka tidak akan mampu melihat kerawanan dari sebuah informasi yang seharusnya diletakkan dalam kotak rahasia negara.

Sebuah ilustrasi cerita dari keseharian hidup manusia bisa kita jadikan contoh yang sangat baik.

1. Seorang pria menaksir seorang wanita = bukan rahasia
 2. Pria tersebut kemudian berpacaran dengan si wanita = masih bukan rahasia
 3. Mereka semakin panas dalam berpacaran = menjadi rahasia berdua
 4. Si wanita menjadi hamil = menjadi rahasia "besar" bagi mereka berdua
 5. Si wanita menggugurkan janin bayinya = rahasia "sangat besar" bagi mereka berdua ditambah dokter/dukun yang menggugurkan janin tersebut
- Sebagian besar orang tahu kalo dua sejoli itu berpacaran tetapi tidak banyak yang tahu sejauh mana mereka berpacaran. Bila anda tahu sampai detil bagaimana mereka berpacaran, tentunya anda juga ikut menanggung rahasia tersebut. Selanjutnya terserah kepada anda bagaimana menilai informasi rahasia yang anda ketahui itu, bisa anda laporkan kepada orang tua si wanita, bisa anda biarkan (rahasiakan), atau bahkan bisa anda sebarluaskan ke masyarakat karena masyarakat sangat "senang" mendengarkan cerita yang bernuansa rahasia itu.
 - Tahukah apa dampaknya bila rahasia itu disebarluaskan, dalam komunitas yang memegang tinggi norma dan agama, si wanita sebebapapun akan menjadi stress berat atau semi gila dan dengan resiko tertinggi bunuh diri. Si pria bila tidak

bertanggung jawab akan kabur melarikan diri, apalagi kalo percintaan mereka tidak menghujam di dalam hati.

- Tetapi masyarakat berhak tahu kemesuman mereka yang melanggar norma dan mereka patut "dihukum" agar tidak ada lagi yang berani melakukan hal yang sama. Lalu bagaimana dengan kebebasan individu yang ingin mereka tempuh, barangkali mereka tidak lagi terikat oleh norma dan agama dan ingin melanjutkan hubungan ke pernikahan.
- Pada satu pandang ekstrim pasangan pria dan wanita tersebut akan menyatakan persoalan mereka adalah rahasia mereka, sementara bagi orang-orang diluar mereka ada yang merasa patut ikut merahasiakan ada juga yang merasa rahasia itu tidak sepatutnya disembunyikan. Selama cara berpikir kita hanya berpijak dari satu sudut pandang dan bersifat linear, maka kita tidak akan pernah paham bagaimana dampak yang akan terjadi dan bagaimana respon yang akan timbul dari pihak yang lain.

Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus imajinari tingkat departemental:

1. Terjadi kasus korupsi suap dikalangan Hakim : bukan rahasia
2. Suap tersebut ternyata mengarah pada tokoh yang dihormati : bukan rahasia
3. Tokoh tersebut juga menjabat dalam posisi yang tinggi : bukan rahasia
4. Penyidik mengalami kesulitan dalam mencari bukti dari sang tokoh : bukan rahasia

5. Tokoh tersebut mendapat dukungan organisasi departemental :
bukan rahasia
6. Tokoh tersebut mengambil langkah antisipatif ke eksekutif :
masih semi rahasia
7. Terjadi pertemuan antara penyidik, sang tokoh dan eksekutif :
isi pertemuan mulai bersifat rahasia
8. Ada upaya kompromi demi menjaga martabat yudikatif yang
sudah rusak dimata umum : rahasia
9. Telah terjadi tahu sama tahu kemana sesungguhnya aliran dana
suap tersebut : sangat rahasia

Kunci persoalan jelas terletak pada aliran dana suap yang saya yakini tidak akan digunakan secara individual sang Tokoh yang semakin rusak namanya oleh berita media massa. Mengapa hal ini kemudian menjadi sangat rahasia....tanyakan pada intelijen Indonesia bidang politik dan ekonomi.

Bila kita analogikan dengan kasus pria dan wanita dan cara pandang non-linear maka kita bisa mengerti mengapa ada semacam perdebatan dalam menentukan apakah sesuatu itu rahasia atau tidak?

Sekian, semoga bermanfaat

Berpikir seperti seorang intel analis - INTAN

Seorang Intelijen Analis (selanjutnya saya sebut INTAN) memiliki karakter khusus dalam cara berpikirnya. Karakter tersebut terbentuk melalui proses panjang pelatihan dan pengalaman kerja. Salah satu model atau karakter seorang INTAN adalah berspesialisasi dalam "misi khusus". Di Amerika Serikat analis seperti ini biasanya dibentuk melalui pendidikan khusus di the Kees, Helms, atau Kent schools of thought (Ford 1993). Di Indonesia bisa dibandingkan dengan Pusintelstrat TNI yang pada masa Orde Baru telah melahirkan banyak perwira intel yang berkarakter khusus. Atau bila kita menilik lebih jauh lagi dalam dunia intelijen Indonesia, maka kita akan mengenal salah seorang Legenda Intelijen Indonesia yaitu Zulkifli Lubis yang memiliki karakter Intelijen Jepang karena dia alumnus Sekolah Intelijen Nakano di Tangerang. Lubis sempat mendapat pendidikan di Pusat Pendidikan Intelijen Regional Jepang yang berada di Singapura. Lubis mendapat pendidikan bukan hanya teori, tetapi juga kegiatan praktis. Guru di sekolah itu adalah para petugas intelijen Jepang yang berhasil menundukkan Perancis di wilayah Indochina. Lihat [intelijen jepang sebelum menginvasi Belanda](#).

Kemiripan karakter INTAN yang merupakan alumni dari sekolah khusus intelijen adalah bahwa berpikir secara analitikal bagaikan sebuah skill/keahlian seperti keahlian seorang ahli bela diri yang menjadi instingtif atau seperti keahlian pembalap Mobil Formula One. Begitu cepatnya dalam merespon setiap keadaan yang memerlukan analisa intelijen. Artinya bisa diajarkan, bisa dipelajari dan bisa ditingkatkan

melalui latihan terus-menerus. Tentu saja tidak berarti setiap orang bisa lolos kualifikasi sebagai pembalap level Formula One. Ada kalanya seorang pembalap hanya mampu masuk dalam level Indy Car, karena skillnya tidak mengalami peningkatan yang nyata. Untuk mencapai cara berpikir analitis seperti seorang INTAN yang handal, biasanya seseorang calon analis belajar sambil bekerja dan belajar dari kesalahan berupa kegagalan dan kejutan. Kekeliruan kadang kala berakibat fatal, misalnya berupa kematian manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang analis untuk tetap bekerja sambil memperbaiki cara berpikirnya serta tidak membiarkan kebiasaan lama yang buruk dalam berpikir dipertahankan. Penyebab utama kegagalan berpikir cermat dalam analisa intelijen adalah Cognitive Bias, sebuah terminologi teknis bagi *predictable mental errors* (istilah ini bukan berarti sebuah kegilaan, tetapi lebih mengarah pada cara berpikir yang tidak tepat yang bisa diperkirakan akan menghasilkan produk yang rendah tingkat akurasi). Hal ini disebabkan oleh proses strategi penyederhanaan informasi. Bila cognitive bias tidak dapat dihindarkan, maka kegagalan intelijen juga tidak terelakan.

INTAN harus mengetahui dirinya sendiri. Mereka harus memahami kacamata/cara pandang yang mereka gunakan pada saat melakukan proses penyaringan, klasifikasi, analisa maupun mencari fokus informasi. Kacamata tersebut dalam pendidikan intelijen dikenal juga dengan istilah - mental models, mind-sets, atau *analytical assumptions*. Tidaklah pernah dibenarkan untuk mencari alasan dengan menyatakan : "Andai saja kita punya informasi lebih banyak." INTAN biasanya telah memiliki banyak

informasi di mejanya dan mereka belum tentu bisa mencerna semua informasi yang tersedia. Alasan seperti perlu informasi yang lebih berguna, perlu lebih banyak intelijen pengumpul informasi yang dipercaya, perlu informasi dari orang dalam, dll tidaklah bermanfaat. Lebih banyak informasi tidak akan banyak menolong dalam proses pemilahan data yang saling bertentangan dan bersifat ambivalen.

Untuk memahami sebuah negara, misalnya, anda perlu lebih dari sekedar informasi tentang negara tersebut. Anda perlu memiliki sebuah perspektif dari diri anda sendiri, sebuah perspektif yang akan menolong anda ketika anda harus memproduksi sebuah analisa tepat waktu pada saat persitiwa demi peristiwa terus terjadi.

Kelemahan teknik memperkuat perspektif anda dalam proses analisa adalah anda harus menjadi seorang spesialis. Sering kali seorang spesialis tenggelam dalam perspektifnya dan ketinggalan kereta ketika perubahan dunia terjadi secara tidak terduga. Dalam kasus ini seorang generalist mungkin akan lebih tajam hasil analisisnya, karena akan lebih cepat melihat trend dari kacamata yang lebih terbuka, tanpa didorong oleh perspektifnya.

INTAN cenderung untuk memperlakukan perkiraan mereka lebih penting dari pada apa yang mereka ingin lihat. Mereka tidak dipengaruhi oleh harapan dalam berpikir; **mereka berpikir secara reflek**. Mereka telah menganalisa latar belakang mereka sendiri, bukan dalam rangka mencari jati diri jiwanya dari apa yang mereka inginkan, tetapi dalam rangka

memahami bagaimana pengalaman masa lalu, pendidikan dan pelatihan, norma dan budaya organisasi telah mempengaruhi mereka untuk memberikan perhatian khusus hanya pada beberapa hal dan bukan untuk hal yang lainnya.

INTAN tidak mengandalkan pikiran terbuka (open mind). Prekonsepsi adalah tidak bisa dihindari. INTAN memperoleh obyektivitas dengan membuat asumsi-asumsi dasar dan pertimbangan seterbuka mungkin. Validitas diperoleh dengan proses analisa dua sisi yaitu analisa pribadi (berdasarkan asumsi yang dibuat) dan membuat hasil analisa kita bisa didebat oleh INTAN lain (keterbukaan dalam pertimbangan).

Sebuah perspektif yang segar dan baru kadang kala diperlukan. Seringkali seorang INTAN ditugaskan untuk mengerjakan analisa atas sebuah masalah atau sebuah negara yang telah dianalisa oleh INTAN berpengalaman yang telah menganalisanya selama 10 tahun, dengan tujuan untuk melahirkan wawasan atau pemahaman baru.

INTAN pada umumnya mencoba beralih maju mundur dari satu perspektif ke perspektif yang lain. Mereka mencoba melihat dan mengartikan sesuatu masalah dari interpretasi pihak musuh (oposisi) maupun dari pihak user (pimpinan, negara atau Presiden kita).

Catatan: Apa yang saya tuliskan di atas hanya sebuah bagian yang sangat kecil dari INTAN.

Sekian

Core Intelijen Unit

Sebuah komentar dari seorang observer atas tulisan "AM Hendropriyono versus TPF Munir" segera menggugah saya untuk memberikan tanggapan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat.

Core Intelijen Unit adalah sebuah ide yang brilian bila sistem hukum yang ada bisa memberikan dukungan yang signifikan. Dengan independensi dan otorisasi yang luas, unit ini akan mampu bergerak leluasa dalam melaksanakan fungsinya. Dalam jangka pendek, jelas sangat membantu kinerja dunia intelijen secara umum.

Persoalan utama yang dihadapi dalam pembentukan Core Intelijen Unit begitu banyaknya, sehingga saya harus susun dalam bentuk pointers:

1. Prinsip-prinsip demokrasi menuntut adanya transparansi dalam setiap pembentukan unit kerja yang bertujuan membantu pemerintah menjalankan tugas sebagai pelaksana garis besar haluan negara, termasuk didalamnya pembentukan sebuah unit intelijen.
2. Ketidadaan landasan hukum intelijen akan memperumit keadaan. Belum lagi benturan dengan sistem administrasi negara yang telah mengatur keberadaan unit-unit intelijen dalam beberapa level. Misalnya di level nasional ada BIN sedangkan di level departemental ada intelijen imigrasi, intelijen kejaksaan, intelijen bea-cukai dll. Pada tataran horisontal sesama penegak hukum ada intelijen militer dan ada pula intelijen kepolisian.

3. Soal siapa yang akan duduk dalam Core Unit Intelijen yang baru akan menjadi polemik baru. Belum lagi kemungkinan politisasi masalah ini akan menjadi bumerang bagi pemerintah, karena pihak yang tidak senang tentu akan segera menyampaikan tuduhan adanya upaya penguatan posisi eksekutif melalui tangan intelijen. Ingat.... kata inteljen sangat sensitif dalam wacana politik nasional Indonesia.
4. Ada masalah klasik dalam hal kesediaan unit-unit intelijen yang sudah ada untuk mendukung sepenuhnya Core Intelijen Unit. Dari fakta lemahnya koordinasi intelijen yang seharusnya berada ditangan BIN sesuai hukum, kita bisa melihat arogansi sektoral dari tiap-tiap unit intelijen yang cenderung bersaing untuk mencapai prestasi kerja.
5. Bagaimana pula reaksi dari DPR yang pastinya akan banyak diwarnai kepentingan politik dalam memberikan dukungan atau sebaliknya.
6. Reaksi kalangan LSM jelas akan curiga dan bisa diramalkan mereka segera melancarkan serangan kritikan pedas pada pemerintah.
7. Sesungguhnya Indonesia memerlukan penataan yang serius dalam masalah ini.

Benar apa kata saudara observer bahwa kalangan intelijen tidak banyak yang membaca ulasan saya, mungkin mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan rutin, mungkin juga mereka tidak peduli lagi karena apatisisme terhadap dukungan riil pemerintah dan DPR dalam bentuk kepastian peraturan hukum yang menjadi payung kegiatan intelijen.

Omega Operation (Lanjutan Core Intelijen Unit)

Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas dukungan moril dari seorang saudara Observer, setidaknya demikianlah yang saya rasakan.

Setelah masuknya beberapa e-mail yang bernada "keras" dan salah satunya bisa saya kenali, sebenarnya saya agak ragu untuk melanjutkan proses tulis-menulis dunia maya ini. Tetapi saya pikir harus ada yang melakukannya. Seperti para pembaca bisa lihat dalam blog ini, saya berusaha meng-upload sesuai dengan periode masa, sedikit demi sedikit kumpulan tulisan yang merupakan diary yg tercerai berai dalam kumpulan dokumen pribadi sejak era 1980-an dan saya kompilasikan pada tahun 1990-an ditambah curhat kontemporer era 2000-an. Tentu kedalaman analisa juga "tidak mungkin" dibebaskan karena akan segera dikenali oleh elit petinggi intelijen yang pernah aktif atau masih aktif.

Melanjutkan soal Core Intelijen Unit, saya setuju bahwa ada landasan idealis nan mulia yaitu Integritas Nasional. Landasan ini masih relevan untuk tetap dijadikan acuan dalam pembentukan sebuah Core Intelijen Unit. Hanya saja saya meragukan keberlangsungan unit tersebut karena akan berganti-ganti dari satu presiden ke presiden berikutnya, yang lebih penting lagi adalah unit ini bekerja cenderung untuk kepentingan "pribadi" presiden dan bukan untuk keselamatan bangsa dan negara.

Sebagai contoh "Omega" dan yang sejenisnya.

Saya akui bahwa kinerja dan gebrakan Omega (saya baru tahu kalo OTB ini namanya Omega) bisa dinilai di atas rata-rata. Kredibilitas pimpinan unit yang berada disamping presiden dan "orang-orang pilihan" dengan biaya operasi unit kerja diatas biaya operasi unit kerja yang formal adalah faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Omega. Itulah sebabnya mereka tidak perlu cari "duit tambahan".

Meski demikian, hal ini bukan berarti intelijen formal, khususnya orang-orang (agen) BIN dan BAIS tidak mengerti. Mereka hanya tutup mata dan membiarkan prosedur operasi di luar struktur itu berjalan. Beberapa senior intelijen saya dengar "agak" gusar dan kecewa dengan pilihan presiden mempercayai model operasi ini.

Menurut saya bentuk Core Intelijen Unit yang paling berhasil dalam sejarah intelijen Indonesia adalah model Opsus-nya Almarhum Ali Murtopo. Kata-kata beliau yang tidak akan terlupakan adalah *our budget limit is the sky*, bisa anda bayangkan pengaruhnya waktu itu. Peringkat Core Intelijen Unit berikutnya mungkin Death Squad-nya Leonardus Benyamin Moerdani. Dengan sepengetahuan pimpinan intelijen dan presiden, kedua model Core Intelijen Unit tersebut mencatat prestasi luar biasa dalam menjaga integritas nasional, dengan kata lain mengamankan kepemimpinan mantan presiden Suharto. Hebatnya sampai sekarang tak ada satupun kasus Opsus maupun Death Squad yang bisa atau mungkin untuk diungkapkan di depan hukum.

Ketika saudara observer menyebutkan soal *deep operation*, *deep operator* dan *prinsip intelligence* maupun soal *the first and the last line*

of defence, saya jadi ingat kisah mantan-mantan agen BPI (Badan Pusat Intelijen) yang melakukan semua itu diluar struktur operasi BPI, khususnya mereka yang berperan sebagai deep operators, namun kemudian harus menanggung penderitaan akibat ikut dituduh komunis, entah baru berapa orang yang direhabilitasi dan diberikan penghargaan yang layak.

Secara pribadi saya kurang setuju bila keberadaan Core Intelijen Unit hanya akan mengulangi sejarah kelam sekaligus gemilang intelijen Indonesia. Pada akhirnya mereka yang berada dalam Core Intelijen Unit adalah orang-orang intel pilihan atau orang-orang yang mengerti dan punya kemampuan intel yang memadai. Hampir tidak ada bedanya dengan keberadaan orang-orang intel dalam lembaga intelijen formal. Malahan akan menimbulkan kecemburuan dan friksi dalam operasi, saingan dan hebat-hebatan.

Untuk jangka pendek, keberadaan Core Intelijen Unit mungkin cukup efektif. Namun untuk jangka panjang akan lebih baik bila revitalisasi organisasi intelijen melalui penataan hukum dan profesionalisme organisasi menjadi agenda utama.

Tentang Laporan Intelijen

Sesekali rasanya perlu kita melepas pandangan ke dunia global, khususnya bagaimana dinamika dunia intelijen bergeliat dalam pro dan kontra. Perbedaan hasil intelijen, perbedaan analisa, serta perbedaan saran tindak.

Baru-baru ini, US National Intelligence Estimate (NIE) menyatakan bahwa Iran tidak memiliki program senjata nuklir. Dalam sebuah laporan yang direlease pada 3 Desember 2007, 16 US intelligence agencies mengkonfirmasi bahwa Iran tidak memiliki program senjata nuklir. Lalu bagaimana dengan sanksi yang sudah dijatuhkan kepada Iran, bagaimana dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 1737/1747?

Terjadinya perbedaan pandangan antara intelijen AS dan Israel dalam soal nuklir Iran lebih bersifat taktis jangka pendek. Sebuah persiapan komuniti intelijen AS untuk menyambut pemimpin baru AS dalam pemilu mendatang. It has nothing to do with the truth out there. Di samping itu, masih ada harapan bahwa sikap Iran tidak akan permanent karena politik domestik Iran menunjukkan bahwa Presiden Ahmadinejad mengalami banyak kritikan dari tokoh-tokoh moderat Iran, seperti mantan presiden Rafsanjani.

Bahkan Iran juga bermaksud memaksakan keberuntungannya dari estimasi intelijen negara-negara barat. Belum lama ini Iran bahkan menanyakan analisa intelijen Inggris. Sebuah upaya yang agak terlampau jauh.

Pertanyaannya seharusnya bukan pada benar atau tidaknya perkiraan intelijen AS atas nuklir Iran, tetapi pada mengapa bisa terjadi demikian. Pertanyaan yang sama yang juga seharusnya ditujukan saat intelijen AS menyatakan Irak memiliki senjata nuklir.

Nuklir adalah persoalan khusus dengan pendekatan analisa yang khusus pula. Dari sudut pandang negara pemilik nuklir, estimasi harus dilakukan sebelum sebuah negara memiliki senjata nuklir. Ada titik kritis yang didukung oleh ketersediaan material nuklir, kemampuan dana dan sumber daya manusia, serta penguasaan teknologi, dan tentu saja kehendak untuk memiliki senjata nuklir. Pada saat sebuah negara sudah berhasil memiliki senjata nuklir maka, negara pemilik hanya bisa menyatakan selamat bergabung. Karena prinsip sama-sama hancur yang begitu kuat mengikat para pemilik nuklir.

Kembali ke soal laporan intelijen, ada hal-hal yang sangat prinsip dalam laporan intelien, yaitu fakta-fakta, analisa, dan perkiraan serta saran tindak. Tentu saja laporan intelijen yang serius jauh sekali kualitasnya di atas tulisan-tulisan Blog I-I yang hanya serempet sana-sini secara minimal. Sekedar berbagi cerita, sebuah laporan intelijen komprehensif setebal 50an halaman biasanya hanya disajikan dalam dua lembar memo kepada Presiden. Rekan-rekan yang bekerja di institusi intelijen jangan membandingkan dengan fakta yang rekan-rekan kerjakan saat ini, saya bernai nyatakan bahwa harus ada upaya reengineering ke dalam organisasi untuk mencapai idealnya kinerja sebuah organisasi intelijen.

Dalam kasus laporan intelijen AS tentang nuklir Iran, tampak ada kejanggalan di sana sini. Sepertinya sudah ada deal khusus yang sebenarnya membuat Israel geram, karena satu-satunya ancaman bagi Israel di Timur Tengah saat ini adalah Iran. Ingat apapun bisa dibuat untuk kepentingan nasional, jadi janganlah pernah berharap untuk menemukan kebenaran sejati dalam dunia intelijen. Semuanya mengalir dalam darah tipu daya demi suatu tujuan yang meskipun mulia jalannya berliku-liku.

Dengan sedikit rileks melihat persoalan terbuka dalam kasus nuklir Iran, saya berharap rekan-rekan juga bisa merasakan maksud dan tujuan Blog I-I dibuat.

Blog I-I bukanlah sebuah laporan intelijen yang memerlukan sejumlah level otentikasi. Jadi rekan-rekanlah yang melakukan otentikasi bila rekan-rekan setuju dan satu pandangan, dan sebaliknya menolaknya bila tidak setuju.

Sekian

Intelijen Gaya Baru

Seseorang anonymous dengan nama sandi -HatiSejati- menyampaikan sebuah link yang sangat baik yaitu Blog Sosiologi, khususnya mengenai salah satu artikelnya yang buat saya sebenarnya berita lama yaitu tentang intelijen gaya baru.

Ketika cikal-bakal internet ARPAnet yang merupakan kakek buyut internet modern lahir pada sekitar tahun 1960-an , konsep untuk memperluas teknik input informasi dari publik yang akan memperkaya analisa intelijen belumlah terpikirkan karena kakeknya internet ini memang hanya eksis secara tertutup di kalangan militer dan intelijen Amerika . Tentu saja pemikiran tersebut sangat minor di dalam dinamika perang dingin dan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Akhirnya ARPnet hanya dipergunakan sebagai NCP (Network Control Protocol) dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi antara instalasi militer dan khususnya yang terkait dengan instalasi bom nuklir.

Meski demikian Charles M. Herzfeld sudah menganjurkan untuk memperluas jaringan minimal secara nasional yang ditujukan untuk interaksi para peneliti dan penyelidik yang terpisah secara geografi. Agar mereka bisa berkomunikasi dan mempercepat komunikasi serta peningkatan ilmu pengetahuan melalui pertukaran data antar lembaga penelitian seperti universitas. Jadi jauh lebih terbuka dan progresif dibandingkan kalangan militer yang penuh kerahasiaan. Pertukaran data pertama terjadi antara UCLA and Stanford Research Institute.

Desakan dari kalangan akademisi dan non military figures inilah yang kemudian memisahkan sistem internet militer (MILnet) dari internet yang kita kenal sekarang, hal ini terjadi pada tahun 1983. Segera setelah terjadi proses pengamanan yang intensif dan MILnet berkembang lebih ke tingkat/level/coding akses yang rumit, internet publik berkembang mengarah pada simplifikasi penggunaan. Pada tahun 1986, sebuah LAN yang merupakan turunan dari sebuah sistem komputing jaringan bernama NSFnet (National Science Foundation Network) lahir. Pada tahun 1990 APRA mati dan sistem NFS menjadi inti dari internet modern yang kita gunakan sekarang.

Pada periode awal 1990-an, badan-badan intelijen Amerika sudah mulai memikirkan apa yang menjadi kebijakan Negroponte sekarang, karena intelijen dan militer institusi yang paling awal mengenal dan mengetahui kemampuan sistem komputer jaringan. Pada saat itu juga proyek propaganda sudah mulai berbarengan dengan proyek B-BETA yang bertujuan memperkuat basis-basis bisnis yang lebih luas bagi perusahaan software asal Amerika yang berspesialisasi dalam OS, Virus dan Anti Virus dan piranti lunak lainnya.

Saya yakin betul bila Intelijen telah lama memanfaatkan pengumpulan informasi melalui jaring internet, namun melalui mekanisme yang lebih mirip dengan sadap telepon atau sekarang kita kenal dengan spyware. Spyware modern sangat efektif dalam mencuri kode sandi pengguna internet khususnya yang berkaitan dengan net banking system. Bahkan P to P yang kita kenal belakangan juga merupakan mekanisme untuk

mengambil data tanpa disadari oleh seseorang yang terkoneksi. Tentunya program yang mereka miliki berbeda dengan yang kita gunakan secara bebas melalui download gratisan.

Ketika saya belajar intelijen di Amerika untuk pertama kalinya pada tahun 1980-an, mereka telah memamerkan sistem dokumentasi dan arus informasi yang terkoneksi dengan baik, tentu saja saya tidak mengerti sepenuhnya pada saat itu, hanya manggut-manggut seperti orang tolol. Ketika saya kembali mengunjungi AS lagi pada tahun 1990-an, saya menyaksikan betapa cikal-bakal internet modern sangat menjanjikan keuntungan bisnis dan juga keuntungan tidak terbatas bagi intelijen.

Saya ragukan bila CIA dan lembaga intelijen lain di AS mengalami kesulitan dalam memahami dokumen dalam bahasa apapun, seperti disinyalir dalam berita ini yang seolah-olah intelijen AS kekurangan tenaga dalam menterjemahkan bahasa asing khususnya Arab. Itu hanya pengalihan untuk mempertegas kehadiran nyata intelijen dalam dunia internet. Satu-satunya negara di dunia yang sangat waspada dengan kemampuan Amerika di dunia internet adalah Republik Rakyat China yang bertahun-tahun memberlakukan pengawasan dan kontrol ketat terhadap akses internet di negaranya. Hal ini terjadi karena RRC sudah tahu melalui jaring human intelligence (humint) yang berada di AS tentang sejauh mana intelijen Amerika bisa melakukan intersep ke dalam jaringan. Jadi apa yang disampaikan Negroponte hanya menyatakan apa yang sudah terjadi selama belasan tahun belakangan ini.

Bagaimana dengan Indonesia?

INTELIJEN INDONESIA

Kegiatan Intelijen di Indonesia

Kegiatan intelijen selalu berdasarkan pada kepentingan nasional sebuah entitas politik (negara). Kegiatan intelijen yang bertujuan mengetahui keadaan pihak lawan disebut juga spionase (espionage). Sedangkan kegiatan intelijen untuk mencegah lawan mengetahui keadaan negara kita disebut counterintelligence.

Kegiatan intelijen yang dimanfaatkan kekuatan politik domestik untuk melanggengkan kekuasaan biasanya menjadi suatu bentuk polisi rahasia dan bukan lagi melaksanakan fungsi dasar intelijen. Karena lawan disini sudah dikorupsi menjadi musuh politik dalam negeri.

Salah satu unsur pembusukan organisasi intelijen di Indonesia adalah perubahan fungsi intelijen yang ideal menjadi alat politik presiden. Hal ini dimungkinkan oleh doktrin single client kepada presiden dan hilangnya fungsi kontrol dari parlemen pada kepemimpinan mantan presiden Suharto.

Meski reformasi sudah berjalan doktrin single client tersebut masih terlalu kuat mempengaruhi kinerja intelijen nasional. Akibatnya operasi intelijen Indonesia masih dipengaruhi oleh kepentingan politik presiden yang tidak menjamin terciptanya obyektifitas analisis dan profesionalisme kerja.

Seharusnya doktrin single client tersebut dibatasi dengan UU Intelijen yang memperjelas fungsi intelijen dan posisi badan-badan intelijen dalam sistem tata negara RI. Artinya, meskipun intelijen tetap menjunjung tinggi loyalitas kepada presiden (demi akurasi dan kecepatan reaksi eksekutif negara), namun tidak lagi bisa dikorupsi untuk kepentingan presiden dan kelompoknya semata.

Dengan demikian, anggota dan prajurit intelijen bisa mempertanggungjawabkan setiap produk analisa berdasarkan hasil operasi intelijen ke hadapan rakyat, bangsa dan tentunya juga nilai-nilai moral dan etika.

Posted by Senopati Wirang /Wednesday, November 27, 1996

Krisis Intelijen

Awal tahun 1997 bukan hanya sudah dibayangi persoalan-persoalan ekonomi tahun 1996, melainkan juga krisis percaya diri kalangan intelijen. Setelah gagal meyakinkan mantan Presiden Suharto untuk mundur dengan "mulus" gara-gara ulah Golkar dan keluarga Cendana, analis intelijen dari yang terendah sampai level menengah harus menelan pil pahit teguran keras pimpinan intelijen dari berbagai angkatan. Tentu saja banyak juga analis intelijen yang telah membusuk akibat represi dan sifat tercela cari muka kepada pimpinan. Ada juga analis intelijen yang memang takut dengan situasi yang serba menekan.

Akibatnya.....obyektifitas analisa intelijen terberangus oleh kekuatan politik elit yang walaupun secara nyata di massa akar rumput sudah goyah.

Posted by Senopati Wirang /Wednesday, February 19, 1997

Akuntabilitas Intelijen

Bagaimana mengukur akuntabilitas intelijen dan kepada siapa intelijen harus akuntabel?

Dua pertanyaan tersebut menjadi sangat penting karena berkaitan dengan masalah kepercayaan seluruh komponen bangsa terhadap kinerja intelijen. Reformasi nasional Indonesia yang ditandai oleh demokratisasi, rasionalisasi, serta berbagai perbaikan disegala bidang tentunya juga menuntut dunia intelijen untuk berbenah diri.

Akuntabilitas kerja seorang wakil rakyat di DPR akan dengan mudah dirunut ke dalam proses pemilihan umum dan pertanggungjawaban dirinya kepada konstituen yang telah memilihnya. Akuntabilitas seorang presiden Indonesia sejak pemilu langsung semakin jelas dan mudah dipahami. Bila seorang presiden tidak lagi dikehendaki rakyat akan dengan mudah diganti melalui mekanisme pemilu.

Lalu bagaimana dengan intelijen, khususnya mereka para intel yang tidak melalui proses pemilu, tidak bisa diawasi publik dan tidak pula memiliki kewajiban untuk membocorkan rahasia negara kepada publik?

Sesungguhnya jawabannya sangat sederhana dan melekat pada diri seorang intel, yaitu NORMA PROFESIONAL INTELIJEN. Sebagaimana juga seorang dokter dengan etika kedokterannya, seorang intel juga terikat dengan norma profesional intelijen. Keterikatan seorang intel kepada norma profesinya tidak dapat dilecehkan oleh kekuatan-kekuatan politik.

Intelijen memiliki dunianya sendiri dan tanggungjawabnya sendiri, bukan hanya kepada pemerintah dan rakyat yang mana intelijen hanyalah abdi

negara dan bangsa, melainkan juga kepada hati nuraninya dan Tuhannya. Mimpi buruk seorang intel yang harus menanggung kesalahan, dosa, atau kekeliruan sampai kematian menjemputnya adalah suatu hal yang tidak pernah terbayangkan oleh profesi-profesi lainnya.

Pekerjaan "kotor" yang seringkali dilekatkan dalam profesi intelijen juga harus ditanggung dalam kekosongan kepentingan pribadi. Korupsi terbesar seorang intel bukan pada nafsu duniawi kepada uang melainkan korupsi kepada kejujuran hatinya yang harus digerogeti oleh kepura-puraan demi negara dan bangsa.

Lalu mengapa seseorang mau menanggung hidup yang tidak enak tersebut, tentu jawabnya ada di lubuk hati masing-masing. Tentu tidak banyak intel yang mematuhi dirinya dengan norma profesi intelijen. Terlalu banyak mulut-mulut bocor, terlalu banyak penghianat di dalam tubuh organisasi intelijen, terlalu banyak yang bermental busuk, terlalu banyak yang tumpul otaknya, terlalu banyak yang buruk teknik operasinya, dan akhirnya pembusukkan organisasi terjadi secara pasti.

Posted by Senopati Wirang /**Saturday, May 21, 2005**

Duka Cita Para Intel

Kematian Munir pada 7 September 2004 tidak hanya menyedihkan bagi kalangan pejuang HAM Indonesia melainkan juga menyedihkan bagi komunitas intelijen Indonesia.

Intelijen telah sekian lama terpuruk...terperosok ke dalam kubangan lumpur Orde Baru hanya karena menjadi mata telinga bagi sebuah mekanisme penindasan rakyat.

Intelijen sipil telah sekian lama disunat oleh kekuatan doktrin dan praktek militer untuk mengikuti jalur komando dalam melaksanakan tugasnya.

Akibatnya intelijen dimanapun engkau berada harus menanggung malu, dosa dan terpinggirkan dari pergaulan normal masyarakat Indonesia. Bila tidak memicingkan sebelah mata, rakyat akan mencibirkan mulutnya karena intelijen telah menjadi impoten lahir dan bathin.

Lahiriahnya intelijen telah direduksi oleh kekuatan polisionil yang disahkan oleh undang-undang kepolisian. Lebih lanjut bahkan tidak ada kekuatan hukum apapun yang bisa melindungi kegiatan intelijen, artinya bila anda menjadi anggota intelijen anda harus siap mati bagaikan anjing kurap yang akan membusuk dipinggir jalan.

Bathiniahnya intelijen telah dibungkus oleh pragmatisme politik eksekutif negara dan telah dibingkai oleh citra yang "keliru" yang terus menerus diberitakan oleh media massa. Rakyat semakin benci dengan dunia intelijen yang cenderung digambarkan dengan sebagai bagian dari "kejahatan politik" para penguasa.

Di era keterbukaan dan demokrasi Indonesia, intelijen semakin ciut nyalinya karena semakin banyak orang yang tahu kelemahan-kelemahannya. Khususnya dalam hal landasan hukum yang seharusnya menjiwai pelaksanaan tugas seorang intel.

Kasus Munir jelas memojokkan intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN) yang sebenarnya baru dilahirkan kembali sejalan dengan semangat demokrasi, transparansi, profesionalisme dan penegakan hukum.

Dari hari ke hari, bulan ke bulan.... pemberitaan tentang kematian seorang manusia bernama Munir terus bergulir mengarah pada pencitraan "negatif" terhadap institusi yang bernama BIN.

Tak kurang dari pejabat dan mantan pejabat eselon 1 & 2 BIN menjadi pesakitan diseret ke hadapan sebuah Tim yang sangat Politis dan juga ke hadapan bagian reserse dan kriminal Kepolisian. Demi pengungkapan misteri kematian satu orang yang kebetulan secara profesional terangkat

menjadi tokoh yang lumayan dikenal khalayak, maka sorotan terhadap institusi BIN semakin menjadi-jadi.

Inilah yang saya nyatakan sebagai duka cita yang mendalam bagi para intel yang harus menanggung kegelisahan karena praduga bersalah yang terus-menerus dicecarkan. Pembentukan opini publik yang terus-menerus mengalir dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan ke dalam organisasi BIN adalah jelas sangat aneh bagi seorang pelaksana setingkat eksekutor misalnya.

Para intel tentu sudah siap menerima segala konsekuensi dari pekerjaannya karena semua anggota intelijen sudah menandatangani kontrak kematian sebagai anjing kurap pemerintah yang harus bersedia dimatikan bila pemerintah menghendaki. Para intel telah meletakkan Hak Asasi dirinya demi negara dan bangsa yang secara ideal telah didoktrinkan pada dirinya, tidak akan pernah ada pembela HAM peduli dengan fakta ini.

Langkah-langkah apapun yang akan diambil oleh aparat penegak hukum bersama Tim Pencari Fakta (TPF) Munir dalam menyelesaikan atau mengungkap kasus kematian Munir akan menjadi taruhan bagi masa depan Indonesia, yang berarti juga masa depan penegakan HAM, masa depan penegakkan hukum, dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah masa depan keberlangsungan organisasi intelijen.

Posted by Senopati Wirang /**Monday, May 16, 2005**

Reformasi Intelijen

7 tahun setelah bergulirnya reformasi, apakah reformasi intelijen juga terjadi?

Bila kita menilik perubahan signifikan dalam lembaga intelijen tertinggi di republik ini, maka sekilas kita akan melihat sosok Badan Intelijen Negara (BIN) yang berbeda dengan Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) di masa lalu. Sayang, letak perbedaannya hanya pada kata koordinasi.....yang bisa diartikan hilangnya fungsi koordinasi atau mungkin juga upaya menjadikan badan yang sungguh-sungguh memiliki operasionalisasi yang memadai.

Lebih lanjut, bila kita menilik badan intelijen lain semisal Badan Intelijen Strategis (BAIS) milik militer dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) milik Polri, unit intelijen Departemen seperti di Depkumham, Kejaksaan Agung, Direktorat Sospol Depdagri maka tidak sedikitpun perubahan. Bahkan apa yang kita kenal sebagai komunitas intelijen yang dikoordinir BIN masih tetap berjalan. Karena bentuk komunitas intel itu lebih mirip ngobrol sambil ngopi bareng serta "sedikit" pengarahan, maka pengaruhnya bisa jadi sangat-sangat lemah.

Ketika Amerika Serikat diguncang teror bom yang kita kenal dengan sebutan 9/11, serta-merta terjadi desakan dilakukannya reformasi nasional atas organisasi dan gelar operasi seluruh jajaran intelijen. Tidak ada sesuatupun yang berdampak serius ke dalam organisasi, karena

kongres dan eksekutif sangat menghargai keberadaan organisasi intelijen seburuk apapun kinerja mereka.

Tapi di Indonesia yang terjadi adalah sebaliknya, **fungsi intelijen semakin kerdil, marjinal dan saya perkirakan hanya kan menjadi mata-telinga penguasa menjelang pesta demokrasi lima tahunan**, akibatnya profesionalisme organisasi semakin terabaikan.

Tingkat frustrasi para intel telah mendekati suatu kondisi yang memprihatinkan. Dengan sistem single client yang patuh total pada presiden, maka tidak mau tidak semua unsur intelijen, khususnya BIN telah berubah menjadi alat politik yang signifikan.

Kalau benar-benar diperhatikan apa fungsi dari Badan Intelijen di negara RI, kita tinggal melihat ke dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu bisa dijabarkan sebagai berikut:

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang dijabarkan dalam bentuk tugas mengkoordinasikan perencanaan umum dan pelaksanaan operasional kegiatan intelijen diantara instansi-instansi lainnya yang memiliki fungsi intelijen dan mendukung penyelenggaraan tugas pokok intelijen masing-masing instansi. Memberikan keterangan-keterangan rahasia yang akurat dan tepat waktu kepada presiden dan kabinet. Mengumpulkan keterangan rahasia luar negeri, keterangan rahasia dalam negeri, melakukan analisa, melakukan kontra-spionase, dan melakukan kontra-terorisme."

Tetapi apa daya mimpi tak sampai, kooptasi organisasi intelijen oleh kekuatan politik dan kepentingan sesaat para penguasa telah melemahkan organisasi intelijen itu sendiri. Ini apa yang saya sebut sebagai hilangnya profesionalisme dan nurani kerakyatan/kebangsaan yang seharusnya melekat di hati setiap insan intelijen.

Sekedar bukti-bukti politik:

- Perkembangan intelijen di tanah nusantara mulai tumbuh setelah RIS dilebur menjadi RI dan menjelma menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950. Dimana mantan presiden Soekarno pada bulan Desember 1958 membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI), tetapi pada bulan November 1959, Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dirubah namanya menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) yang dalam bahasa Inggris = CIA. Tokoh yang ditugasi dan diberi tanggung jawab oleh mantan presiden Soekarno untuk mengurus dan menjalankan Badan Pusat Intelijen (BPI) adalah Menteri Luar Negeri Subandrio (orang dekat presiden yang kemudian juga terseret dalam sengketa politik nasional).
- Ketika terjadi pergantian kekuasaan ke tangan Jenderal Soeharto, itu Badan Pusat Intelijen (BPI) dibubarkan dan "dibersihkan" pada tanggal 22 Agustus 1966, digantikan oleh Komando Intelijen Negara (KIN) yang langsung dibawah komando Jenderal Soeharto dengan bantuan tokoh intel kawakan Sudingo tentunya. Kemudian pada tanggal 22 Mei 1967, Komando Intelijen Negara (KIN) berganti nama menjadi Badan Koordinasi

Intelijen Negara (Bakin), pemimpin lembaga baru ini adalah Jenderal-jenderal terdekat dengan presiden yang sedang menjabat. Nama-nama tokoh intelijen Indonesia seperti Letjen (purn) Sutopo Yuwono, Jenderal (purn) Yoga Soegomo, Letjen (purn) Sudibyo, Letjen (purn) Moetojib, Letjen (purn) ZA Maulani, Letjen (purn) Arie J. Kumaat, Jenderal (purn) AM. Hendropriyono, dan terakhir Mayjen (purn) Syamsir Siregar semuanya adalah orangnya presiden.

- Kiprah pemimpin BAKIN yang pertama tidak terlalu lama karena pertentangan dengan para petinggi militer, sehingga pada tahun 1974 harus digantikan oleh pemimpin yang lebih disenangi kalangan militer aktif dan khususnya mantan presiden Suharto.
- Pada masa mantan Presiden Suharto, kepemimpinan Jenderal Yoga Soegomo jelas tidak bisa dipungkiri nama besarnya, karena ranking militernya yang jenderal penuh didukung oleh model operasi gaya Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB). Kepemimpinan gaya flamboyan yang melebihi wewenang berdasarkan hukum positif itu telah mengabaikan pentingnya penataan hukum nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan (security). Keberadaan hukum antisubversi dan kekuatan politik nasional yang bersandarkan pada militerisme telah membuat terbuai organisasi intelijen. Jelas sekali peran intelijen sebagai kepanjangan tangan penguasa, dan kedekatan BAKIN dengan mantan Presiden Suharto tidaklah mungkin untuk dibantah.
- Anomali organisasi BAKIN terjadi setidaknya dua kali yaitu pertama ketika Ali Moertopo waktu itu berpangkat Brigjen

memegang posisi sebagai salah satu Deputy Operasi yang sangat berpengaruh. BAKIN kalah terkenal oleh apa yang masyarakat kenal sebagai Opsus (Operasi Khusus). Kedua yaitu ketika Benny Moerdhani yg masih Mayjen menjabat sebagai Wakil Kepala BAKIN, upaya pengrusakan organisasi sipil dibawah militer sangat kentara terjadi di BAKIN. Akibatnya intelijen sipil benar-benar mandul, impoten dan dikuasai oleh militer seutuhnya. Pada anomali organisasi yang kedua, yaitu dibawah kepemimpinan Sudibyo yang terjadi adalah kemandulan organisasi BAKIN tersebut tidak segera diatasi dengan revitalisasi organisasi yang mengupayakan kemandirian intelijen sipil. Anggota intelijen lebih banyak disuapi "bingkisan" dari rekanan pengusaha pimpinan dan lupa dengan tugas pokok organisasi. Sehingga peranan BAIS jelas jauh lebih menonjol ketimbang BAKIN yang secara teori jauh lebih tinggi.

- Adalah Letjen (purn) Moetojib yang pertama berusaha lebih netral dalam soal politik nasional, yaitu ketika memutuskan untuk tidak turut serta dalam rekayasa pengembosan PDI (Megawati).
- Upaya serius memperbaiki kinerja BAKIN diawali oleh gebrakan Letjen (purn) ZA Maulani yang sempat memiliki waktu untuk mengevaluasi kerja BAKIN saat menjabat sebagai pimpinan Setwapres. Letjen (purn) ZA Maulani sangat menyadari kualitas produk BAKIN yang diibaratkan sebagai *garbage in garbage out* (semuanya analisa BAKIN bagaikan sampah busuk). Disadari atau tidak oleh orang-orang BAKIN, pernyataan Letjen (purn) ZA

Maulani tersebut tidak mengherankan, karena faktanya BAKIN telah terperosok ke dalam jurang kehancuran organisasi melalui dominasi militer dan hilangnya jiwa pengabdian intelijen yang profesional.

- Letjen (purn) ZA Maulani masih sempat meninggalkan berkas reformasi organisasi yang bertujuan merombak organisasi dan gelar operasinya. Berkas tersebut dilanjutkan oleh Letjen (purn) Arie J. Kumaat karena seperti biasa pergantian presiden berarti pergantian Kepala Badan Intelijen. Betapa beratnya kepemimpinan Letjen (purn) Arie J. Kumaat karena konon ia bukan pilihan Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid).
- Reformasi intelijen dalam tubuh BAKIN yang kemudian dikukuhkan menjadi BIN di era Letjen (purn) Arie J. Kumaat tersebut semakin berkibar ketika pemimpin flamboyan Letjen (purn) AM Hendropriyono diangkat sebagai Kepala BIN dengan status setingkat Menteri Negara. Langkah-langkah perbaikan organisasi juga dilaksanakan sejalan dengan semangat menjadikan BIN sebagai organisasi yang profesional. Sayangnya nuansa politis masih terasa seperti juga pada masa-masa kepemimpinan sebelumnya. Kedekatan Letjen (purn) AM Hendropriyono yang kemudian mendapat pangkat kehormatan sebagai Jenderal dari mantan presiden Megawati tidak diragukan lagi kedekatannya dengan presiden. Sebuah upaya positif adalah memperkuat posisi sipil dalam organisasi BIN, bahkan ikut mengusulkan agar Kepala BIN bisa dipimpin orang sipil.

- Terakhir adalah menurunkan kembali status Kepala BIN. Meski fakta pangkat militer pemimpin yang terakhir hanya berbintang 2, tidak berarti kemampuannya memimpin organisasi intelijen patut diragukan. Mayjen (purn) Syamsir Siregar sebagai teman dekat presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekarang berkuasa, memikul beban yang sangat berat baik secara internal maupun eksternal. Dengan pengalaman memimpin lembaga intelijen TNI (BIA/BAIS) tentunya harapan membawa BIN menjadi organisasi yang profesional, disegani dan disayangi rakyat menjadi tugas utamanya. Kemandegan reformasi intelijen yang tidak jelas mau kemana, persoalan profesionalisme intelijen, dan semakin menurunnya citra intelijen di mata publik seyogyanya segera diatasi secara profesional. Tentu saja soal kedekatan Kepala Badan Intelijen dengan presiden juga patut mendapat sorotan, karena selayaknya kedekatan itu tidak kembali menjerumuskan dan menghancurkan organisasi yang dibangun demi kejayaan bangsa Indonesia.

Posted by Senopati Wirang /**Monday, May 16, 2005**

Celometan

Celometan adalah istilah negatif yang ditujukan kepada seseorang yang banyak omong kosong dan sedikit kerja serta tidak terampil dalam melaksanakan tugas.

Dalam setiap latihan militer di Indonesia, instruktur akan sangat membenci kadet prajurit yang celometan dan tidak cekatan.

Adalah sangat biasa bila instruktur harus melayangkan tangannya ke wajah prajurit celometan. Hal ini demi kebaikan si prajurit itu sendiri dimana sifat celometan sangat berbahaya bagi dirinya sendiri maupun bagi unitnya. Prajurit dilatih untuk berperang dan bukan untuk berdebat, bayangkan jika dalam perang sungguhan prajurit saling mendebat untuk hal yg tidak prinsipil.

Meskipun dalam keadaan damai, prajurit intelijen selalu dalam keadaan perang. Oleh karena itu, sifat celometan tidak bisa ditolerir apapun alasannya.

Apabila kemudian saya dianggap celometan dan pantas untuk dibungkam dengan tamparan yang paling keras (dieliminasi), maka argumentasi saya adalah bahwa saya lebih pantas dianggap sebagai *the other*.

Menjadi the other karena keberadaan saya bahkan tidak disadari oleh komunitas intelijen.

Menjadi the other karena selalu mengamati dinamika intelijen nasional.
Menjadi the other karena sesungguhnya tidak akan pernah dikenal publik.

Anggap saja saya ini the other yang sangat prihatin dan peduli dengan perkembangan intelijen Indonesia. Mohon dimaklumi.

Hal ini saya tegaskan berkaitan dengan "peringatan" dari *the man within* yang peduli dengan eksistensi saya.

Posted by Senopati Wirang /**Sunday, June 05, 2005**

BAKORINDA = INTEL KAMPUNG

Baru-baru ini persoalan mengaktifkan kembali sel intelijen dalam birokrasi pemerintahan daerah menjadi ramai kembali. Pemerintahan SBY tampaknya tertarik untuk mengadopsi ide desk Bakorinda (Badan Koordinasi Intelijen Daerah) yang telah digagas pada masa pemerintahan Megawati.

Reaksi negatif terhadap Bakorinda secara umum dapat dirangkum dalam ketakutan atas "model operasi intelijen Orde Baru". Model yang digambarkan seram, culik-menculik, bunuh yang semua itu melanggar HAM dan menimbulkan keresahan publik.

Tanggapan positif lebih melihat efektifitas desk Bakorinda sebagai ujung tombak pengumpul informasi atas setiap ATHG yang muncul di seluruh wilayah nusantara.

Pendapat saya pribadi adalah sebagai berikut:

1. Pengaktifan desk Bakorinda yang mengintegrasikan koordinasi intelijen di daerah akan menciptakan sebuah struktur elit sumber informasi yang vital bagi pemerintah daerah. Pada awalnya akan sangat bagus untuk mendeteksi setiap ancaman teror namun pada akhirnya akan bergeser pada fungsi deteksi ancaman sesuai definisi kepala pemerintah daerah. Potensinya sangat besar untuk diselewengkan pada kepentingan individu, apalagi seorang kepala pemerintah daerah harus melalui proses pemilihan (pilkada).

2. Insan Intelijen tidak ada yang bisa dikarbit dalam waktu singkat. Tidak ada artinya organisasi yang besar (gendut) yang mencakup seluruh nusantara bila orang-orang yang menjadi operatornya adalah birokrat PNS ditambah sedikit anggota intelijen dari Kepolisian, Militer dan BIN. Saya berani meramalkan yang akan terjadi adalah "bisnis" informasi karena koordinasi berarti berbagi kue kepentingan. Ini berdasarkan pengamatan perilaku anggota intelijen di daerah aman. Anggota intelijen yang telah dibina dengan berbagai teknik keterampilan dan indoktrinasi menjadi lemah dan terkontaminasi oleh pola kerja birokrat PNS yang cenderung kolusif, koruptif dan tidak profesional. Untuk daerah konflik saya kira masih lebih baik karena tuntutan survival dan tekanan dari pusat membuat anggota intelijen harus profesional.
3. Setelah penyimpangan fungsi Bakorinda oleh para kepala daerah, ada juga kecenderungan lain berupa fungsi tambahan Bakorinda sebagai bagian dari mesin politik pemilu nasional. Konflik kepentingan dari adanya perbedaan unsur-unsur Bakorinda akan dengan mudah disatukan oleh uang.
4. Keanggotaan yang mencakup unsur Polisi, Militer, BIN, Kejaksaan, Depkumham (Dirjen Imigrasi), Bea Cukai, dan Depdagri vis a vis Pemda akan menimbulkan rasa "superior" dalam tubuh Bakorinda karena semua elemen aparaturnya keamanan duduk di dalamnya. Sekali lagi hal ini justru membahayakan karena konsentrasi "rasa super" itu akan cenderung koruptif.

5. Kreatifitas dan kewaspadaan intelijen akan semakin lemah seiring dengan adanya forum kongkow-kongkow di warung Pemda.

Singkatnya saya tidak percaya dengan profesionalitas yang tinggi dalam wadah Bakorinda.

Sebagai alternatif pendapat saya sbb:

1. Mungkin usulan saudara Aris Santoso (Media Indonesia Senin 13 Juni 2005) dengan pengaktifan DPKN (**Dinas Pengawas Keamanan Negara**) dibawah POLRI sangat tepat. DPKN akan bertanggung jawab penuh atas masalah keamanan dalam negeri dengan melaksanakan fungsi sebagai pendeteksi awal dari setiap ancaman keamanan di dalam negeri.
2. BAIS yang sekarang juga melakukan fungsi DPKN sebaiknya menjadi **Badan Intelijen Pertahanan (BIP)** dimana fungsi utamanya adalah Intelijen Pertempuran terkait dengan setiap ancaman atas integritas NKRI dari dalam berupa gerakan separatisme dan dari luar negeri berupa menjaga keutuhan wilayah, khususnya di daerah perbatasan. Serta dengan terus mengikuti perkembangan regional dan global di bidang strategi pertahanan.
3. BIN yang sekarang campur aduk melakukan semua fungsi intelijen sebaiknya berkonsentrasi pada fungsi **spionase dan counterintelligence (Kontra Intelijen)**. Artinya BIN mengadakan operasi intelijen di luar negeri dan melakukan deteksi atas setiap kegiatan intelijen asing di dalam negeri (baik

- intelijen negara asing maupun intelijen organisasi teroris internasional). Dalam operasi kontra intelijen bisa dibentuk Task Force (sifatnya temporal) yang anggotanya **BIN**, **DPKN** dan **BIP**.
4. Intelijen Imigrasi melakukan fungsinya secara khusus dalam masalah keimigrasian. Disamping tugas pokoknya, Intelijen Imigrasi juga merupakan pendukung utama kegiatan DPKN dan BIN.
 5. Intelijen Bea Cukai akan berkoordinasi erat dengan Kepolisian dalam penanganan masalah bea dan cukai.
 6. Intelijen Kejaksaan Agung tetap seperti fungsinya sekarang.
 7. Intelijen Departemen Keuangan perlu dikembangkan khususnya terkait dengan masalah penyimpangan pajak dan kasus korupsi dalam tubuh pemerintah. Bisa didukung oleh DPKN dan BIN.
 8. Perlukah Intelijen Depdagri? Bila perlu mungkin lebih tepat disebut sebagai Badan Pengumpul Informasi.
 9. Tidak akan ada arogansi sektoral karena ruang lingkup operasinya sudah ditentukan.
 10. Seluruh Lembaga Intelijen harus netral dalam dunia politik dan tidak bisa dimanfaatkan oleh kepentingan individu atau partai politik.
 11. Perlu landasan hukum dengan Undang-Undang Intelijen Indonesia.

Demikian ump.

Posted by Senopati Wirang /Tuesday, June 14, 2005

IPOLEKSOSBUDHANKAM Intelijen Strategis

Apabila intelijen benar-benar bekerja profesional mendeteksi setiap ancaman bagi kehidupan rakyat Indonesia, tentu tidak akan ada kasus Busung Lapar.

Apabila intelijen benar-benar menjadi pengawal pembangunan ekonomi nasional, tentu tidak akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa daerah.

Apabila intelijen benar-benar membuka mata dan telinga atas dugaan korupsi dalam tubuh pemerintah, tentu tidak akan terjadi korupsi berjamaah.

Apabila intelijen mendokumentasikan setiap temuan kasus penembangan liar dan penggundulan hutan, tentu akan mudah membongkar kasus mafia kayu.

Apabila intelijen sungguh-sungguh melakukan kontra-operasi terhadap kelompok teroris, tentu kasus bom akan segera berhenti.

dst.....dst apabila.....intelijen

Intelijen strategis menyangkut hajat hidup kehidupan berbangsa dan bernegara, begitu luas cakupannya, begitu banyak organisasi yang berbau intelijen, tetapi sayang begitu lemah pelaksanaannya.

Intel oh intel.....riwayatmu kini

Posted by Senopati Wirang /**Thursday, June 23, 2005**

Antara Restrukturisasi dan De-Hendro-isasi B I N

Bagian 1

Hanya ada dua kata bagi insan intelijen yang mencermati proses restrukturisasi BIN akhir-akhir ini: **Lagu Lama**

Kepentingan politik senantiasa begitu kuatnya menerpa BIN sehingga lagu lama perlu dinyanyikan lagi.

Semuanya orang presiden, maka negara aman dan tenteram (penguasa bisa tidur nyenyak). Politisasi Badan Intelijen sudah terjadi sejak awal kemerdekaan, meski demikian pada era Orde Lama, intelijen tidak terlalu jauh masuk dalam lingkaran politik presiden, karena loyalitasnya bukan kepada presiden semata, melainkan kepada negara dan rakyat Indonesia. Pemerintah Orde Baru adalah pemerintahan yang merekayasa bentuk organisasi intelijen yang amat sangat loyal kepada presiden. Bayangkan saja doktrin pertama yang harus diingat oleh setiap insan intelijen Orde Baru adalah prinsip single client (presiden).

Pada era Orde Lama, insan intelijen tidak terlalu dicekoki oleh prinsip single client itu, tetapi lebih pada pembentukan karakter prajurit intelijen yang profesional dan mengabdikan kepada negara dan bangsa Indonesia. Definisi ancaman adalah kepada segala sesuatu yang membahayakan negara dan rakyat Indonesia. Tapi jeleknya adalah merembesnya kelompok aliran politik dalam intelijen, misalnya dalam kasus keterlibatan sejumlah orang intelijen yang bersimpati kepada Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga terjadilah operasi pilih tebang besar-besaran yang pertama dalam organisasi intelijen (waktu itu masih

berbentuk Biro/Badan Pusat Intelijen - BPI yang dikomandoi Subandrio). Betapa tidak adilnya perlakuan terhadap mantan-mantan BPI, meski sudah lolos dari Litsus (penelitian khusus) yang pertama kali dikenalkan oleh pemerintah Orde Baru, karir dan masa depan sudah bisa dianggap masuk kotak, paling-paling hanya menyentuh kursi eselon tiga. Tidak sedikit yang kena tebang dan terkena salah tebang.

Prinsip single client jelas bisa meminimalkan kemungkinan timbulnya kelompok kepentingan dalam organisasi intelijen. Tetapi yang terlupakan adalah intelijen menjadi tidak kritis kepada presiden. Ada cerita lucu dari salah seorang mantan pejabat BAKIN ketika yang bersangkutan melaporkan kasus penyalahgunaan wewenang oleh keluarga Cendana yang kemudian dianalisa akan menjadi bumerang bagi presiden. Maksud dan analisisnya boleh jadi sangat baik, tetapi justru yang bersangkutan malahan harus menelan pil pahit dengan tuduhan mengabaikan prinsip single client.

Sampai dengan bergulirnya reformasi, insan intelijen dalam tubuh BIN maupun BAIS TNI (mereka yang meniti karir secara profesional) sebenarnya sangat resah dan khawatir dengan trend Orde Baru yang tak kunjung berubah. Khususnya di kalangan angkatan muda yang saya nilai jauh lebih progressif dibanding para aktivis yang pro demokrasi sekalipun. Kesulitan para prajurit intelijen angkatan muda itu adalah dalam menghadapi kenyataan organisasi yang kusut oleh kepentingan politik para pemimpinnya. Kalangan muda itu sering dikategorikan sebagai kelompok frustrasi karena idealisme intelijennya. Seiring berlalunya waktu, mungkin mereka sudah terkontaminasi oleh kepentingan dan

hasutan politik yang begitu keras sekaligus sangat menggoda karena ada faktor uang di sana.

Beberapa generasi cemerlang parajurit intelijen karir saya nilai cukup berhasil dalam mengupayakan profesionalisme intelijen dan revitalisasi intelijen sekaligus memulihkan citra pejuang intelijen untuk kepentingan negara dan rakyat. Itulah mengapa saya kagum dengan junior saya Sdr. As'at Ali yang begitu tekun dan teguh dalam menjalankan tugas. Kesulitan kepentingan politik menyingkirkan Sdr. As'at terletak bukan hanya dari dukungan internal organisasi BIN, melainkan karena kemampuan dan ketidakberpihakannya kepada kepentingan kelompok-kelompok politik di dalam negeri.

Kepiawiaan Mayjen Syamsir yang mungkin masih ingat bila bertemu saya jelas terletak pada permainan tertutupnya, di mana nyaris sulit terdeteksi apa tujuannya.

Bila saya boleh berargumentasi, apa yang sedang terjadi dalam tubuh BIN sekarang ini sulit untuk dipastikan arah dan tujuannya. Kelompok pendukung Yudhoyono jelas akan kesulitan bila dalam proses de-Hendroisasi juga menyingkirkan prajurit intelijen karir yang jelas-jelas tidak terlibat langsung dalam soal dukung-mendukung presiden. Namun hal itu bisa saja terjadi karena jeleknya orang-orang intelijen adalah terlalu besarnya rasa curiga dan tidak percaya kepada orang-orang sesama intel yang berada di luar lingkaran terdekatnya.

Bagi saya pribadi lagu lama masih akan terus dinyanyikan sepanjang tidak ada perhatian dari publik, tidak ada perhatian dari pemerintah dan DPR,

tidak ada perhatian dari kalangan intelijen untuk secara sungguh-sungguh menciptakan aturan hukum yang kuat dan pasti dalam keberadaan dan aturan main organisasi intelijen berikut mekanisme kerja, operasi, peran dan posisinya dalam negara Republik Indonesia.

Posted by Senopati Wirang /**Saturday, September 10, 2005**

RUU Intelijen Versi Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara

Akhir Agustus 2005 yang lalu RUU Intelijen versi Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara konon berhasil menyelesaikan dan mulai disosialisasikan ke masyarakat.

Dalam ulasan singkat ini saya hanya mengajukan lima kritik dan satu tanggapan positif.

Kritik

1. Pembentukan LKIN (Lembaga Koordinasi Intelijen Negara) yang semodel dengan BAKIN mencerminkan kekurangkreatifan dalam merancang sebuah model atau struktur intelijen bagi sebuah negara. Pola operasi chakra byuha tidak ada bedanya sama sekali dengan apa yang sudah pernah dilakukan BAKIN. Keberhasilan BAKIN dimasa lalu tidak terlepas dengan sistem komando dan faktor kepemimpinan di BAKIN serta kedekatan dengan presiden. Dengan demikian pola hirarki sebenarnya menjiwai model koordinasi BAKIN di masa lalu. Kekurangan pola ini hanya pada terlalu besarnya kemungkinan terjadinya penyimpangan wewenang.
2. Ada kegagalan dalam reorganisasi BAIS TNI menjadi Badan Intelijen Strategis (BIS) dibawah Dephan. Karena akan diarahkan menjadi badan intelijen luar negeri (operasi spionase/intelijen dan kerjasama intelijen). Apakah warna

intelijen Indonesia di forum internasional hanya akan di isi oleh kalangan militer dengan para atase pertahanan dan stafnya? Selanjutnya ada kejanggalan pula dalam diarahkannya BIN menjadi badan yang beroperasi di dalam negara (dalam negeri). Bagaimana dengan sejarah BIN sejak masa Badan Koordinasi Intelijen (BKI) kemudian menjadi BPI (Badan Pusat Intelijen), dan seterusnya sampai jadi BAKIN dan terakhir menjadi BIN telah membina kerjasama luar negeri yang tidak sedikit. Apakah akan ditanggalkan saja?

3. Pembentukan Intelijen Militer jelas agak aneh karena setelah mereorganisasi BAIS TNI lalu dibentuk lagi intelijen militer. Mengapa jadi ada dua lembaga intelijen berbau militer? yang mencakup dalam dan luar negeri. Hal ini jelas mencoreng proses demokratisasi dan supremasi pemerintahan sipil, karena intelijen adalah darah informasi bagi sebuah negara. Pengkerdilan organisasi intelijen sipil menjadi sangat memprihatinkan karena para penggagas RUU tersebut adalah intelektual yang seharusnya memiliki cukup wawasan tentang posisi vital intelijen dalam sebuah negara.
4. Kemudian keberadaan Intelijen Instansional adalah sangat mengada-ada, karena tidak perlu diformalkan dalam bentuk badan atau lembaga. Intelijen dalam sebuah instansi departemen seperti Intelijen Imigrasi, Intelijen Pajak, Intelijen Lingkungan, Intelijen Kehutanan, dan yang lainnya hanya membutuhkan dukungan koordinasi dan kekuatan operasi untuk menghadapi ancaman yang berada diluar kuasa mereka. Dalam posisi ini

biasanya Polisi dan mungkin militer menjadi andalan untuk mendukung operasi bersama. Lebih jauh posisi PPNS pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dipertegas dalam aturan hukum yang lebih jelas. Dengan kata lain tanggung jawab intelijen instansi adalah tetap kepada pimpinan instansi dan bukan pada badan baru.

5. Hanya ada satu kata untuk Lembaga Penunjang yang saya ramalkan hanya akan menjadi sarang kepentingan kelompok dan potensi untuk mendikte keseluruhan gelar operasi intelijen. Karena apa yang dimaksud penunjang biasanya malahan kebalikan menjadi sebuah birokrasi baru yang sangat buruk bagi intelijen. Biarkan Badan-badan intelijen menunjang dirinya sendiri-sendiri dalam kemandirian.

Tanggapan positif saya hanya pada pentingnya keberadaan UU Intelijen bagi sebuah negara. Bagaimanapun compang-campingnya sebuah RUU hal ini perlu mendapat perhatian para pakar intelijen dan masyarakat luas, khususnya dalam hal mungkin-tidaknya model RUU di atas diaplikasikan secara maksimal.

Salam Intelijen.....

Posted by Senopati Wirang /**Thursday, September 08, 2005**

Antara Restrukturisasi dan De-Hendro-isasi

B I N Bagian 2

Pada bagian dua ini saya hanya ingin menyampaikan kata selamat kepada pimpinan BIN yg telah secara meyakinkan berhasil melakukan "perbaikan internal" ke dalam tubuh organisasi BIN. Dengan tetap memegang prinsip profesionalisme, apa yg dituduhkan sebagai proses de-Hendro-isasi akhirnya bisa kita anggap sebagai revitalisasi organisasi yg nyaris terbawa dalam kutub kekuatan politik tertentu (baca kepentingan PDI-P). Harapan saya adalah bahwa organisasi BIN bisa berdaya guna dalam menjaga keselamatan negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Bukan demi kepentingan partai politik atau bahkan kepentingan presiden sekalipun.

Seyogyanya bila BIN memperhatikan kepentingan negara dan rakyat Indonesia otomatis juga menjaga kepentingan presiden. Kepentingan politik aliran, partisan, kelompok dan yg sejenisnya hanya akan merusak derap kerja organisasi BIN.

Cuma sayang seribu sayang, sampai dengan saat ini BIN tetap bagaikan ayam sayur yg lumpuh karena ketidakmampuannya menyusun, mengajukan dan memperjuangkan lahirnya sebuah undang-undang Intelijen Negara yg akan menjadi landasan bagi kerja organisasi BIN.

Bisa saja orang mengatakan bahwa intelijen tdk perlu undang-undang, tetapi dalam realita politik sekarang yg lebih demokratis, segala perangkat hukum yg melandasi setiap gerak kegiatan organ pemerintah

menjadi sangat vital. Tanpa itu, bisa jadi kegiatan setiap orang BIN dianggap melanggar hukum.

Entahlah, bagi saya sehebat apapun orang, dan proses restrukturisasi dalam tubuh BIN akan percuma saja karena toh mereka tidak akan bisa bekerja secara optimal dibawah payung hukum yg jelas.

Posted by Senopati Wirang /**Monday, October 24, 2005**

Agen Intelijen Tolak Perintah Atasan???????

Angin kering yang berhembus menggelitik intelektualitas sejumlah akademisi yang tiba mendeklarasikan diri sebagai pakar intelijen negara, tampaknya berpotensi untuk semakin memperparah kerusakan yang telah ada dalam tatanan struktur intelijen republik Indonesia.

Judul tulisan kali ini mengacu pada pernyataan dari Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara yang salah satu isi dari draft UU Intelijen Negara yang mereka buat. Akan ada semacam hak bagi agen intelijen untuk menolak tugas yang melanggar HAM. Mengapa saya begitu yakin bahwa hak tersebut akan terasa aneh bagi telinga komunitas intelijen di seluruh dunia. Prinsip kepatuhan agen dalam melaksanakan perintah pimpinan adalah hal yang tidak bisa ditawar, dan soal tanggung jawab sudah jelas berada ditangan pemberi perintah, tidak ada bedanya dengan prajurit dalam peperangan. Hal prinsipil yang perlu ditekankan dalam UU Intelijen seharusnya bukan soal hak agen untuk menolak perintah, tetapi lebih pada ruang lingkup operasi yang diperkenankan bagi institusi intelijen, hal ini merupakan tanggung jawab pimpinan intelijen yang dilakukan "biasanya" atas sepengetahuan presiden. Selain itu, bila hak seorang agen untuk menolak perintah dengan alasan melanggar HAM, maka definisi HAM itu akan sangat subyektif per-individu agen. Saya bisa memastikan akan terjadi bentrokan kepentingan dan perpecahan dalam organisasi intelijen, karena seorang agen yang mungkin memang "penakut" akan beralasan ini itu guna menghindari perintah.

Sungguh sangat menyedihkan intelijen Republik Indonesia bila nasib masa depannya hanya ditentukan oleh "the cleverness" para akademisi yang mungkin semakin naik daun dalam mata publik Indonesia. Saya sangat yakin bahwa kalangan muda intelijen Indonesia baik sipil maupun militer paham dan seharusnya merasa ngeri dengan masa depan yang semakin kabur karena landasan hukum yang menjadi acuan dalam setiap tindakan intelijen sangatlah rapuh.

Juga sangat menyedihkan karena, draft UU Intelijen yang seharusnya dilandasi oleh "the intelligence" para agen, case officer dan analyst atau orang intelijen sendiri ternyata hampir tidak terdengar gaungnya, malahan yang ramai cuma soal beberapa poin pasal yang dianggap "berlebihan" oleh sebagian kalangan.

Sebagai orang di luar sistem saya bisa melihat kegamangan reformasi intelijen Indonesia, dan juga bisa memahami mengapa hanya intelijen negara (BIN) yang menjadi sorotan. Kecenderungan untuk memperkuat intelijen militer dan intelijen strategis dengan gaya operasi agresif dan memandulkan intelijen negara (BIN) dengan intelijen positif sama saja dengan mematikan masa depan intelijen sipil yang seharusnya berperan sentral bersama Kepolisian Indonesia. Tapi apa daya, diamnya sebagian besar agen-agen muda cemerlang yang ada dalam tubuh BIN saya yakini sebagai cerminan kepatuhan mereka pada sumpah prajurit intelijen.

Intelijen sipil yang saya bayangkan dimasa depan tidak berarti tanpa orang militer di dalamnya atau tanpa kepemimpinan orang militer (soal

kepemimpinan bisa sipil bisa militer dan tidak ada dominasi bila perlu militer aktif yang bergabung menjadi orang sipil), dikotomi sipil-militer dalam organisasi intelijen jelas berpotensi menyesatkan siapapun yang membaca tulisan tentang intelijen. Lebih jauh, apa yang saya bayangkan adalah sebuah organisasi intelijen berwatak sipil dengan disiplin militer dan beranggotakan profesional intelijen yang mengerti makna lebih dari sekedar mencari informasi, yaitu bagaimana menterjemahkan dan menganalisa informasi tersebut secara intelijen dan menjadi produk yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya akurasinya dan cepat prosesnya.

Mudah-mudahan angin kering yang mengawali tulisan ini bisa dipersejuk dengan adanya pandangan-pandangan positif dan kritik membangun buat masa depan intelijen Indonesia.

Sekian

Posted by Senopati Wirang / **Wednesday, November 09, 2005**

Dana dan Intelijen Indonesia

Pagi ini secara kebetulan saya membaca artikel lawas dari saudara Algooth Putranto di bisnis.com (Bisnis Indonesia, mudah-mudahan tetap dimaintain oleh bisnis.com). Meskipun artikel tersebut tertanggal Selasa, 01/06/2004, namun relevansi pembahasannya masih terasa hingga saat ini dan mungkin di masa mendatang.

Argumentasi saudara Algooth yang rasanya sangat saya kenal gaya tulisannya tersebut, cukup jelas dan rasanya agak menelanjangi dunia intelijen Indonesia. Diantara para junior pelaksana operasi intelijen sering terdengar gurauan "ngasih sekian puluh ribu rupiah pengin aman"....ha ha...ha... dilanjutkan dengan tawa yang mengiris hati karena sebenarnya dedikasi anggota intelijen (sipil dan militer) tidaklah diragukan. Kurangnya dukungan dana tersebut membuat mereka memeras otak untuk mengatur bagaimana mencukupi setiap langkah operasi yang dilaksanakan. Mereka tidak lagi memikirkan sisa dana operasi karena yang dipikirkan adalah jangan sampai uang pribadi ikut terkuras demi lancarnya operasi. Maklum uang pribadi yang tak lain sama saja dengan gaji PNS/Tentara itu adalah untuk menopang hidup keluarga yang pas-pasan, artinya kalo sampai terpakai berarti keluarga tidak makan. Bandingkan misalnya dengan korupsi besar-besaran dari berbagai lembaga pemerintahan/instansi/departemen dalam mengucurkan dana dinas luar, termasuk contohnya dana dinas luar studi banding ke luar negeri buat anggota Dewan yang terhormat.

Sekali lagi dari tulisan saudara Algooth (sebaiknya lain-kali ditulis dengan gaya tidak terlalu kentara), terdapat beberapa sinyalemen tentang mengapa intelijen tidak handal. Dari sekian banyak sinyalemen, benarkah yang terutama terletak pada faktor uang dan kebutuhan akan perhatian serius para pemimpin nasional.

Suatu waktu saya pernah masuk ke kamar kerja Bapak Ali Moertopo, saat itu untuk sekedar pengarahan tentang sebuah operasi kecil. Kemudian ketika masuk pada masalah pendanaan, beliau dengan tenang menanyakan berapa perlunya untuk operasi ini, karena saya agak canggung bicara soal dana kemudian beliau kurang lebih berkata demikian : "soal dana operasi buat intelijen *the limit is the sky*, jadi jangan ragu katakan berapa?"

Bandingkan dengan intelijen kontemporer yang dibahas saudara Algooth....jauh sekali bukan. Pada masa jayanya pimpinan intelijen yg dekat dengan mantan presiden Suharto, soal dana tidak pernah menjadi masalah, soal cara operasi tidak pernah menjadi pembicaraan, soal hukum apalagi.

Apa yang lolos dari pengamatan saudara Algooth adalah perbedaan spirit Orde Baru dengan Reformasi. Dimana pada era Orde Baru, segala sesuatunya dimungkinkan karena faktor kekuasaan yang memusat pada mantan presiden Suharto tidak terbantahkan oleh siapapun. Saat ini intelijen tentunya tidak akan lagi bisa mengulangi pola Orde Baru dengan belaian manja kucuran dana operasi (ingat!! dana tersebut biasanya non-

budget dan lemah dalam pertanggungjawaban dan tidak ada transparansi).

Di era reformasi, dana-dana tambahan di luar budget buat intelijen hilang terpengkas oleh mekanisme yang bersifat otomatis. Ada sumber-sumber pendanaan yang hilang "dibawa" oleh para pemimpin intelijen, misalnya soal bagi-bagi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada tahun 70-80an yang juga dinikmati sebagian elit pimpinan intelijen. Belum lagi setoran-setoran gelap dari berbagai kalangan bisnis yang membutuhkan dukungan intelijen. Hal ini bisa kita bandingkan dengan setoran pengelola Judi kepada Kepolisian Republik Indonesia, atau beking-membekingi kalangan tentara kepada bisnis besar di berbagai daerah.

Itulah mengapa sekarang terasa sangat defisit dalam soal anggaran, karena sejak dulunya sumber pendanaan yang resmi memang sedikit. Saudara Algooth sangatlah menyederhanakan persoalan atau memang ingin menyembunyikan bagian yang merupakan aib bagi intelijen.

Tapi bagaimanapun saya setuju bila intelijen butuh perhatian serius baik dalam soal pendanaan, posisi dalam sistem keamanan nasional dan landasan hukum yang akan memayungi kerja profesional intelijen.

Posted by Senopati Wirang /**Monday, November 07, 2005**

Klarifikasi Tulisan UU Intelijen

Sehubungan dengan sejumlah pertanyaan tentang mengapa sikap saya seolah-olah mendua soal wewenang penahanan yang diminta BIN dalam tulisan UU Intelijen dan tulisan-tulisan sebelumnya, saya ingin mengklarifikasikan bahwa antara tulisan-tulisan saya itu tidak bertentangan.

Benar bahwa saya setuju Polisi menjadi pusat dari penanganan soal keamanan dalam negeri Indonesia. Dengan Polisi memiliki wewenang penahanan dan penangkapan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Benar bahwa saya juga pernah menyarankan agar ada wewenang BIN untuk "meminta" Polisi untuk melakukan penahanan.

Terakhir saya juga menyatakan bahwa akan lebih efektif bila BIN punya wewenang sekaligus memiliki unit yang memiliki kemampuan untuk operasi penahanan terhadap tersangka atau orang diduga kuat membahayakan atau memiliki informasi yang sangat penting.

Untuk catatan yang terakhir sifat penahanan yang dilakukan oleh BIN bukanlah seperti yang dilakukan Polisi, tetapi lebih mirip ke model penahanan yang dilakukan misalnya oleh PPNS Imigrasi. Secara khusus untuk kasus yang sifatnya khusus pula, tidak akan bisa seenaknya atau semaunya menahan dan memintai keterangan kepada sasaran. Dalam banyak kasus Intelijen lebih baik mendapatkan informasi tanpa diketahui

oleh sasaran. Tetapi untuk kasus khusus seperti kontra-intelijen, terorisme dan kejahatan lintas negara diperlukan langkah cepat berupa pencegahan, salah satunya dengan mekanisme penahanan. Memang bisa dibayangkan efek samping yang mungkin berbahaya baik bagi kehidupan masyarakat yang demokratis maupun bagi tubuh BIN sendiri, yang berpotensi untuk terjerumus ke penyalahgunaan wewenang. Tetapi sekali lagi, dengan adanya UU Intelijen yang secara lebih jelas dan transparan mengatur Intelijen, justru bahaya itu bisa diminimalkan.

Satu yang perlu dipastikan adalah bahwa hal ini jangan sampai menciptakan situasi saling menyalang dengan otoritas keamanan lain, khususnya Polisi. Dalam kasus terorisme dan kejahatan lintas negara, kerjasama dengan intelijen Polisi tentunya sangat penting.

Posted by Senopati Wirang /**Saturday, November 26, 2005**

Sekali lagi soal UU Intelijen

Baru-baru ini bermunculan tuduhan dari kalangan akademisi dan aktivis NGO bahwa keinginan BIN memiliki wewenang lebih luas akan merusak prinsip intelijen. Polemik tersebut kembali mengemuka pasca pertemuan BIN dengan Komisi I DPR di Senayan pada 24 November 2005.

Kekeliruan publik dalam memahami intelijen beserta prinsip-prinsipnya sesungguhnya memilukan hati patriot-patriot intelijen yang harus menanggung segala tuduhan itu dengan lapang dada. Apa saja tuduhan tersebut:

1. Bahwa intelijen sepenuhnya tertutup dan bersifat rahasia. Hal ini tidaklah benar karena pada organisasi intelijen harus ada bagian-bagian yang sepenuhnya tertutup, tertutup secara samar, setengah terbuka dan sepenuhnya terbuka. Organisasi intelijen Indonesia dalam sejarah, sejak berdirinya memang lebih dipengaruhi model Uni Soviet dengan KGB dalam soal ketertutupan namun dipengaruhi oleh CIA dalam soal cara operasional. Dengan semikian organisasi intelijen Indonesia menjadi unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Boleh dikata sangat tertutup, karena nyaris tidak pernah ada cerita yang jelas kepada publik tentang intelijen Indonesia. Sementara perangkat hukum dan penerapan prinsip-prinsip yang lebih diterima di negara demokratis tidak terlalu berkembang, toh Indonesia selama dibawah Orde Lama maupun Orde Baru tidaklah pernah demokratis dari kacamata model birokrasi intelijen yang ada.

Intelijen benar-benar menjadi alat kekuasaan yang amat sangat efektif dengan segala wewenang yang berada di atas hukum (karena memang tidak ada hukum yang mengaturnya). Sekarang ketika desakan reformasi juga melanda dunia intelijen, penataan hukum menjadi begitu kompleks karena sudut pandang yang terlalu kontras muncul antara dunia intelijen dengan kalangan akademisi dan aktivis NGO. Intelijen Indonesia yang pada masa lalu bisa melakukan penangkapan, penahanan dll karena memang tidak ada hukum yang mengatur, sekarang merasa lumpuh karena harus mengindahkan aturan hukum terlebih dahulu. Itulah mengapa siapapun pimpinan BIN (lihat misalnya sikap Bung Hendro maupun Bung Syamsir), dala soal perluasan wewenang intelijen. Sebenarnya akan lebih tepat bila dikatakan bukan perluasan wewenang melainkan legalisasi sampai batasan tertentu dari "kebiasaan" operasi intelijen di masa lalu. Hal ini semacam penyesuaian dengan peraturan yang jelas dan mantap dalam mendukung kerja intelijen. Bahwa akan terjadi praperadilan bila intelijen menangkap, saya kira hal itu akan sangat minimal karena sasaran intelijen tidak akan pernah lagi kepada "musuh" penguasa dari definisi politik, tetapi lebih mengarah pada sasaran yg sungguh-sungguh membahayakan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Jadi tidak akan lagi terjadi penangkapan terhadap aktivis dengan alasan kecil menyinggung perasaan presiden, seperti pada masa lalu. Petugas intelijen yang ada disini pada umumnya berasal dari unit-unit operasional TNI maupun Polisi, karena mereka punya kemampuan yang lebih dibandingkan pada umumnya intelijen sipil yang berspesialisasi di bidang yang sangat tertutup seperti covert

agent maupun analis. Tidak akan pernah seorang agen BIN yang tertutup itu berani melakukan penangkapan, tentu saja hal ini hanya dilakukan oleh satuan tugas khusus yang melibatkan anggota Polisi atau TNI, tetapi penangkapan itu dilakukan atas surat perintah dari pimpinan BIN. Jadi ketakutan bahwa setiap anggota akan bisa menangkap benar-benar konyol, karena saya yakin lebih dari 90% anggota BIN tidak mau kehilangan masa depannya dengan terlibat proses tangkap-menangkap atau tahan-menahan orang itu.

2. Intelijen tidak boleh menyentuh sasaran???? ini benar-benar keblinger dengan idealisme intelijen model Badan Pengumpul Informasi. Jelas intelijen itu jauh lebih besar dari sekedar organisasi pengumpul organisasi. Intelijen hampir selalu menyentuh sasaran, hal ini yang menjadikan otentikasi hasil penyelidikan intelijen, karena bersentuhan dengan sasaran. Saya bisa bicara sejauh ini karena saya sering bersentuhan dengan sasaran ketika bekerja dahulu. Untuk mendapatkan informasi intelijen dengan tingkat kepercayaan yang tinggi tentu kita harus bisa memaksimalkan kedekatan dengan sasaran. Lebih jauh, dalam buku panduan klasik intelijen di seluruh dunia disebutkan bahwa beberapa level sentuhan dengan sasaran sebagai berikut: (1) Bersentuhan tanpa disadari oleh sasaran (2) Bersentuhan dengan pihak antara untuk mendapatkan informasi yang dimiliki sasaran (3) Bersentuhan dengan disadari sasaran yang biasanya berlanjut dengan rekrutmen informan..... dst dst, sampai puncaknya bersentuhan dengan tujuan eliminasi sasaran. Puncak inilah yang paling ditakuti oleh orang intelijen maupun non-intelijen, karena hal ini juga berarti menyentuh hal yang paling azasi

dari diri manusia. Bila BIN hanya ingin mengorek keterangan dari sasaran melalui mekanisme penahanan sementara, maka sudah tidak lagi menerapkan seluruh panduan klasik dari kitab intelijen. Ini sudah sejalan dengan semangat demokrasi dan prinsip intelijen yang termodifikasi oleh kompromi dengan kebebasan individu dan penghormatan terhadap hak warga negara dan prinsip menjaga keselamatan masyarakat yang lebih luas. Adapun mengenai aturan hukum, itu semua dibuat agar mekanisme itu berjalan dalam koridor yang terkendali dan terawasi. Jadi seharusnya hal ini diajukan sebagai sebuah argumentasi dari orang-orang intelijen.

3. Intelijen tampak menakutkan dan dianggap sebagai yang tidak memiliki sedikitpun peran dalam penegakan hukum atau singkatnya non-yudisial. Mungkin kondisi inilah yang perlu diubah terlebih dahulu. Seyogyanya intelijen itu juga pro-penegakan hukum dan memiliki anggota-anggota yang berstatus PPNS seperti intelijen yudisial model bea-cukai, imigrasi, kejaksaan, dan KLH. Masa intelijen yang sejak lahirnya sudah dipersenjatai lengkap malahan tidak bisa mengambil tindakan pencegahan, sementara organ seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), bisa melakukan penyidikan pro-justisia. Tentu saja anggota yang ada dalam unit yg akan berstatus PPNS ini telah melalui saringan internal dan harus dipastikan secara hukum hanya mereka yg berstatus PPNS itu yg berhak melakukan operasi penahanan. Lagi pula dengan keberadaan sejumlah anggota Polisi dan TNI dalam tubuh BIN, prosedur penahanan dan penangkapan akan lebih terencana baik dengan menimbang segala konsekuensinya. Intelijen tidak selayaknya ditakuti, apalagi oleh para

aktivis yang menentanginya habis-habisan, karena intelijen tidak lagi bisa ditekan oleh penguasa politik untuk mematikan gerakan aktivis seperti pada masa Orde Baru. Satu-satunya hal yang bisa mendorong intelijen menjadi lebih profesional adalah dengan perangkat hukum yang komprehensif yang mengatur dunia intelijen secara terpadu, kemudian mendefinisikan struktur dan operasi lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan intelijen. Tanpa UU Intelije, sama saja kita membiarkan intelijen berjalan secara liar tanpa tuntunan dan kendali dari hukum. Ingat, intelijen mengenal prinsip kejahatan sempurna yang tidak pernah bisa diungkap penyidik manapun, tradisi ini tidak akan pernah hilang dari dada patriot intelijen. Walaupun biro penyidik sehebat FBI mengatakan *there is no such a perfect crime*, sebenarnya terlalu banyak kasus yang masuk dalam kategori *unsolved mystery*. Oleh karena itu, jangan biarkan intelijen Indonesia terperosok dalam keadaan yang serba gamang dan tanggung, salah-salah penyalahgunaan wewenang justru banyak terjadi di kala UU Intelijen itu memang diupayakan untuk tidak pernah ada, seperti yang dikonsepsikan oleh trio mantan Presiden Suharto, Bapak Yoga dan Bapak Zulkifli. Tentunya para pembaca sudah mengerti arah pembicaraan saya.....

4. Intelijen hanya mengolah data???? pengolahan data hanya sebuah unit dari sebuah organisasi intelijen. Pengolahan data tersebut juga bertingkat level-levelnya, dari olahan data kasar, pembuatan matrik, pendekatan-pendekatan analisa, kemudian akan ada semacam rekomendasi. Sementara yang melakukan operasi pencarian informasi baik secara terbuka maupun tertutup adalah unit lain, jadi jangan

dicampurdukan, ini namanya disinformasi kepada publik. Bila kemudian BIN ingin memformalkan/melegalkan unit yang diberikan wewenang penahanan, maka inipun hanya sebuah unit yang khusus sifatnya dan bisa bergerak cepat, artinya akan ada pemilihan terhadap agen-agen khusus dari kalangan sipil, anggota-anggota polisi dan TNI yang mampu melakukan pekerjaan khusus itu dengan baik dan sesuai prosedur hukum yang menjadi landasannya. Betapa kecilnya intelijen Indonesia bila hanya sebagai badan pengumpul dan pengolah informasi, kalo hanya itu berikan saja tugas intelijen itu kepada *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)* di Tanah Abang, toh itu dulu dibikin oleh orang-orang BAKIN dan orang-orang yang dekat atau direstui mantan presiden Suharto. Kurang lebih seperti CSIS itulah unit pengolah data dan analisis di lembaga intelijen dimanapun di dunia. Tetapi intelijen Indonesia tentunya tidak boleh dikerdilkan sampai sejauh itu. Sayangnya ambisi individual salah seorang penggagas CSIS yang juga orang penting BAKIN telah memisahkan CSIS sebagai think tank yang kehilangan hubungan erat dengan dunia intelijen, kecuali secara perorangan saja.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /**Saturday, November 26, 2005**

Wewenang BIN, Koter TNI, Profesionalisme Polisi, dan Yang Kurang Diperhatikan

Perdebatan soal wewenang BIN tampaknya akan menuju pada kompromi jalan tengah dimana wewenang itu tidak permanent (periode waktu tertentu) dan diatur pada kasus tertentu (bersifat khusus/particular atau tidak berlaku umum). Kita tunggu saja bagaimana revisi RUU Intelijen yang akan menjadi Undang-Undang (mudah-mudahan tidak diperlambat lagi oleh ketidaktelitian dan prasangka). Mudah-mudahan pula UU Intelijen nantinya mengatur secara keseluruhan dunia Intelijen Indonesia, artinya semua unit intelijen bisa mengacu pada UU Intelijen, disamping landasan hukum yang ada pada masing-masing induk organisasinya.

Komando Teritorial TNI tampaknya tetap hidup dan akan tetap ada dengan ruang lingkup pertahanan Negara dan tidak lagi ikut campur dalam soal keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan dilengkapi klausul bisa membantu Kepolisian RI dan Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara terbatas pada bagian dimana Polisi kekurangan sumber daya di daerah tertentu. Hal ini juga akan dibatasi oleh waktu dan sifatnya kasus per kasus. Konsekuensi berupa dukungan anggaran yang besar dari pemerintah guna membangun TNI yang kuat dan disegani Negara lain tentunya tidak bisa ditunda lagi. Termasuk pembangunan industri strategis pertahanan sebagai bentuk kemandirian dan diversifikasi sistem dan alat-alat pertahanan. Profesionalisme prajurit TNI yang dibekali pemahaman tentang

supremasi sipil (bukan dalam artian supremasi orang sipil tetapi dalam artian watak pemerintahan sipil yang demokratis).

Profesionalisme Polisi sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat tentu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Perbaikan dan reformasi organisasi Polisi yang akan mencakup aspek-aspek keamanan dan penegakkan hukum dalam masyarakat Indonesia menjadi vital dan perlu dibekali oleh pemahaman yang komprehensif tentang konsep Negara Hukum yang demokratis. Artinya proses pembersihan organisasi Polisi dari perilaku menyimpang berupa penyalahgunaan wewenang, korupsi, suap, dll seyogyanya segera dihilangkan. Meski Kepolisian RI akan semakin besar tentunya tidak berarti Indonesia akan mengarah pada Negara Polisi. Misalnya dengan terbentuknya puluhan unit kerja Polisi yang mencakup beragam bentuk penanganan kejahatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, diharapkan hal ini juga telah dilengkapi dengan system pengawasan kinerja Polisi oleh semacam Komisi dapat berjalan dengan baik.

Apa yang kurang diperhatikan dari komposisi system pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di Negara kita?

Ya, benar kita masih menantikan reformasi di bidang hukum. Dengan memberanikan diri menunjukkan jari ke arah system peradilan yang sulit dipercaya, kita bisa melihat reformasi yudisial masih terkandung-kandung dalam kompleksitas birokrasi yang begitu sulitnya dirubah oleh karena lembaga-lembaga yang terkait begitu kuatnya memproteksi dirinya. Kasus

demis kasus yang menimpa para oknum Kehakiman, Kejaksaan, Mahkamah Agung, bahkan sampai ke lembaga penjara tentunya sangat memprihatinkan, ini bukan lagi soal moral atau kurangnya gaji yang mereka terima, tetapi lebih pada kurangnya penegakan disiplin internal yang tidak ditopang oleh sanksi yang tegas dan berat.

Satu lagi kekurangan hampir menimpa semua organisasi, yaitu sifat Hangat-hangat Tahi Ayam....., maaf bila terasa kurang sopan. Tapi itulah kenyataan bahwa ketahanan dan keteguhan dalam menjalankan idealisme seringkali ambruk karena faktor mental tersebut. Marilah kita tinggalkan sifat negatif tersebut dan bersemangatlah dalam memotivasi diri pribadi maupun memotivasi organisasi untuk mewujudkan cita-cita secara berkesinambungan.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /**Tuesday, November 29, 2005**

What a story on Indonesian Intelligence

New York-based Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa draft UU yg memberikan extra power kepada BIN secara efektif akan merubah lembaga tersebut menjadi sebuah kekuatan polisionil yg bisa mengarah pada penyalahgunaan wewenang secara sistematis.

Benarkah demikian?

Pertama-tama marilah kita lihat poin-poin yg menjadi sorotan HRW, sbb:

Human Rights Watch also expressed concern over other provisions of the draft, including:

1. Violations of civil liberties. The draft gives broad and poorly defined powers to conduct surveillance, monitor and seize correspondence, and electronically monitor (bug) the conversations of those strongly suspected (diduga kuat) of involvement (terlibat) in a threat to the nation.
2. Power of summons. Article 18(b) grants intelligence operatives a broad power to summon (memanggil) any person for questioning about any issue related to a threat to the nation.
3. Warrantless searches and seizures. Article 19 empowers intelligence operatives to enter and search any building, public or private, including residences. Articles 31 and 32 empower officials to conduct raids on individuals, bodies, clothes, things,

houses or other structures and seize any objects or documents strongly suspected of being tied to threatening activities.

4. Excessive powers for BIN. Through the amorphous entity called the intelligence community, the bill in effect extends the BIN Directors power into almost every branch of government, and potentially even into civil society. This dangerously and unnecessarily extends the vast powers and the near total lack of accountability of BIN operatives to a potentially endless array of official and unofficial actors. The inclusion of the Attorney Generals office, the police, and the military in the intelligence community threatens to undermine any mechanisms for accountability that may exist in current law governing the military and law enforcement.

Catatan atas **Violations of civil liberties**, adalah sangat menggelikan bila UU intelijen yang ditujukan untuk kemandirian negara dikait-kaitkan dengan pelanggaran atas kebebasan masyarakat sipil. Sesungguhnya yg perlu dipertegas adalah atas keputusan penentuan sasaran yg diduga kuat terlibat. Mengenai metode operasi dimanapun intelijen akan memasuki ruang pribadi "sasaran yg diduga kuat terlibat". Penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan intelijen atau oleh individu yg bekerja dalam instansi BIN adalah terbuka untuk diinvestigasi baik secara internal maupun oleh lembaga ekstra yg dibentuk pemerintah. Justru karena ketiadaan UU itulah maka sampai sekarang siapapun yg "menguasai" atau memiliki akses kekuasaan dalam tubuh BIN tidak akan pernah bisa disentuh hukum. Seandainya ada aturan UU yang jelas tentu,

unsur pimpinan BIN akan bisa mempertanggungjawabkan setiap operasi intelijen di depan hukum.

Catatan atas **Power of Summon** (wewenang untuk memanggil), ini adalah yg sangat lumrah dan biasa bila aparat keamanan negara seperti lembaga intelijen melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yg diperlukan informasinya. Langkah preventif yg bisa mencegah terjadinya pemanggilan secara semena-mena adalah justru dengan adanya aturan main yg jelas dengan adanya surat pemanggilan, alasan pemanggilan, serta tidak adanya cara-cara interogasi model lama yg biasa dilakukan polisi, militer dan intelijen. Selain itu, pihak yg dipanggil, bila diperlakukan tidak sebagaimana mestinya bisa menggugat balik kepada BIN. Dalam hal ini unsur rasa keadilan menjadi landasan yg penting. BIN melakukan penyelidikan, penyidikan demi terbongkarnya suatu kasus yg membahayakan negara, saya yakin bila mekanisme kerja BIN dipercaya rakyat, justru rakyat akan dengan senang hati melaporkan setiap ATHG kepada BIN.

Catatan atas **Warrantless searches and seizures**, hal ini sangatlah mengada-ada karena mana ada intelijen yg melakukan penggeledahan di gedung atau lokasi tertentu seperti cara polisi. Apa yg dicari intelijen adalah untuk membongkar keseluruhan pola ancaman kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia dan tidak selalu pro-justisia. Sedangkan apa yg dicari polisi berhenti pada upaya penemuan barang bukti (hard evidence) yang bisa dibawa ke meja pengadilan, yg tentunya harus memenuhi syarat prosedur perolehan barang bukti tersebut. Lagi pula tidak akan ada operasi intelijen yang serta merta menggeledah dengan

terbuka sebuah sasaran, baik berupa gedung, lokasi, barang, atau properti tertentu.

Catatan atas **Excessive powers for BIN** melalui the intelligence community, lagi-lagi ini menjadi sebuah bukti ketidaktahuan publik atas apa yg namanya intelligence community di Indonesia. Perlu saya tegaskan bahwa sejak dulu BPI, LIN, BAKIN, dan sekarang BIN hampir-hampir tidak pernah bisa mengendalikan intelligence community karena intelijen institusi lain tidaklah tunduk dibawah BIN. Dengan pengecualian saat Intelijen dikomandoi oleh mantan presiden Suharto sampai dengan kepemimpinan Yoga Soegama, maka pasca Yoga boleh dikatakan intelijen sipil telah dikebiri oleh intelijen militer yang luar biasa berpengaruh dengan otaknya LB Moerdhani. Boleh dikatakan apa yg dimaksud excessive power BIN adalah individu-individu militer yg luar biasa powerful dengan segala networks, strategi, taktik operasinya terasa represif kepada rakyat Indonesia di masa Orde Baru.

Mudah-mudahan catatan kecil ini terbaca oleh pihak-pihak yg mengkritisi maupun yang tidak mengkritisi RUU Intelijen. Akhir kata, saya juga merasa perbaikan atas draft UU Intelijen tetap diperlukan guna terciptanya intelijen yang handal dalam kerangka negara demokrasi Indonesia.

Salam

Posted by Senopati Wirang /**Saturday, November 05, 2005**

Yang sesungguhnya dalam tubuh intelijen Indonesia

Sebenarnya tidak ada yg istimewa dalam tubuh intelijen indonesia, baik itu yg sipil maupun militer. Tidaklah terlalu jauh berbeda dengan organisasi intelijen di manapun di dunia.

Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam memahami dunia intelijen, khususnya untuk kasus Indonesia.

1. Upaya deteksi dini kalangan intelijen atas kasus teror di Indonesia sebenarnya tidak perlu diragukan, tetapi apa dinyana kejadian demi kejadian aksi teror terus berkelanjutan. Dimana yg salah dan ada apa dengan kinerja intelijen, benarkah mereka telah menjadi lemah, benarkah koordinasi intelijen akan menyelesaikan semuanya. Jawaban saya sederhana sekali, tidak ada yg salah dengan kinerja intelijen, juga tidak benar kalau mereka telah menjadi sedemikian lemahnya. Apa yg telah terjadi adalah keengganan kalangan intelijen untuk berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan nasional karena intelijen terus-menerus dijadikan "tempat sampah" dan "dikorbankan" oleh sistem tata negara Indonesia yg diskriminatif terhadap intelijen. Kalangan legislatif, eksekutif (kabinet) dan yudikatif di Indonesia sudah sama-sama mahfum akan minimnya anggaran intelijen, baik untuk intelijen militer maupun intelijen sipil. Kehidupan sosial prajurit intelijen sejati di Indonesia boleh dikata jauh dari makmur, mereka hidup hanya sedikit di atas upah minimum regional. Dengan pengecualian para oknum anggota intelijen yang pandai mencari kekayaan dengan penyalahgunaan informasi dan

wewenang, mayoritas anggota intelijen hidup sangat sederhana, kadang-kadang nyaris frustrasi dalam tekanan kebutuhan ekonomi (hal ini sama-sama dirasakan oleh mayoritas rakyat Indonesia). Meski demikian, hal ini bukanlah alasan utama kurang terasnya kerja intelijen. Yang lebih utama adalah dalam hal meyakinkan berbagai pihak tentang perlunya reformasi intelijen sesuai dengan nyawa/spirit intelijen universal. Pertama-tama, apa yg disebut sebagai koordinasi adalah omong kosong para cendekiawan yang merasa pintar dan anjuran para politisi yang selalu mencari dukungan dari individu-individu intelijen. BAKIN dalam sejarahnya hanya dua kali secara sukses mengkoordinir (mengkomandoi) unit intelijen lain, yaitu kasus SUSDARYANTO JOHANNES BATISTA, Pembajakan WOYLA serta mungkin operasi KOMANDO JIHAD. Mengapa BAKIN bisa mengkomandoi unit intelijen di luar BAKIN tidak terlepas dari kepemimpinan di BAKIN yang waktu itu boleh dikata luar biasa powerful.

2. Orang-orang intelijen angkatan 70 dan awal 80-an yang sekarang banyak duduk di pucuk pimpinan intelijen Indonesia adalah orang-orang terlatih yang paham betul peta ATHG bagi keamanan negara Indonesia. Meskipun intelijen juga manusia biasa, saya sangat ragu bila deteksi dini yang mereka lakukan tidak kena sasaran. Yang mungkin terjadi adalah pada satu sisi, kekecewaan yang sangat mendalam dari sebagian besar kalangan intelijen yang diremehkan oleh berbagai kalangan. Sedangkan di sisi lain, ada pemanfaatan rasa frustrasi tersebut oleh orang-orang yang paham peta intelijen Indonesia untuk menciptakan suasana "kurang aman" atau untuk

menciptakan prestasi individual pimpinan tertentu. Persaingan antara pimpinan unit-unit intelijen di level menengah jelas sangat tidak sehat bagi kinerja organisasi. Tetapi itulah hal yang lumrah dan normal dalam dunia intelijen yang nyaris tidak mengenal teman dan dalam situasi tidak saling mempercayai. Singkatnya, gembor-gembor intelligence community yang seolah-olah sangat berpengaruh dan memiliki nilai penting dalam memahami kekuatan inti intelijen Indonesia adalah jauh dari kebenarannya. Tidak pernah benar-benar ada koordinasi antar unit-unit intelijen, bahkan secara individual pun terjadi saling tertutup dalam penanganan kasus intelijen. Hal ini sangat lumrah karena prinsip kompartementasi dan penerapan operasi sel hitam masing-masing. Dengan demikian, ide-ide cemerlang yang didasarkan pada pola kerjasama atau koordinasi antar unit intelijen adalah buang-buang waktu, karena secara alamiah intelijen akan mengalir kembali dalam pola individualistik, masing-masing. Bilapun terjadi koordinasi hal ini hanya pada bagian terluar saja, tidak akan pernah menyentuh intisari kerja intelijen itu sendiri, hal ini sangatlah prinsip.

3. Kembali pada penilaian mengapa intelijen (militer dan sipil) seperti hanya menantikan meledaknya ancaman demi ancaman adalah lebih dikarenakan arogansi Kepolisian yang seolah-olah menjadi agen tunggal penjaga keamanan negara dan disahkan oleh undang-undang. Arogansi yang akan menyeret Indonesia ke dalam kesinambungan aksi teror demi aksi teror. Meskipun kepolisian akan terus memperkuat dan membenahi unit intelijennya dengan bantuan FBI, Interpol, Kepolisian Australia, Jerman, dst-dst dengan limpahan bantuan

teknis, dana, serta pelatihan. Hal itu tidak akan pernah bisa menyamai sifat kerja alamiah intelijen militer maupun intelijen sipil non kepolisian (baca BIN beserta unit operasi dibawahnya). Intelijen yang sesungguhnya tidak pernah mengharap popularitas bila berprestasi dan siap mendapat caki-maki bila gagal, dengan puncaknya mengorbankan diri demi negara, bangsa dan organisasi. Sangatlah berbeda dengan model operasi polisi (setertutup apapun) selalu mengharap liputan media dan berakhir dengan pujian dan kenaikan pangkat bila berprestasi. Yang lebih penting lagi adalah prinsip pro-justisia dengan tujuan pembuktian dengan barang bukti dan legalitas operasi dengan adanya surat dari Mabes Polri. Sementara intelijen akan sangat minimal dalam soal prinsip yang dianut polisi. Tujuan intelijen-pun boleh dikata sangat berbeda karena tidak melulu taktis jangka pendek dengan tema pengungkapan kasus, melainkan lebih pada menjaga kesinambungan strategi keamanan nasional jangka panjang.

Mudah-mudahan asumsi saya dalam menilai intelijen indonesia tidaklah tepat, karena hal ini sangatlah kritis dan harus segera diatasi bila benar adanya.

Posted by Senopati Wirang /**Monday, November 07, 2005**

CIA di mana-mana, Fakta atau Imajinasi?

Dalam sejumlah operasi penangkapan terhadap kelompok yang diduga sebagai teroris sering terdengar adanya keterlibatan CIA. Dalam polemik penangkapan Al Farouq di Bogor misalnya, ada dugaan-dugaan keterlibatan CIA, bahkan diduga Al Farouq yang konon "kabur" sebenarnya orangnya CIA. Dalam penangkapan/penculikan Hassan Mustapha Osama Nasr alias Abu Omar di Italia, lagi-lagi CIA disebut-sebut ikut aktif dalam aksi tersebut. Lucunya Washington Post menyebutkan pemerintah Italia merestui kegiatan CIA tersebut.

Inilah yang disebut dunia propaganda yang terus-terusan mencitrakan CIA sebagai organisasi intelijen yang mampu menjangkau seluruh dunia, mengawasi dan bahkan bisa membekuk siapapun yang bersikap anti Amerika. Bila kita bandingkan berita Washington Post, cerita penangkapan Al Farouq dengan film *the spy game*, kita akan sedikit melihat adanya benang merah propaganda unilateralisme Amerika sebagai adidaya tunggal di dunia. Dalam *spy game* yang dibintangi Brad Pitt tersebut kita bisa lihat China sebagai salah satu sasaran operasi CIA, dan tentunya dalam film tersebut CIA "mampu" mengatasi krisis atas terbongkarnya sebuah kegiatan mata-mata.

Propaganda antara kenyataan/fakta dan ilustrasi/imajinasi terus-terusan dihembuskan dalam rangka menjaga hegemoni Amerika. Sangat sulit untuk membantah propaganda yang dikeluarkan oleh Washington Post karena percampuran antara fakta dan rekayasa berita begitu halusny.

Sejumlah tokoh Indonesia pernah berurusan dengan Washington Post dalam soal pemberitaan yang mencitrakan sifat negatif tertentu. Menurut informasi dari seorang rekan wartawan di Washington Post beberapa tahun silam. Pimpinan intelijen negara masa Megawati, Bung Hendropriyono hampir saja diberitakan sebagai tokoh di belakang gerakan radikal Islam alumni Afghanistan, khususnya yang terkait dengan Lasykar Jihad. Tetapi dalam konfirmasi dengan Bung Hendro, Washington Post malahan ditantang untuk melansir berita tersebut dan Bung Hendro menanti dengan santai....kenapa, karena itu bukan fakta melainkan imajinasi intelijen dan Bung Hendro bisa melipatgandakan kekayaannya dengan melakukan tuntutan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah. Akhirnya Washington Post membatalkan berita "imajinasi" tersebut.

Asik bukan mendengar cerita-cerita propaganda dan seluk beluknya. Untuk konfirmasi saya tidak bisa menyebutkan nara sumber di Washington Post. Tetapi bagi yang ada di Indonesia, silahkan tanyakan kepada Pak Hendropriyono, apakah saya berbohong atau tidak.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /**Thursday, December 08, 2005**

FREEDOM OF INFORMATION ACT

Pendapat pro-kontra yang diceritakan seorang sumber kepada saya atas isi RUU Kebebasan Informasi yang ada di Indonesia, membuat saya merasa perlu menyampaikan bahwa di era Indonesia yang demokratis, UU Kebebasan Informasi itu tetap penting. Hanya saja perlu diperhatikan sisi-sisi yang bersinggungan dengan aspek keamanan dan pertahanan nasional. Hal ini saya yakin sudah dimaklumi oleh pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dasar hukum yang proporsional untuk bidang-bidang yang saling bersinggungan. Penyusunan UU di atas idealisme ekstrim tentunya kurang baik, lagipula orang Indonesia sudah biasa menempuh jalan tengah dengan musyawarah dan mufakat.

Untuk rekan-rekan yang ingin mempelajari dan sedang membahas RUU Kebebasan Informasi bisa membandingkan pembahasan yang ada di Indonesia dengan Freedom of Information Act and Privacy Act handbook melalui link dibawah ini.

FREEDOM OF INFORMATION ACT & PRIVACY ACT HANDBOOK MAY 2002

Posted by Senopati Wirang /**Saturday, December 17, 2005**

Indonesia target Amerika Serikat dan 60 ribu intel asing?

Kemarin saya menerima forward cerita tentang bagaimana Amerika Serikat mengobok-obok Indonesia, bagaimana sejumlah negara asing mengincar pulau-pulau di nusantara, dan juga tentang keberadaan 60 ribu intel asing di Indonesia. Hanya satu pertanyaan singkat yang disampaikan yaitu benarkah berita/analisa tersebut?

Cukup lama saya merenung dan membuka-buka lembaran informasi yang saya kumpulkan. Sulit memang meraba-raba nilai kebenaran informasi dan akurasi analisa. Misalnya begini, sumber utama yang senantiasa mengobarkan sentimen bahwa AS sedang menabuh genderang neo-kolonialisme modern di media massa adalah Saudara DR. AC Manullang. Dengan argumentasi pola propaganda white, grey and black yang menimbulkan ketidakjelasan tersebut saudara Manullang menambah ketidakjelasan yang dia sendiri mungkin mulai bingung memilah-milahnya. Percampuran fakta, analisa, opini, dan imajinasi sangat kuat dalam hampir setiap pandangan saudara Manullang. Adalah sangat disayangkan karena pendapat-pendapat saudara Manullang tersebut selalu demikian, andai saja saudara Manullang lebih berani melakukan klasifikasi dan memisahkan fakta dengan imajinasi/rekayasa analisa, saya tentunya akan sangat menghormati pendapatnya. Karena cerita yang sempat ramai pada sekitar bulan Maret 2005 tersebut tetap berada dalam ruang lingkup yang kontroversial, tidak ada salahnya bila saya meluangkan waktu untuk melakukan klasifikasi isu-isu yang berputar di sekitar dunia politik

internasional Indonesia, sbb: (Saya akan awali dengan imajinasi dan diakhiri dengan fakta-fakta).

1. 60 ribu intel asing beroperasi di Indonesia. Data ini merupakan imajinasi yang boleh dinilai tidak ada dasarnya sama sekali. Jumlah negara di dunia ada sekitar 240-an itupun dengan berbagai status, mulai dari member states of UN, Un recognized, non-UN recognized, unrecognized defacto independent, sovereign but not defacto independent, dependent territories, recognized by international treaty, UN Protectorate, dan mungkin masih ada status lainnya. Jumlah terbesar yang benar-benar sovereign dan aktif dalam politik internasional mungkin dibawah 200. Jadi, anggap saja seluruh 200 negara tersebut memiliki kepentingan di Indonesia, bila dibagi rata maka $60 \text{ ribu} / 200 = 300$ intel dari setiap negara. Pembagian ini tentunya tidak masuk akal, baik.... untuk negara sedang/menengah mungkin secara maksimal hanya mengaktifkan sekitar 5 s/d 30 agen, sedangkan untuk negara kecil dibawah 5 orang untuk setiap negara, bahkan ada negara yang tidak mampu mengirimkan agennya ke luar negeri karena terlalu mahal. Apakah berarti negara besar seperti AS mengoperasikan ribuan agen di Indonesia? bila ini yang anda percayai silahkan saja.....Untuk kasus Indonesia sangat mudah untuk melakukan penelitian misalnya ke Dirjen Imigrasi untuk mengetahui berapa banyak orang asing yang berkunjung atau menetap di Indonesia dan apa tujuan keberadaan mereka di Indonesia, lalu kita lihat

jumlah 60 ribu intel asing itu mencapai berapa persen dari keberadaan orang asing di Indonesia. Bandingkan dengan analisa tentang Intel People Republic of China (PRC) yang dikenal sebagai negara yang paling banyak menyebar intel ke luar negeri. Menurut perkiraan FBI, PRC telah mengaktifkan sistem operasi intelijen massal dengan pola pengumpulan serpihan informasi. PRC tidak mengirim agen ke luar negeri, melainkan melakukan rekrutmen ke kalangan Chinese Overseas. Inipun jumlahnya baru mencapai ribuan untuk beroperasi di negara seperti Amerika Serikat. Lalu kepentingan apa ada 60 ribu intel di Indonesia? akan lebih masuk akal bila dikatakan intel asing melakukan proses rekrutmen ke kalangan tertentu yang potensial dari masyarakat Indonesia.

2. Grand Strategy Amerika Serikat terhadap Indonesia. Benar bahwa ada grand strategy Amerika terhadap Indonesia. Tetapi yang penting adalah apa isi grand strategy tersebut? apa benar karena Indonesia mayoritas Islam lantas ada sentimen untuk terus-terusan menekan Indonesia dengan dasar analisa koalisi Yahudi-Kristen plus agenda kapitalisme internasional. Kapitalisme internasional bisa berjalan bersama-sama konsep liberal tanpa adanya dukungan gerakan Yahudi maupun Kristen, hal ini cuma memperdalam permusuhan lama yang dibawa oleh sejarah. Apa yang mendasari grand strategy Amerika tentunya kepentingan nasional yang diperluas dalam politik luar negeri. Penguasaan SLOC (garis navigasi laut) di wilayah Indonesia, jaminan penguasaan sumber-sumber alam penting berupa gas,

minyak dan emas, serta berkiblatnya Indonesia ke Amerika adalah agenda terpenting yang mendasari politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia. Peranan intelijen dalam kaitan tersebut sangatlah penting, khususnya dalam analisa perkiraan keadaan nasional Indonesia, serta yang lebih vital lagi dalam memproyeksikan masa depan Indonesia. Tidak diperlukan ribuan agen untuk mendorong apa yang sudah terjadi dan akan terjadi di Indonesia, tetapi hanya pengungkit kecil yang mampu menggulingkan keseluruhan gulungan sejarah Indonesia.

3. Kasus radikalisme Islam. Saya hanya ingin memastikan kepada segenap pembaca bahwa kasus radikalisme Islam adalah salah satu bentuk pengungkit persoalan yang saya maksud dalam poin 2. Peranannya sangat vital dalam hal untuk mengembalikan kemesraan hubungan Indonesia-AS, tidak ada yang kehilangan muka dalam pecairan program IMET, tidak ada yang menelan ludah dalam pencabutan embargo militer AS. Ke depan diharapkan hubungan Indonesia-AS semakin erat sebagai partner strategis menghadapi kebangkitan China yang akan segera menjadi negara superpower. Tetapi Indonesia lagi-lagi mengulangi sejarah Orde Lama maupun Orde Baru dengan memainkan kartu diversifikasi hubungan luar negeri dengan alasan independensi dan harga diri serta kekhawatiran tergantung pada satu negara superpower. Inilah sebabnya isu gerakan radikal Islam (yang sebenarnya masalah kecil yang akan segera habis popularitasnya) masih saja ada.

4. Fakta bahwa hampir seluruh kebijakan luar negeri AS bisa direferensikan ke hasil studi dari the Brooking Institute, RAND, serta sejumlah lembaga penelitian yang ada di universitas terkenal di Amerika menunjukkan bahwa isu terpenting adalah dalam soal penguasaan power, militer, politik, ekonomi. Baik kaum neocon, liberal, maupun realist Amerika Serikat sedang memperhitungkan sebuah kalkulasi jangka panjang yang menjamin dominasi AS di dunia internasional. Motivasi power tersebut begitu kuatnya, sedangkan motivasi sentimen keagamaan hanya mengikuti dibelakang, inipun karena masyarakat Amerika ternyata termasuk menganggap penting soal agama bila dibandingkan dengan masyarakat Eropa.
5. Akan lebih tepat bila dikatakan bahwa Amerika Serikat sangat mendambakan sikap Indonesia yang pro-AS. Lihat misalnya Malaysia, meskipun Mahattir pernah dianggap sebagai tokoh yang "berani" dari Asia Tenggara, sebenarnya tidak ada artinya sama sekali bila dibandingkan dengan kejujuran politik luar negeri Indonesia dibawah Sukarno yang sungguh-sungguh anti kolonialisme, anti hegemoni dan non blok. Sikap Indonesia yang jauh lebih jujur dalam soal nilai-nilai kemanusiaan internasional inilah yang ditakutkan muncul kembali pasca 1998 yang berarti kedaulatan kembali ke tangan rakyat dari pemilu langsung. Rakyat Indonesia juga terkenal di dunia dengan konsep amook (amuk massa) yang selalu berpihak kepada pihak yang tertindas. Meskipun rakyat Indonesia mudah dihasut kesana kemari, ketika kemajuan pembangunan dan tingkat pendidikan semakin tinggi,

potensi kepemimpinan regional Indonesia tidak akan pernah hilang.

6. Soal pulau-pulau Indonesia yang dincar asing memang benar adanya, hal ini terinspirasi dari kelengahan dan ketidakmampuan Indonesia menjaga dan mengelola pulau-pulautersebut secara efektif. Untuk yang ini berhati-hatilah serta perkuatlah Angkatan Laut Republik Indonesia.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /**Thursday, December 15, 2005**

Kemandirian Sistem Pertahanan dan Keamanan

Pasca pencabutan embargo perlengkapan dan suku cadang militer dari Amerika baru-baru ini, pemerintah Indonesia tampaknya segera merespon dengan sejumlah rencana belanja untuk memulihkan kekuatan militer kita. Meski Panglima TNI menyatakan akan tetap melanjutkan diversifikasi sumber alat utama sistem pertahanan (alusista), tak urung kita tetap akan menatap masa depan ketergantungan dengan negara asing, Amerika, Russia, Australia, China? negara manapun yang menjadi sumber, kita sebagai pembeli akan tetap tergantung dengan sikap penjual.

Kurang maksimalnya strategi pertahanan dalam politik luar negeri Indonesia telah menyebabkan rendahnya kepemilikan teknologi peralatan militer kita. Maksud saya, kita kurang memaksimalkan situasi perang dingin untuk kepentingan nasional dan lebih banyak bermain-main dalam "arogansi" kepemimpinan politik diplomasi di region ASEAN ketimbang merealisasi pembangunan militer yang disegani di kawasan. Bertahun-tahun saya mendambakan adanya "proyek rahasia" pembangunan teknologi militer yang mandiri hasil karya bangsa sendiri. Namun yang saya temukan cuma industri strategis yang dikelola secara kurang profesional dan bahkan cenderung menggerogoti anggaran negara. Lebih menyedihkan lagi bila kita melihat bahwa komitmen pemerintah dalam strategi pembangunan industri militer sangat minimal. Saya perkirakan bila kondisi pasca Orde Baru ini terus berlanjut tanpa komitmen yang jelas dalam peningkatan kapabilitas militer kita, maka Indonesia akan semakin diremehkan dalam forum regional apalagi internasional.

Benar, militer tidak seharusnya terlalu dominan dalam sistem pemerintahan sipil yang demokratis. Tetapi hal ini tidak berarti peningkatan kapabilitas militer diabaikan dan bahkan strategi pembangunan militer menjadi tidak jelas. Kemudian persoalan HAM juga penting, tetapi hal ini tidak untuk mengkerdilkan militer atau memarjinalkan peranan militer dalam pembangunan bangsa.

Seorang aktivis yang tampaknya anti militer pernah mengungkapkan bahwa militer adalah preman yang dibayar oleh rakyat melalui pajak, dan militer secara resmi dipersenjatai. Lalu bagaimana mungkin kita sebagai rakyat tidak "benci" dengan tindak tanduk militer yang melukai rakyat. Saya hanya tersenyum, dan berpikir sejenak. Barangkali tuduhan tersebut ada benarnya namun tidak sedikit kekeliruan. Mengapa terjadi generalisasi bahwa militer melukai rakyat. Ada kepentingan apa dibalik pencitraan negatif militer Indonesia tersebut.

Pendapat yang lebih obyektif bisa kita lihat pada hampir semua pengamat asing yang diawali oleh Kahin (George McTurnan Kahin dari Cornell University) dan Clifford Geertz, kemudian Ben Anderson (AS), Daniel S Lev (AS), Herbert Feith (Australia), Harold Crouch (Australia), kemudian William Liddle (AS), lalu belakangan Douglas E Ramage Adam Schwarz, Damians Kingsbury, dst...dst. Masih banyak lagi pengamat asing lain yang pada umumnya memiliki cara pandang yang perlu kita perhatikan sebagai bangsa dan negara yang sedang diamati/diteliti. Jangan cuma

mengeluarkan kritikan pedas tanpa ada dasar penelitian yang mendalam serta disertai oleh argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Analisa tanggung yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditujukan untuk menjustifikasi kesimpulan negatif yang merugikan sebagian atau keseluruhan komponen bangsa Indonesia sudah selayaknya dipertanyakan dan diperdebatkan, bila terbukti salah alamat maka wajib ditolak. Sayangnya jarang ilmuwan atau akademisi Indonesia yang berkomitmen untuk itu. Lakukanlah analisa dan penelitian serta bila mungkin berteorilah dalam semangat memajukan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam bidang militer misalnya karya Crouch, "The Army and Politics in Indonesia" tentunya perlu menjadi rujukan untuk mempelajari kelemahan dan kekuatan yang sudah dibangun dalam sejarah militer dan politik nasional Indonesia. Bagaimana ke depan, tentunya kita tidak ingin terus-terusan hanya menjadi obyek penelitian karena begitu banyaknya "keanehan" atau masalah sehingga menarik untuk diteliti oleh orang asing. Sudah waktunya kita secara mandiri menciptakan atau melakukan proses kreatif sebagai bangsa merancang masa depan yang lebih cerah.

Kembali pada soal kemandirian sistem pertahanan dan keamanan, adalah sangat perlu untuk mengkritikalisasi blue print industri militer nasional Indonesia menjadi bagian dari strategi pembangunan militer jangka panjang. Secara ekonomis, harus diakui dalam 5-10 tahun ke depan, kita sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada negara asing dalam hal peningkatan sistem persenjataan nasional kita. Namun setidaknya

diperlukan keyakinan dan komitmen perencanaan mulai dari tahun ke sebelas untuk segera merealisasi kemandirian dalam industri pertahanan. Dalam jangka menengah 5 tahunan industri small arms kita seharusnya bisa ditingkatkan secara bertahap. Bayangkan saja, saya sangat sedih ketika melihat begitu banyaknya butiran peluru produksi PT. Pindad yang "ket/cat" alias macet. Lalu bagaimana juga dengan industri dinamit PT. Dahana yang memproduksi dinamit yang kadang meledak kadang melempem. Mungkin di tahun 2000an ini sudah membaik, tapi sejauhnyanya saya ragu karena hantaman krisis ekonomi tentu juga akan berpengaruh.

Saya membayangkan parjurit TNI tidak lagi perlu mengandalkan M16 dan kita ganti dengan senjata semi otomatis bernama pasopati. Saya juga memimpikan bahwa senjata serbu Uzi yang pernah saya pakai dulu dibuang saja dan diganti dengan senjata serbu kunta, dst...dst. Meskipun saya yakin kemampuan industri small arms Indonesia sudah mulai mantap, tetapi bila dilakukan perbandingan dengan perkembangan industri senjata sejenis di luar negeri, sulit rasanya saya meyakini bahwa produk kita telah 100% berkualitas sama. Inilah sebabnya diperlukan adanya angka perbandingan kenaikan anggaran militer sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Komitmen untuk mematok perbandingan rasional antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan anggaran militer adalah wajib. Tetapi yang lebih wajib lagi ada ketepatan analisa dalam pilihan prioritas sektor mana yang akan dikembangkan terlebih dahulu.

Ini saya tulis karena agak kesal dengan sikap sejumlah kalangan yang

kurang mengerti pentingnya militer bagi sebuah negara. Ini saya tulis juga karena berharap peningkatan kapabilitas militer adalah berada dalam jalur profesionalisme dan dalam kerangka sistem pemerintahan yang demokratis. Artinya, apapun pandangan saya perlu didebat oleh publik terlebih dahulu.

Mudah-mudahan saudara/saudari yang mengirim e-mail soal hankam kepada saya bisa melihat sikap saya secara obyektif.

Sekian

Posted by Senopati Wirang / **Friday, December 09, 2005**

Memperkuat Intelijen BNN dan Intelijen Pajak

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Jenderal Pajak adalah dua institusi yang perlu memiliki intelijen aktif yang kuat serta berkesinambungan dalam melakukan operasi di bidang masing-masing.

Bahaya narkoba tidak kalah penting dibandingkan dengan bahaya terorisme. Sementara potensi kerugian negara dari penggelapan pajak tidak kalah kecil dibandingkan dengan kasus korupsi.

Meski saya yakin baik BNN maupun Dirjen Pajak sudah melangkah maju dalam membangun struktur unit intelijen di dalam organisasinya, namun perlu kiranya didukung lebih jauh proses penguatan unit intelijen di dalam kedua institusi tersebut.

Lebih jauh BNN yang meskipun bertanggungjawab kepada Presiden adalah dikepalai oleh Kapolri, adalah lebih mudah dalam menciptakan unit operasi yang handal dengan dukungan personel polisi. Barangkali yang perlu diperkuat adalah citra operasi khusus BNN yang bersih dari penyalahgunaan wewenang. Karena polisi secara umum masih menyimpan citra negatif karena kelakuan sejumlah oknum personel yang melanggar hukum di wilayah tugasnya.

Lalu bagaimana dengan Dirjen Pajak? perlu digagas wewenang unit intelijen pajak dalam turut serta menegakkan hukum sebagai langkah antara untuk dilanjutkan oleh Kepolisian.

Proses penguatan unit intelijen di kedua institusi di atas adalah sangat vital bagi peningkatan performance organisasi. Hal ini lebih lanjut juga diikuti oleh profesionalisme dan pengawasan serta sistem internal security guna mencegah timbulnya penyalahgunaan wewenang.

sekian.

Posted by Senopati Wirang /**Saturday, December 17, 2005**

Penjelasan Logis dari pernyataan Ka B.I.N.

Sebelumnya blog I-I menyatakan no comment untuk B.I.N. yang overexposed, mengapa? karena berarti saya mengomentari sebuah polemik komentar yang tercipta oleh kejelian media massa membidik sebuah issue. Contohnya MIOL yang mengangkat editorial berjudul BIN yang "overexposed".

Akan lebih obyektif bila saya langsung saja mencoba mencari logika dari komentar yang terlontar dari pimpinan B.I.N.

1. Soal pernyataan tentang penyusupan intelijen ke pesantren-pesantren untuk mendeteksi gerakan teroris. Mengapa sebuah penyusupan diumumkan ke publik, apalagi dengan pihak Kepolisian juga sedang berkembang polemik soal sidik jari para santri. Aneh bukan? apakah ini hanya banyak cakap yang tidak berarti? Sungguh saya melihatnya tidak demikian, saya segera melihat bahwa sedang berlangsung operasi penyelidikan yang justru tidak menargetkan pesantren, sayangnya pelemparan polemik itu terlalu tajam bagi telinga umat Islam, sehingga tampak kontraproduktif dan menuai badai kritik yang bertubi-tubi. Tetapi tidak masalah, yang terpenting pekerjaan nyata intelijen mengejar tersangka kelompok teroris berkedok Islam terus berlanjut.
2. Soal pengalihan strategi kelompok teroris dari aksi teror bom ke penculikan termasuk dengan target presiden dan keluarga dan sejumlah pejabat. Dari berbagai opini yang berkembang di

masyarakat, saya nilai 50% percaya dan 50% tidak percaya. Kelompok yang percaya pada umumnya berada dalam lingkaran yang bersimpati kepada presiden sementara yang tidak percaya tentu saja dari kelompok oposisinya (kritis dan tidak terlalu simpati kepada presiden). Seperti pernah saya tulis sebelumnya Bom menyambut tahun baru 2006, informasi ini tidak boleh diremehkan. Perkara kemudian dipermanis dengan sejumlah pernyataan yang didramatisir, itu lain soal. Sayangnya memang hal ini terlalu tergesa-gesa dan tampaknya belum melalui analisa yang lebih mendetail. Hal ini tentu saja mengundang pancingan untuk pihak-pihak yang tidak simpati kepada presiden untuk berkomentar bahwa itu semua sebagai sebuah upaya mengangkat popularitas SBY atau upaya politis yang hampa unsur sekuritinya. Apalagi seperti saya pastikan dalam artikel Bom, taktik teror bom belum berakhir dan taktik lainnya masih sebatas wacana.

3. Soal para teroris bergerak dari dan ke luar Jawa dalam mencari sasaran tidaklah terlalu istimewa. Hampir boleh dikata pernyataan ini sangat umum dan cenderung mencerminkan ketidakpastian dimana lokasi teror akan terjadi.
4. Soal mengusut motif Eggy Sudjana melapor ke KPK tentang rumor pemberian mobil Jaguar kepada orang-orang ring satu Presiden oleh pengusaha Harry Tanoesoedibyo. Saya yakin ini refleksi pribadi dari pimpinan yang lepas dari kinerja profesional dan analisa institusi intelijen. Hal inilah yang paling disedihkan kalangan profesi intelijen yang seumur hidup bekerja tetapi harus nrimo disamaratakan dengan sikap pimpinan yang seumur

jagung (masa jabatan sesuai kehendak presiden). Tetapi inilah satu-satunya penjelasan logis dari sikap seseorang yang begitu dekatnya dengan presiden dalam melakukan "pembelaan".

Apakah dari komentar-komentar tersebut BIN overexposed? antara iya dan tidak. Justru media massa termasuk blog I-I ini yang bisa mencitrakan BIN overexposed. Sementara itu, saya pribadi tidak meremehkan langkah-langkah pimpinan BIN yang sekarang, Syamsir Siregar, karena di dunia intelijen cukup diakui kepiawaiannya. Lebih jauh, saya justru melihat ada "sesuatu" yang positif antara media yang mengangkat isu BIN dengan BIN, sesuatu yang tidak akan saya bahas.

Publik bisa mencaki-maki intelijen vis a vis BIN, publik berhak mengkritisi BIN dari apa yang kelihatan, publik juga bebas menilai dari berbagai sudut tentang kinerja intelijen yang seringkali hanya diukur dari kegagalan deteksi dini. Apakah apa yang kita lihat dan dengar dari permukaan muka BIN melalui jajaran pimpinannya bisa mencerminkan isinya? Saya kira sebagian besar insan intelijen hanya tersenyum sambil menikmati kopi hangat di tengah malam dalam rangka menjaga mata yang semakin mengantuk, sebagian lagi mengurut dada melihat citra semu yang tercipta dari dugaan-dugaan publik, sebagian lagi (yang sedang menaruh resiko nyawa karena tugas penyusupan) bahkan tidak tahu bahwa kantornya sedang diekspos oleh penilaian-penilaian media massa dan publik.

Mudah-mudahan rekan-rekan insan intelijen membaca dan tidak ambil pusing dengan polemik yang sedang terjadi. Pekerjaan di depan mata tak

pernah ada habisnya, tak akan ada pujian untuk keberhasilan dan caki-maki menanti untuk kegagalan berikutnya.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /**Friday, January 06, 2006**

Do not fall in love with your agent !!!

Melanjutkan refleksi nasehat untuk para agen muda, berikut ini saya sampaikan satu pesan sakral turun temurun yang hampir selalu menjadi salah satu batu ujian terberat seorang agen rahasia, yaitu bertahanlah dari godaan untuk jatuh cinta di tengah-tengah tugas.

Terlepas apakah anda masih bujangan ataukah sudah berkeluarga, sangatlah berbahaya bila anda yang baru memulai karir di dunia intelijen tidak mampu mengendalikan gelora asmara yang mudah terpercik di hati manusia yang "terpaksa" sering berkelana seorang diri.

Kesepian dan kebutuhan akan komunikasi dengan seseorang yang memahami pekerjaan agen rahasia merupakan dasar dari semua gejala bangkitnya keahlian seorang agen rahasia memikat calon partner yang diincarnya. Pada gilirannya hal ini akan menjerumuskan pada perilaku playboy ala James Bond, atau yang paling kampungan adalah kawin lagi atau selingkuh tanpa sepengetahuan Istri/Suami, atau untuk yang bujangan adalah munculnya kebiasaan buruk gonta-ganti pasangan dan ketagihan akan kebebasan.

Kesemua itu akan dengan segera mengakhiri karir dan masa depan seorang agen rahasia. Cerita fantasi romantisme seks bebas ala James Bond hanya ada dalam khayalan porno masyarakat barat. Lebih jauh lagi, cerita novel ataupun film-film spionase hampir selalu dibumbui cerita erotis yang jauh dari fakta "menyenangkan". Petualangan romantis dan terwujudnya fantasi seksual dalam dunia spionase memang banyak

didukung oleh situasi dan kondisi. Namun hal itu juga sekaligus menjadi sarana atau alat jebak yang sangat efektif oleh pihak musuh. Teknik pemerasan oleh KGB dengan memanfaatkan rekaman adegan kencan agen rahasia lawan selama era perang dingin tentunya bisa menjadi salah satu contoh.

Dalam kisah-kisah klasik intelijen seringkali digambarkan seorang *Case Officer (CO)* jatuh cinta dengan agen (informan) yang dilatihnya. Sebenarnya nasehat tersebut tidak hanya untuk level *CO*, melainkan juga untuk para pendatang baru agar segera memahami situasinya.

Jatuh cinta adalah hal yang manusiawi dan wajar sepanjang hal ini sungguh-sungguh disalurkan untuk niat dan cita-cita yang luhur berupa tali pernikahan. Tetapi ketika jatuh cinta diobral maka tidak akan lebih dari lahirnya persoalan demi persoalan, seperti lagu *too much love will kill you* dari kelompok Queen. Dalam dunia intelijen, resiko kematian akibat mengobral cinta dapat diartikan dengan matinya kesiagaan menghadapi pendudukan pihak lawan, matinya kemampuan analisa secara jernih bila ada faktor X "yang dicintai", atau matinya pertimbangan dalam menentukan keputusan yang tepat. Itulah sebabnya saya katakan pada bagian awal, janganlah jatuh cinta dengan seseorang ketika kita sedang bertugas.

Tugas apapun yang diamanatkan dari kantor pusat adalah menjadi prioritas pertama. Faktor godaan harta dan cinta diyakini oleh mayoritas profiler lembaga intelijen di seluruh dunia sebagai faktor yang bisa

menggeser keutamaan tugas dari kantor pusat. Kedua faktor tersebut saling mengisi dengan faktor yang juga tidak kalah pentingnya yaitu keyakinan ideologi.

Namun berbeda dengan faktor keyakinan/ideologi, faktor cinta bisa muncul secara spontan dan tanpa proses panjang. Unsur kejutan dari faktor cinta adalah menduduki peringkat pertama dalam kasus-kasus desersi seorang agen rahasia. Itulah sebabnya lembaga-lembaga intelijen di seluruh dunia sangat memperhatikan faktor kehidupan pribadi setiap agennya dengan menyediakan jasa konseling, agar tercipta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Para agen yang handal tentu saja berusaha mati-matian untuk tidak pernah masuk dalam ruang konseling, karena hal ini tentu berarti MASALAH.

Sekedar catatan ringan

Bayangkan sendiri, bila anda seorang agen muda (laki-laki) sedang bersekolah di kantor CIA - Langley, USA. Berkenalan dan kemudian akrab dengan seorang wanita yang kecantikannya merupakan dambaan khayalan masa anda SMA. Si wanita-pun bersambut dan membuka dirinya dengan bebas untuk anda.... apa yang akan anda lakukan?

Tidak akan terlalu banyak beda antara yang sudah menikah ataupun bujangan, kedua-duanya akan mengalami pertarungan bathin yang amat sangat hebat, sampai-sampai tugas belajarnya terganggu. Ohhh cantik sekali dalam hati bergumam, kapan lagi ada kesempatan yang luar biasa

ini. Akal dan rasio mulai goyah dan penilaian-pun mulai kabur antara batasan logis dan emosi nafsu.

Kesendirian dan pertimbangan "tidak ada yang tahu" terus menggoda dan menggoda untuk menceburkan diri dalam perbuatan yang akan segera mengakhiri masa depannya di dunia intelijen. Mengapa demikian? karena itulah salah satu ujian yang dilakukan CIA kepada agen-agen handalnya. Mungkin akan terasa aneh, agen CIA punya "moral"? saya jawab benar begitu adanya...mereka telah dilatih untuk tidak cepat terjerumus dengan jebakan cinta. Karena disamping motif uang, cinta merupakan motif yang kuat untuk mendorong seorang agen melakukan pembelotan atau desersi.

Bagaimana dengan agen muda Indonesia?

Disamping pedoman umum dari kantor pusat dan pertimbangan masa depan keluarga, bagi agen-agen muda Indonesia, saya ingatkan keberadaan sejumlah filter yang bisa melindungi, yaitu keyakinan agama dan moralitas serta rasa malu. Bila itu dipelihara baik-baik dalam mengemban tugas negara...maka godaan sehebat apapun mudah-mudahan akan berlalu.

Pesan ini khusus disampaikan buat adik-adik yang sedang bertugas dan berhadapan langsung dengan godaan cinta.

Posted by Senopati Wirang / **Thursday, February 23, 2006**

Jangan jatuh cinta???

hari ini saya senang mendapat teguran dari rekan sejawat yang mengkritik tulisan Do not fall in love with your agent. Karena teguran tersebut mengungkit kejujuran dan kebenaran cerita seutuhnya.

Baiklah....

Memang benar CIA itu tidak bisa dinilai bermoral atau tidak bermoral secara sepintas lalu, cerita saya sebelumnya seolah-olah menggambarkan agen-agen CIA yang telah lolos dari proses pendidikan adalah mereka yang mampu mengendalikan perasaan dan selalu bersikap profesional. Cerita itu cuma karangan saja...pada intinya pesan saya sangat sederhana dan langsung saya tujukan kepada segenap anggota komunitas intelijen Indonesia.

Saya merasa ini sangat perlu karena saya mendeteksi kasus demi kasus cukup mengganggu pengembangan profesionalitas insan intelijen Indonesia. Khususnya buat mereka yang bertugas di luar negeri.

Berbeda dengan kasus cinta lokasi celebritis Indonesia yang hanya berdampak pada kehidupan pribadi dan keluarga, maka cinta lokasi buat insan intelijen adalah kesalahan fatal yang tidak termaafkan, karena dampaknya mencakup pada kinerja dan tidak tercapainya tujuan dari tugas pokoknya.

Singkat kata, saya menganjurkan kepada seluruh komunitas intelijen Indonesia untuk waspada dari faktor ini dan juga kepada unsur pimpinan untuk mengembangkan mekanisme pengawasan dan pembinaan yang lebih baik.

Para pembaca mungkin menganggap enteng persoalan ini, tetapi faktanya kita mungkin akan kecolongan atau bahkan kehilangan sejumlah agen muda yang potensial karena rayuan maut cinta yang mendorong seorang agen untuk meninggalkan atau mengabaikan tugas pokoknya.

Akhir kata, saya senang karena ternyata ada rekan sejawat yang cukup senior yang juga membaca blog Intelijen Indonesia.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /**Saturday, February 25, 2006**

Salut Buat Bung Syamsir Siregar

Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang veteran CIA yang sudah sama-sama pensiun dan baru saja kembali dari bumi pertiwi Indonesia sebagai turis biasa. Mungkin karena kebiasaan lama mengamati-amati perkembangan Indonesia, khususnya intelijen... si mister bule itu tetap buka mata dan telinga tentang perkembangan Indonesia.

Dari mister bule tersebut saya peroleh bahan keterangan yang sangat memuaskan yaitu intelijen Indonesia dalam hal ini BIN dan BAIS TNI sudah semakin profesional dalam pembagian ruang operasi. Lebih jauh, berdasarkan data-data yang dimiliki mister bule, intelijen Indonesia telah berhasil mengisi ruang-ruang kosong dalam operasi nusantara, yang berarti informasi di daerah terpencil akan lebih cepat diperoleh dan dikirimkan ke pusat. Hal ini bukan berarti Bakorinda atau bentuk Kominda yang represif akan lahir kembali. Tetapi lebih pada profesionalisme mekanisme kerja yang mengutamakan penguatan jaring informasi yang cepat dan tepat/akurat, *velox et exactus*. Apa yang saya senang adalah sikap tegas berupa sanksi yang berat kepada anggota yang membangkang perintah penugasan, juga peningkatan disiplin kepada anggota yang menyalahgunakan wewenang.

Untuk ruang lingkup operasi nusantara memang masih memerlukan lebih banyak lagi organik intelijen yang piawai dan mampu menguasai medan operasi. Namun setidaknya kebijakan yang tegas akan mendisiplinkan segenap anggota intelijen yang pada awal reformasi tampak lesu.

Apakah berarti kita kecolongan karena ada mantan intel asing yang berhasil membuat pemetaan kekuatan operasi di dalam negeri kita? entahlah...si mister bule itu sudah seperti "sahabat" lama. Kalaupun iya kecolongan... Indonesia memang sedemikian transparannya dari kacamata luar negeri. Kekuatan dan kelemahan kita senantiasa dengan mudah dikalkulasi untuk mengukur tingkat bargaining internasional kita. Saya kira tanpa operasi khususpun pihak asing dengan mudahnya melakukan perkiraan kekuatan dan kelemahan kita di berbagai sektor.

Namun hal ini tidaklah mengecilkan hati kita sebagai negara berkembang yang sedang membangun. Bahkan komentar dari mister bule bisa menjadi acuan terhadap keberhasilan kelanjutan reformasi intelijen dibawah kepemimpinan Syamsir Siregar.

Seperti pernah saya ulas dalam tulisan reformasi intelijen jelas bahwa perkiraan saya tidak jauh meleset. Sosok Bung Syamsir Siregar tidak kalah dengan pendahulu-pendahulunya. Setiap kepemimpinan boleh memiliki gaya yang berbeda, namun niatnya sama yaitu reformasi organisasi dan mekanisme kerja dengan tujuan Indonesia Jaya.

Informasi ini bisa jadi sangat rahasia bagi media massa Indonesia karena masih ada "ketakutan" akan bangkitnya lagi pemerintahan yang represif dengan dukungan intelijen yang kuat. Apa yang perlu dilakukan oleh kaum pro demokrasi liberal adalah mengupayakan pengawasan terhadap intelijen melalui institusi perwakilan seperti DPR dan DPD. Sedangkan

bagi kaum pro demokrasi sosial perlu kiranya mengupayakan pemberdayaan civil society secara berkesinambungan dengan tujuan menyelaraskan derap langkah pembangunan yang berkeadilan. Karena kalau tidak, intelijen bisa jadi akan melupakan RUU Intelijen, karena mereka telah lahir kembali dengan tingkat keahlian yang semakin tinggi, sehingga tidak lagi merasa risau dengan landasan hukum. Mana yang lebih baik? dengan atau tanpa landasan hukum.....intelijen akan terus melaju, *velox et exactus*.

Pesan saya buat Bung Syamsir hanya jauhi permainan politik kekuasaan menjelang pilpres 2009.

Posted by Senopati Wirang /**Wednesday, February 08, 2006**

Sedikit nasehat buat para agen muda

Seorang agen operasional maupun agen analis senantiasa dipengaruhi oleh kapabilitas dirinya dan keraguan lingkungan atas kemampuannya. Sehebat apapun seorang agen, bila telah terperosok dalam suasana "merasa hebat", maka kejatuhannya akan segera datang.

Di luar aspek kapabilitas seorang agen mengembangkan kemampuan dirinya, dia mesti senantiasa memperhatikan adanya pendapat/analisa yang mungkin lebih baik dari kalangan pakar ahli. Satu hal yang perlu dipisahkan adalah aspek emosi individual yang seringkali mewarnai sebuah pendapat (subyektifitas). Subyektifitas seringkali berhasil mempertajam analisa atau perkiraan dari satu sudut pandang karena ia diperkuat oleh emosi. Namun kekeliruan dalam mengandalkan pada sikap seperti ini akan menjerumuskan bila ternyata insting intelektual/intelijen meleset, sehingga emosi yang membimbing analisa tersebut akan kelihatan begitu bodohnya, dan penyesalan tidak akan berguna.

Oleh karena itu, sangatlah perlu untuk melihat secara umum, membandingkan dengan pendapat lain, dan sekali lagi membuat penglihatan ulang kepada sebuah duduk persoalan. Proses ini berlangsung lambat pada awalnya, namun akan termekanisasi seiring dengan kebiasaan seorang agen.

Ingat pada nasehat Kipling's "If":

"If you can trust yourself when all men doubt you"

--and here comes the rub--

"But make allowance for their doubting, too."

Memang benar seorang agen yang baik hanya percaya 100% pada dirinya sendiri, namun tetap berilah ruang pada keraguan orang lain pada anda.

Anda akan menjadi orang yang percaya diri sekaligus waspada pada kekeliruan yang mungkin terjadi pada diri sendiri. Sehingga tidak akan terjadi keyakinan yang berlebihan yang bisa mendorong pada kehancuran diri sendiri.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /**Sunday, February 12, 2006**

Bagaimana Caranya Mengabdi dan Menjadi Anggota Intelijen Indonesia?

Saya telah menerima dan mengecewakan entah berapa puluh e-mail dan unpublisch comment dari rekan-rekan, mungkin mencapai seratusan lebih yang menanyakan bagaimana menjadi intel, meminta informasi tentang BIN atau bahkan meminta rekomendasi untuk bisa masuk dalam komunitas intelijen Indonesia.

Mungkin sudah waktunya bagi BIN untuk lebih transparan dengan melakukan rekrutmen terbuka yang lebih kompetitif sehingga calon-calon agen yang direkrut benar-benar pilihan. Hal ini tentunya tetap diiringi dengan sistem spotting agen yang tertutup. Dua mekanisme rekrutmen yang memiliki tujuan berbeda sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Menurut saya untuk agen-agen khusus operasional, sistem rekrutmen tertutup dengan spotting berbulan-bulan masih relevan, karena karakteristik agen yang dibutuhkan adalah kemampuan khusus yang unik yang dimiliki seseorang karena pengalaman hidupnya, karena keterampilan khususnya, karena jaring komunikasinya, karena aksesnya, dll. Setidaknya model ini sangat efektif dan tampak tetap menunjukkan bahwa agen yang direkrut cukup handal dan sebagian besar unsur sipil pimpinan BIN mungkin dari model ini, selebihnya **sampah**.

Sementara agen-agen analis lebih membutuhkan rekrutmen kompetitif yang bisa dilakukan secara terbuka di kampus-kampus terkemuka untuk

mendapatkan calon agen terbaik. Seluruh Badan Intelijen di dunia seperti CIA, MI6, MOSSAD, ASIS, dll telah melakukan rekrutmen terbuka sejak lama. Bidang-bidang pendukung seperti teknologi informasi dan peralatan intelijen jelas membutuhkan kemampuan teknis yang tinggi dari lulusan informatika, telekomunikasi, elektronika, dll. Model ini sedikit-demi sedikit juga ditempuh oleh beberapa petinggi BIN yang mencoba mendeteksi calon-calon agen potensial dari kampus, cukup banyak yang menonjol hasilnya dan berhasil menyelamatkan muka BIN dikala krisis, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Sementara mayoritas agen BIN yang direkrut melalui jalur kekeluargaan yang tidak transparan oleh pejabat lainnya hanyalah **sampah**.

Sistem penyaringan yang ketat dan berlapis mudah saja untuk disusun bila BIN benar-benar ingin melakukan revitalisasi organisasi. Informasi tentang dibukanya kesempatan bergabung dengan BIN hanya dilakukan oleh para pejabat BIN yang akhirnya hanya memasukkan kenalan atau anggota keluarganya. Meski ada jaminan loyalitas, tetapi bagaimana dengan **kemampuannya yang sangat terbatas**. Sudah saat ketakutan BIN disusupi oleh calon agen yang tidak loyal kepada Negara dan Bangsa Indonesia disingkirkan, karena sekarang Indonesia sudah demokratis, tidak lagi menginteli bangsa sendiri secara intensif demi kepentingan dan kekuasaan politik kelompok penguasa. Tetapi mewaspadai ATHG yang sungguh-sungguh menjadi bahaya bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Kehancuran organisasi BIN sejak akhir era 1980-an, 1990-an bahkan mungkin sampai tahun 2000-an jelas disebabkan oleh buruknya sistem rekrutmen kekeluargaan semacam itu. Meski saya dengar mantan Kepala BIN, Jenderal (purn) AM Hendropriyono telah merancang mekanisme rekrutmen yang lebih baik dan kompetitif serta meningkatkan sistem pendidikan dan pelatihan. Namun fakta bahwa tidak semua calon agen potensial di masyarakat tahu tentang adanya rekrutmen BIN, menurunkan prosentase kemungkinan calon agen terbaik yang terpilih masuk menjadi anggota intelijen.

Semoga para pejabat BIN tergugah untuk melakukan reformasi organisasi.

Sekian

Posted by Senopati Wirang / **Tuesday, May 09, 2006**

Tentang Institut Intelijen Negara - IIN

Bukannya tidak mau membahas sekolah yang digagas Jenderal (purn) AM Hendropriyono tersebut. Tetapi lebih dalam kaitan etis karena belum ada yang bisa saya ungkapkan secara terbuka tentang sekolah tersebut. Pertama usia sekolah yang relatif masih sangat muda dan tiba-tiba "tenggelam" pasca pergantian pemerintah dan pimpinan BIN. Bahkan website yang telah dirancang meliputi BIN dan IIN tiba-tiba juga hilang.

Saya merasa perlu ikut menjaga privacy calon-calon agen yang sedang mengikuti pendidikan di sana. Saya punya keyakinan akan potensi mereka karena seleksinya yang ketat melalui jalur-jalur khusus penelusuran bakat ke sekolah-sekolah menengah unggulan yang mudah-mudahan bersih dari unsur nepotis (identitas dan keberadaan mereka sangat penting untuk dilindungi). Inilah cita-cita Bung Hendro yang pernah saya rekam dengan perekam digital yang saya titipkan pada seorang agen muda. Bung Hendro sangat memperhatikan masalah pendidikan dan peningkatan kualitas BIN untuk menjadi lembaga yang profesional. Meski unsur "pamer" seperti celebrities beliau agak mengganggu sebagian kalangan intel, gebrakan Bung Hendro akan berdampak positif bila programnya terus dijalankan. Persoalannya tentu saja dana yang besar.

Akankan pimpinan yang baru juga berkomitmen untuk menganggarkan dana pendidikan yang besar itu?

Sekolah program Master Intelijen di Batam...quo vadis? jawabnya status quo alias mandek karena visi dan misi pendidikan Bung Hendro terasa terlalu berat dengan minimnya sumber daya BIN. Perbedaan konsentrasi perhatian pimpinan tentu menyebabkan prioritas kebijakan yang berbeda pula. Konon kabarnya program tersebut sudah diambil alih lembaga pendidikan yang bergengsi di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia...dengan program khusus pasca sarjana **Kajian Stratejik Intelijen**. Ini bukan promosi...tetapi bila ada berminat tidak ada salahnya mencari tahu ke Universitas Indonesia. Informasi dalam Blog I-I ini saya rasa perlu karena kajian tersebut juga agak tertutup pengumuman penerima mahasiswanya. Bila ingin cek websitenya silahkan kunjungi [ketahanan nasional-stratejik intelijen](#). Seleksi ketat dan harus melalui tes dan rekomendasi yang memadai tentang kemampuan akademik calon pendaftar. Serta tidak menerima titipan nepotisme. Saya lihat staf pengajarnya para ahli dan ada juga praktisi, ada kemungkinan mahasiswa program ini bisa membuka peluang bertemu praktisi intelijen seperti saya...entah sebagai dosen tamu...entah sebagai bagian untuk membantu riset mahasiswa.

Bila staf administrasi atau staf pengajar program pasca sarjana UI kurang responsif dalam menerima dan menjawab setiap pertanyaan "ingin tahu" dari pembaca Blog I-I yang berbondong-bondong ingin mendaftar, sampaikan pendapat saya; "bahwa menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Bila UI membuka program kajian stratejik intelijen tentunya juga harus

membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap peminat program tersebut".

Bila kesehatan saya tetap terjaga dan diberi umur panjang, untuk sekolah di Batam sebenarnya saya bersedia pulang ke Indonesia dan mengajar dimasa pensiun saya ini. Akan saya nyalakan kehidupan akademis-praktis ilmu kajian intelijen bersama komunitas intelijen Indonesia.

Saya senang dunia pendidikan, meski saya memenuhi kualifikasi untuk mengajar di UI dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan saya. Saya kurang tertarik karena kurikulumnya masih didominasi perspektif national resilience serta kurang jelas spesialisasi mata kuliahnya. Saya memimpikan program intelijen yang dijiwai oleh school of thought intelligence. Saya juga memimpikan lahirnya the Sherman Kent School ala Indonesia, yang mampu menghasilkan analisis-analisis intelijen yang handal.

Sekian

Posted by Senopati Wirang / **Friday, May 12, 2006**

Pro-Kontra Posisi Intelijen

Organisasi Intelijen di seluruh dunia menghadapi persoalan yang hampir sama tatkala dilihat dari sudut posisinya di masyarakat maupun dalam sebuah negara. Posisi bisa berarti dari sisi pentingnya, manfaat, pengaruhnya atau bahkan power kekuasaannya. Namun bisa juga berarti dimana letaknya dalam sebuah kehidupan bernegara dan berbangsa.

Setidaknya ada 6 faktor penting yang mempengaruhi posisi sebuah lembaga Intelijen dalam sebuah negara.

Pertama, adalah definisi ancaman. Intelijen sebagai bagian dari aparaturnya keamanan yang paling depan menjadi sangat penting atau vital bagi sebuah negara ketika definisi ancaman lebih jelas dan disepakati oleh mayoritas masyarakat atau minimal oleh para pengambil keputusan baik di eksekutif maupun legislatif. Contoh kasus misalnya dalam keadaan perang, dimana pihak-pihak yang bermusuhan saling berhadapan dan jelas, arah ancaman datang dari mana. Atau bisa juga situasi pasca perang dunia kedua (era perang dingin), dimana persepsi ancaman nyaris seragam, yaitu berhadapan-hadapannya dua kubu yang bersaing, Uni Soviet dan sekutu melawan Amerika Serikat dan sekutu.

Kedua adalah lingkungan eksternal dari sebuah negara. Faktor kedua ini masih terkait dengan faktor pertama. Lingkungan eksternal bisa diawali dengan negara-negara tetangga, lingkungan regional sampai global. Apabila banyak potensi konflik dengan lingkungan eksternal maka biasanya posisi intelijen menjadi penting dan tidak banyak dipertanyakan oleh publik. Tetapi bila lingkungan eksternal terlihat stabil dan damai

serta banyak diwarnai dengan kerjasama dan kesepahaman antar negara, maka posisi intelijen menjadi biasa saja sebagaimana layaknya sebuah lembaga yang menyediakan informasi dan analisa. Lebih jauh, bahkan akan mulai dipertanyakan sejauh mana sebaiknya intelijen memiliki peran/pengaruh dalam pembuatan keputusan atau kebijakan negara.

Ketiga adalah struktur birokrasi dan administrasi negara. Hal ini sangat erat hubungannya dengan wewenang dan posisi lembaga-lembaga negara berdasarkan hukum/UU yang berlaku. Sebagai contoh misalnya perkembangan lembaga-lembaga intelijen di Indonesia. Sejak masa kemerdekaan hingga hari ini tidak pernah ada Undang-Undang tentang Intelijen Negara yang mengatur secara komprehensif Intelijen Indonesia. Salah satu sebab utama adalah karena pemikiran intelijen masa Orde Lama maupun Orde Baru lebih banyak dipengaruhi oleh konsep negara otoriter dimana intelijen tidak merasa perlu diatur-atur oleh Undang-Undang. Meski misalnya, lembaga intelijen dibentuk hanya dengan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden (seperti KIN, BPI, KOTI, BAKIN, BIN), Keputusan Panglima TNI (Unit Intelijen Tempur, Pusintelstrat, dan BAIS?), namun kinerja dan wewenangnya bisa melebihi lembaga lain yang diatur oleh hukum. Intelijen era Orde Lama dan Orde Baru selalu menganggap Intelijen bisa berjalan di atas hukum. Kompetisi draft untuk kebijakan negara dengan sendirinya juga banyak didominasi oleh kalangan intelijen yang didukung oleh lembaga Think Tank yang terus berkembang. Hal ini sedikit banyak juga menimbulkan friksi dengan departemen terkait karena sering dilangkahi oleh intelijen. Konyolnya kadang kala persoalan yang ke permukaan justru lebih banyak ke wilayah pribadi persaingan para pejabat tinggi, baik dalam hal meningkatkan

kedekatan dengan presiden maupun dalam hal memperoleh kesempatan bisnis. Tidaklah mengherankan bila dalam era reformasi dan demokrasi, intelijen nasional kita tampak kedodoran dalam mengikuti perkembangan, bahkan dibandingkan dengan langkah cepat Kepolisian Republik Indonesia sangat ketinggalan jauh. Contoh sederhana adalah dalam hal menyusun RUU Intelijen Negara yang baik, bersifat nasional, demokratis, dan bisa diterima publik.

Keempat adalah kondisi internal lembaga intelijen. Kondisi organisasi intelijen boleh dikata nyaris tidak terdengar oleh publik. Sekuat/sehebat apakah Intelijen Indonesia selalu menjadi pertanyaan yang tidak terjawab. Pemeliharaan kondisi internal intelijen yang misterius tentu saja sangat diperlukan dalam menjaga kerahasiaan organisasi. Media massa bisa saja menuliskan atau mengkritisi kelemahan-kelemahan intelijen dan hal ini tidak perlu dibantah ataupun dikonfirmasi. Media massa bisa juga menampilkan wajah intelijen yang super dan sangat bermanfaat bagi kehidupan bernegara dan berbangsa, dan hal ini juga tidak perlu dikonfirmasi apalagi dibantah. Catatan yang ingin saya tekankan dalam soal kondisi internal organisasi intelijen adalah pada kejujuran jajaran pemimpin intelijen dalam mengevaluasi organisasi, baik soal kinerja, peningkatan profesionalisme SDM, efisiensi dan efektifitas operasi, masalah anggaran dan alokasi dana, kesejahteraan anggota, dan respon-respon organisasi terhadap perkembangan nasional maupun internasional.

Kelima adalah persepsi publik terhadap intelijen. Sehebat apapun sebuah lembaga intelijen bila tidak diabdikan untuk kepentingan negara dan masyarakat adalah sia-sia. Intelijen Nasional Indonesia telah menabung

begitu banyak kecurigaan demi kecurigaan yang menimbulkan kurangpercayaan publik pada pentingnya intelijen, akibatnya muncul resistensi terhadap upaya-upaya penguatan organisasi intelijen. Padahal bila ada keyakinan publik bahwa intelijen yang kuat akan bermanfaat positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dukungan publik sudah cukup untuk meletakkan posisi intelijen yang selayaknya.

Terakhir/keenam adalah sistem politik. Terkait erat dengan faktor ketiga dan kelima, faktor sistem politik juga mempengaruhi kewajaran dimana posisi intelijen sebaiknya diletakan. Pada rejim militer dan otoriter, tentu saja posisi intelijen sangat berpengaruh dan tinggi. Dalam negara demokratis, posisi intelijen tetap tinggi tetapi dalam transparansi dan kontrol yang efektif dari berbagai pihak. Tinggi-rendahnya posisi intelijen di negara demokratis bersifat fluktuatif tergantung pada faktor pertama yaitu definisi ancaman, Perhatikan misalnya pasca 9/11 2001 yang menaikkan posisi strategis lembaga-lembaga intelijen di banyak negara, bahkan tampak revitalisasi organisasi intelijen yang cukup signifikan. Dalam kondisi nyaris "tanpa ancaman", posisi intelijen selayaknya tetap stabil dalam kesiagaan/kewaspadaan penuh menjaga stabilitas negara.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /**Friday, September 22, 2006**

Intelijen Asing

Baru-baru ini saya menerima informasi dari Cah Bodho yang menurut saya justru lebih pantas disebut Cah Jenius. Informasi yang lumayan lengkap mengenai gerakan Intelijen Asing yang akan saya singkat dalam tulisan ini sungguh mencengangkan. Beberapa potongan informasi bahkan saya berani mengkonfirmasi. Berbeda dengan dugaan-dugaan intelijen yang sering dikemukakan para pengamat intelijen seperti Bung AC Manullang. , maka informasi Cah Bodho jelas mengungkapkan gerak-gerik intelijen asing khususnya Mossad secara lumayan detail. Mereka bergerak tidak dalam jumlah yang besar, tetapi sangat efektif karena beberapa agen yang telah mendapat pelatihan melalui "paket wisata rohani" sehingga bisa masuk Israel. Keberadaan beberapa agen lokal yang telah dilatih tersebut kemudian membina beberapa informan, tanpa si informan tahu untuk siapa sebenarnya dia bekerja, karena yg penting mereka menerima bayaran. Dalam pengamatan saya, jumlah agen Mossad yang aktif di Indonesia hanya sekitar 2-3 orang saja, saling bergantian dan hampir selalu berjalan minimal berdua. Pusat komunikasi dan komando tetap berada di Singapura, lagi pula mereka secara mobile bisa bermarkas di mana saja.

Gerakan Mossad di Indonesia secara umum memang ditargetkan untuk memperoleh pengakuan atau pembukaan hubungan diplomatik. Meski Indonesia bukan negara Islam, tetapi pengakuan keberadaan Israel sangatlah penting dan strategis. Keberadaan shadow Embassy Israel di Singapura misalnya bukanlah hal baru. Hal ini telah disampaikan kepada pemerintahan Suharto sejak awal tahun 1990an. Namun hal itu tidak

dianggap sebagai ancaman oleh sejumlah petinggi militer. Bahkan hubungan baik sejumlah tokoh Koppasus yang melakukan pembelian unit-unit senjata serbu untuk kepentingan pembentukan Pasukan Elit semakin membuka peluang masuknya pengaruh intelijen Israel ke dalam tubuh negara Indonesia. Pada awal tahun 2000an seiring dengan terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden, Shadow Embassy Israel sudah sangat siap, dalam waktu singkat siap diaktifkan.

Lebih jauh Cah Bodho mengungkapkan tentang network Mossad yang bekerja di negara Indonesia. Meski tidak terlalu lengkap, namun sejumlah dugaan Cah Bodho patut diacungi jempol.

Mohon maaf, bila sekali lagi saya menulis sebuah tulisan yang dangkal dengan selalu mengambang dalam soal who, what apalagi why. Saya tidak akan menyangkal tuduhan sejumlah pembaca Blog I-I tentang kedangkalan tulisan saya dalam Blog I-I. Tetapi apalah daya saya. Hanya sebuah keprihatinan yang terpaksa saya bungkus dengan kata-kata yang sedikit mengaburkan dan membuat dangkal analisa saya sendiri.

Kembali pada cerita Cah Bodho tentang bagaimana pembinaan Mossad dalam merekrut orang-orang Indonesia lengkap dengan sistem transfer pembayarannya. Saya ingin memberikan warning kepada segenap Instansi Intelijen di Republik Indonesia bahwa infiltrasi Mossad begitu dahsyat ke dalam Republik Indonesia.

Saya tidak sudah tidak begitu paham sejauh mana infiltrasi Mossad ke dalam instansi pemerintah khususnya intelijen, polisi dan militer. Tetapi sepengetahuan saya, hubungan ketiga instansi tersebut dengan Israel via company, agen, ataupun individu asal Israel sangatlah rawan.

Cah Bodho dengan sangat berani menceritakan sedikit tentang operasi Mossad ke dalam masyarakat Indonesia. Entah sudah berapa banyak orang Indonesia yang menjadi penghianat Republik Indonesia. Saya tentunya berkewajiban menjaga identitas Cah Bodho meski saya punya teknologi untuk menelusurinya.

Hahaha...tentu saja Israel/Mossad juga punya teknologi menelusuri Blog I-I dan mencari tahu siapa Senopati Wirang. Saya sudah tidak peduli lagi tentang resiko menulis dalam Blog I-I. Tentunya saya tetap mengutamakan kepentingan nasional dengan tidak gegabah menulis tentang perkembangan terkini dunia keamanan di Indonesia. Mohon maaf kepada para pembaca yang misalnya kecewa dengan tulisan tentang pembunuhan Munir. Tentu saya tidak akan menuliskan kepahlawanan Bung Polycarpus ataupun kepahlawanan Munir dengan gamblang. Meski Editorial The New York Times poisoned justice mengungkapkan tentang racun dalam tubuh peradilan Indonesia, saya melihat bahwa ketiadaan bukti keras (hard evidence) adalah merupakan kesulitan terbesar. Oleh karena itu, SBY tidak usah janji muluk-muluk, karena hal ini akan menjadi senjata untuk menghancurkan kredibilitas pemerintah Indonesia, khususnya di bidang penegakkan hukum dan HAM. Saya pribadi tentu

saja lebih baik untuk no comment lebih lanjut tentang apa sesungguhnya yang terjadi.

Kembali pada soal Mossad, kesombongan kalangan intelijen, kepolisian dan militer dalam meremehkan hubungan dengan Israel bisa ditandai dengan masih adanya kontrak-kontrak dengan perusahaan asal Israel. Cah Bodho mungkin paham tentang sepak terjang *networking* Mossad di masyarakat Indonesia. Mungkin juga tahu tentang bagaimana Mossad menyeret kalangan Islam Indonesia dalam sebuah dunia kelim radikalisme seperti juga pernah terjadi dalam sejarah, yaitu pada masa Khalifah Ali. Andai umat Muslim Indonesia mengerti tentang bahaya infiltrasi Mossad dalam tubuh gerakan keagamaan politik yang senantiasa bernuansa adu domba, maka tidak akan terjadi gerakan-gerakan radikal yang menggunakan kekerasan.

Saya tidak bermaksud mencari kambing hitam gerakan radikal Islam kepada gerakan operasi Mossad. Tetapi bukankah hal ini juga terjadi di Timur Tengah, contoh paling jelas saat ini adalah Lebanon dan masalah palestina. Permusuhan sesama Muslim, permusuhan Islam-Kristen jelas merupakan permainan yang mengasikan bagi Mossad. Perlu diperhatikan bahwa Mossad tidak identik dengan orang-orang Yahudi secara umum. Tetapi Lebih bisa dikaitkan dengan gerakan Zion internasional yang seringkali juga tidak dipahami oleh orang Yahudi biasa. Jadi lebih pada gerakan politik internasional yang didukung oleh unsur-unsur yang lengkap secara politik, ekonomi, intelijen, militer, teknologi, dll. Konon dalam perbincangan ringan, mereka tidak akan pernah diam dan puas melihat

perkembangan Indonesia hanya karena mayoritas penduduknya Muslim. Selain pengakuan Israel ada satu lagi upaya, yaitu pengendalian politik dan ekonomi serta penghambatan pembangunan yang berkelanjutan.

Ah....saya mohon maaf atas kedangkalan tulisan saya ini. Tetapi pada akhir tahun 2005 saya pernah mendengar bahwa Mossad tengah mempersiapkan infiltrasi total ke dalam tubuh intelijen, polisi dan militer Indonesia. Namun saya tidak tahu persis teknik infiltrasi yang akan mereka lakukan. Tetapi hal ini tentunya lebih diketahui oleh aparat yang bekerja di dalam dunia intelijen, polisi maupun militer.

Catatan tambahan, Blog I-I telah beberapa kali dikunjungi dari Israel, dan sejumlah negara Timur Tengah. Entah mengapa mereka tertarik melakukan pengamatan terhadap Blog I-I. Hal ini saya dengar juga dialami sejumlah Blogger yang menggunakan kata teroris atau tag teroris dalam tulisan mereka. Hanya sebagai contoh misalnya Blog milik Farit Gauss yang konon juga menjadi sasaran pengamatan dari Israel.

Lebih jauh dan sebagai catatan kecil dari sisi teknologi persandian misalnya, kita tentunya juga mahfum tentang teknologi enkripsi Lemsara (Lemsaneg/LSN) 128 Bit yang ketinggalan jaman mungkin mudah ditembus CIA yang telah menggunakan teknologi 4X lebih tinggi. Mudah-mudahan teknik tradisional juga dipadukan dengan teknologi yang ada, sehingga kecanggihan teknologi asing tidak begitu saja menelanjangi informasi tentang Indonesia.

Bila tidak ada lagi rahasia yang dimiliki Republik Indonesia, maka apakah artinya peranan semua institusi keamanan Indonesia karena rawan ditembus oleh Mossad ataupun CIA. Lalu apa sebenarnya tujuan akhir mereka? Entahlah....mungkin para pembaca Blog I-I bisa memberikan pendapat.

Sekian

Terima kasih pada sahabat Blog I-I yang telah memperingatkan tentang mudahnya untuk membongkar identitas Blog I-I. Saya masih "merasa" aman dengan menggunakan network tradisional yang tersebar di Indonesia dan beberapa di luar negeri. Kalaupun akhirnya Blog I-I terungkap karena sepandai-pandai tupai melompat akhirnya akan jatuh juga, maka saya hanya bisa berdo'a semoga saya bersabar dengan resikonya.

Posted by Senopati Wirang / **Friday, October 20, 2006**

Kualitas Intelijen Indonesia

Apakah karena nyaris tak terdengar, maka intelijen Indonesia menjadi begitu jeleknya? Apakah karena masih saja terjadi konflik terbuka, maka intelijen Indonesia tidak bekerja maksimal? Apakah karena artikel saya yang sebelumnya tentang rekrutmen intelijen, maka intelijen Indonesia secara keseluruhan berkinerja buruk/negatif?

Tentu dalam menarik logika tidak sesederhana itu. Saya tidak akan membela intelijen bila memang pantas dikritisi, saya juga tidak akan menjatuhkan kredibilitas intelijen Indonesia hanya karena sedikit barang bukti tentang kinerja mereka.

Ketika saya melakukan penelitian terhadap korupsi besar-besaran di tubuh Pertamina, sungguh sedih menyaksikan perusahaan raksasa kebanggaan nasional era 70-80an tersebut tersungkur karena selain mismanagement juga disebabkan oleh mimentalitet sejumlah pengelolanya. Tetapi tidak seluruhnya mengandung mentalitet sampah, dan banyak diantara pengelola Pertamina yang berusaha profesional. Begitu juga dengan penelitian terhadap Garuda Indonesia. Saya kira saudara-saudara yang bekerja untuk dua perusahaan besar tersebut mengerti maksud saya. Sayangnya secara internal seluruh aib perusahaan disimpan bahkan tidak sedikit yang sudah musnah. Sehingga transparansi kepada publik nyaris mustahil.

Apabila dilakukan penelitian mendalam atas Intelijen Indonesia, maka hasilnya kurang lebih akan mirip. Ada bagian-bagian yang rusak namun

tidak sedikit bagian-bagian yang bekerja optimal. Oleh karena itulah, kalo dalam perusahaan swasta ada upaya perbaikan melalui reengineering yang bertujuan menghidupkan kembali organisasi. Dalam intelijen Indonesia, upaya-upaya perbaikan secara nyata telah dilakukan dan tentunya hal ini tidak perlu dilaporkan kepada publik. Sesuai dengan kerangka demokrasi, perbaikan kinerja intelijen Indonesia cukup untuk diketahui oleh pemerintah (presiden) selaku user dan DPR selaku mitra pemerintah.

Kepada pembaca Blog I-I yang juga menggunakan nama samaran senopati, saya harap ikut menjaga makna nama senopati dengan bertanggung jawab. Artikel ini saya tuliskan untuk menjawab rasa penasaran para senopati-senopati yang bertanya-tanya tentang kualitas intelijen Indonesia.

1. Soal rekrutmen. Proses rekrutmen yang ideal telah ada sejak masa Orde Lama, era BPI sampai sekarang. Baik yang ditargetkan kepada mereka yang berlatarbelakang pendidikan SMA maupun Sarjana. Metode rekrutmen sejak masa perkuliahan seorang calon agen juga telah terselenggara secara berkelanjutan tanpa melihat periode waktu melainkan berdasarkan kebutuhan. Disamping itu ada yang mengikuti formasi pembukaan lowongan menjadi PNS intelijen, yang periodenya bisa jadi sama dengan masa penerimaan CPNS instansi pemerintah lain. Kemudian ada juga yang direkrut dari kalangan militer dan polisi dengan melihat latar belakang pendidikan inteligennya atau pengalaman kerjanya. Nah....dari mereka-mereka yang direkrut secara ideal, diperoleh calon-calon agen yang handal dan menjadi motor organisasi. Sementara, apa yang pernah saya tuliskan sebagai rekrutmen yang buruk adalah eksekusi dari sistem

rekomendasi. Apa yang saya khawatirkan adalah bahwa porsi yang ideal semakin sedikit. Dengan penjelasan ini, maka cukup jelas mengapa kadang masyarakat menemui sosok intel yang "payah", tetapi jarang bertemu intelijen yang handal. Tentu saja begitu, karena yang payah tersebut mudah blow-up terbongkar dan yang handal mungkin tidak akan pernah dikenal. Padahal anda mungkin sering berdiskusi dengan agen intel yang handal tersebut tanpa menyadarinya.

2. Orang-orang Sandi Negara bukanlah intelijen aktif yang biasa melakukan operasi-operasi khusus, mereka adalah sandiman dengan dunia yang penuh rahasia dan kode etik tersendiri. Peranan sandiman sangat penting dalam menjaga keamanan informasi negara dan oleh karena itulah, mereka dilatih secara khusus baik sistem sandi tradisional maupun yang memanfaatkan teknologi. Disana juga diisi orang-orang sipil dan militer yang terlatih dalam soal persandian. Rekrutmen sejak SMA karena memang kebutuhan dan masa pelatihan yang sekarang setara dengan Diploma IV atau bahkan setara S1.
3. Mengenai orang-orang Indonesia lulusan perguruan tinggi yang direkrut oleh Kedutaan Besar Amerika maupun Kedutaan Besar Asing lainnya, memang benar mereka orang pilihan karena rekrutmen Embassy Asing tentunya tidak main-main. Bahwa kemudian mereka bekerja untuk kepentingan asing saya kira itu urusan pribadi mereka. Bahkan bila mereka dilatih sedemikian rupa seperti seorang agen intelijen, maka itu juga menjadi tanggung jawab mereka. Tanpa adanya bukti yang bisa diajukan ke meja pengadilan, sulit untuk menuduh mereka sebagai penghianat bangsa. Tetapi saya pernah

bertemu dengan pensiunan penghianat negara yang hanya bisa menyesali hari tua karena telah menjadi alat asing. Hal itu disebabkan karena ada beberapa informasi vital yang pernah diberikan kepada pihak asing yang menyebabkan hancurnya sejumlah sendi kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia. Tentu kita tidak perlu mengingatkan tentang dosa menyengsarakan rakyat tersebut. Setahu saya, penggunaan teknologi di Kedubes Amerika pun masih biasa saja, walaupun seseorang dalam Kedutaan mengaku mampu menembus hampir semua instansi pemerintah melalui internet, itu mungkin saja karena memang informasi tersebut terbuka dan bebas diakses siapa saja.

4. Sistem kerja intelijen asing di Kedutaan Besar ada dua, yaitu yang terbuka sering dikenal sebagai counter part dan yang tertutup atau dikenal spionase. Mereka yang terbuka bahkan saling bekerjasama dan tukar-menukar informasi. Sedangkan mereka yang tertutup melakukan operasi spionase untuk memperoleh informasi rahasia yang vital bagi sebuah negara. Negara-negara komunis dan rejim militer melakukan kontra spionase yang sangat ketat bahkan seperti dalam permainan sepak bola satu agen asing dijaga ketat minimal satu agen kontra. Pada masa saya masih bertugas, saya bahkan pernah on the spot bersama teman-teman kontra mendata satu per satu agen intel asing sampai ke tempat tinggalnya. Saya kira bila sistem pengawasan intel asing tersebut masih berjalan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
5. Persoalan dalam menghadapi intel asing sejak zaman dahulu adalah klasik, yaitu ketertinggalan dalam soal teknologi, baik komunikasi

maupun transportasi serta dana operasi. Bayangkan jika anda naik motor mengawasi intel asing yang naik mobil. Atau bayangkan kejadian ketika tiba-tiba sistem komunikasi mati karena pihak lawan sudah memiliki teknologi yang lebih tinggi. Tetapi saat ini, saya yakin ketertinggalan tersebut sudah tidak lagi relevan.

6. Saat ini di dalam negeri ada tiga organisasi intelijen yang bekerja secara aktif, yaitu BIN (Badan Intelijen Negara), BAIS (Badan Intelijen Strategis), dan BIK (Badan Intelijen Kepolisian). Di masa depan saya meramalkan peranan BIK akan semakin dominan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hal ini dikarenakan watak Kepolisian yang semakin sipil dan menjadi pengayom masyarakat dan hal ini tentunya perlu ditunjang oleh profesionalisme dan juga didukung oleh dasar hukum yang kuat.

Demikian, semoga pembaca Blog I-I dapat melihat kondisi intelijen Indonesia secara lebih obyektif. Mohon maaf kepada pihak yang berwenang atas kelancangan saya menuliskan artikel yang lebih transparans kepada publik. Sekian

Posted by Senopati Wirang /**Sunday, October 22, 2006**

Berita Terkini Intelijen Indonesia

Mulai bulan ini saya akan mengupayakan pemberitaan terbaru yang terkait dengan dunia intelijen Indonesia. Dengan berbagai sumber yang saya miliki, mungkin akan sangat kurang karena perkembangan dunia intelijen Indonesia yang sesungguhnya tidak mungkin tercatat oleh saya seorang diri. Oleh karena itu, saya akan sangat senang dan terbuka untuk menerima dan kemudian mengupload berita dunia intelijen Indonesia terkini dari rekan-rekan sahabat Blog I-I. Saya sangat harapkan dukungan rekan-rekan Blog I-I untuk bisa turut serta mendukung upaya pemberitaan secara kontinyu ini. Pada bagian akhir dari up date berita terpilih, saya akan memberikan catatan berupa opini pribadi saya atas perkembangan berita tersebut.

GUS DUR BANTAH YAYASANNYA BERSAMA B.I.N MELOBI AMERIKA

Jumat 08 September 2006 15:00 UTC

Gus Dur membantah keras bahwa yayasannya bersama badan intelejen negara BIN pernah menyewa sebuah perusahaan lobi di Washington untuk mendesak Amerika agar memulihkan program pelatihan militer bagi TNI. Badan lobi Collins & Co memoles citra TNI pada saat kalangan Konggres prihatin kasus Aceh, Papua dan kasus Munir tahun silam. Isu itu kini ramai di tengah peringatan dua tahun kasus Munir yang penuh tanda tanya dan keprihatinan karena kasus Munir masih misterius. Laporan Aboeprijadi Santoso dari Jakarta.

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kepada Radio Nederland Wereldomroep di Jakarta, membantah keras keterlibatan yayasanannya dalam upaya lobi di Amerika itu. "Nggak, kenal aja enggak," katanya tentang perusahaan Collins & Co. Gus Dur mengaku tidak tahu menahu mengenai lobi yang menyebut BIN dalam satu nafas dengan Gus Dur Foundation. Di dalam Wahid Institute memang ada sebuah yayasan bernama Yayasan Gus Dur yang berupaya mendirikan rumah sakit, universitas dan sebagainya, tapi ini tak ada hubungannya dengan BIN, katanya.

Tentang tokoh As'ad Said Ali yang disebut-sebut dalam dokumen Collins, Gus Dur membenarkan, dia orang NU dan Wakil Kepala BIN, satu-satunya yang tidak dicopot sejak Kepala BIN Hendropriyono digantikan Syamsir Siregar. Tapi, tandas Gus Dur, dia orang BIN yang bisa saja orang NU atau apa saja. Dokumen yang sedianya akan diterbitkan Collins & Co itu menjadi tanda tanya baru. Adakah As'ad Said Ali dan BIN memanipulasi nama Gus Dur Foundation seperti dikesankan Gus Dur, ataukah ada upaya BIN membangun citra baru di dalam dan di luar negeri. Sebab dokumen yang disebut Dokumen FARA itu menyebut Collins berupaya kuat memoles citra TNI di kalangan Konggres Amerika yang waktu itu amat prihatin soal Aceh, Papua dan kasus Munir. Sementara itu peringatan dua tahun kasus Munir dikabuti pertanyaan publik, mengapa kasus ini belum juga terbongkar? Menurut Gus Dur, "Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sebenarnya memerintahkan pembunuhan Munir, ada di dalam pemerintah. "Jadi, lanjutnya, "Ini cuma supaya kasusnya terhenti." Lalu

mengapa Presiden SBY sama sekali tidak bertindak, bahkan tidak bersedia menerbitkan Laporan Tim Pencari Fakta Independen yang merupakan tim dengan mandat kepresidenan? GusDur ketawa ngakak. "Itu, karena SBY pada dasarnya tidak punya keberanian saja," katanya. Ada yang mengatakan, SBY tidak berisiko digoncang para jenderal, seperti Gus Dur dulu, kalau berani membongkar kasus Munir. Tapi yang lain berpendapat, ini kan presiden terpilih rakyat, maka dia kuat. Hanya SBY takut jika pensiun, dia bisa diMunirkan. "DiMunirkan" sudah menjadi kata kerja baru di Indonesia.

Baru-baru kabarnya mantan Kepala BIN Jendral Hendropriyono yang sering berkampanye untuk PDI-P, sempat kesal tentang prestasi partainya itu, dan di muka kader PDIP sempat keceplosan, "Kalau gini terus, ya saya Munirkan". Namun, kenyataannya, investigasi TPF mau pun polisi tidak memiliki indikasi apa pun menyangkut diri Hendropriyono. Jadi Hendro agaknya bersih. Kalaupun tersangkut, itu hanya karena dia mantan bosnya Mayjen Muchdi Pr yang telpon genggamnya diketahui sampai 41 kali berhubungan dengan HP-nya Pollycarpus, terhukum kasus Munir. Pembela Muchdi menangkis itu tidak membuktikan siapa pengguna HP yang mengadakan kontak itu. Koordinator KontraS Usman Hamid menunjuk, kalau mau menuntaskan soal ini, mudah saja, silahkan minta presiden RI atau Kapolri meminta Kantor Pusat Telkom di Bandung membuka isi dan suara ke-41 pembicaraan telpon genggam itu. Itu saja masalahnya, jadi publik sempat bingung mengapa SBY mau pun Kapolri Jendral Sutanto tetap bergeming. Walhasil peringatan kasus Munir yang bertajuk "Keadilan Untuk Munir, Keadilan Untuk Semua" itu tetap

prihatin, mulai dari perenungan di LapanganTugu Proklamasi sampai peluncuran buku kumpulan tulisan Munir yang berjudul "Membangun Bangsa & Masalah Kemiliteran, Jejak Pikiran Munir". Jejak itu kini membuat 7 September sebagai "Hari Pembela HAM". Sekian laporan Aboeprijadi Santoso dari Jakarta. (Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum)

Catatan:

- Berita Lobby BIN bersama Yayasan Gus Dur merupakan hasil investigasi simultan Washington D.C - Jakarta, dan dipublikasikan bersamaan dengan hari terbunuhnya Munir Thalib yaitu pada 7 September 2004. Kemudian dikutip dalam berbagai pemberitaan tentang Indonesia, termasuk dari sumber yg saya kutipkan di atas, yaitu Radio Nederland (lihat Ranesi atau Radio Nederland). Selain Radio Nederland, BBC Indonesia juga memberitakan hal senada dalam gusdur lobby. Sementara sumber utama berita pada umumnya mengacu pada website ICIJ, lihat Jakarta's Intelligence Service Hires Washington Lobbyists:Former Indonesian president's foundation served as conduit for push to overturn ban on military cooperation. Dengan demikian cukup jelas pesannya.
- Sudah menjadi kewajaran bagi Lembaga Lobby Collins and Co. untuk mencatatkan dokumen FARA (the Foreign Agents Registration Act) untuk menjamin bahwa publik Amerika "mengetahui sumber informasi yang ditujukan untuk

mempengaruhi/menggoyang opini publik, kebijakan, dan hukum". FARA mengharuskan/mewajibkan setiap agen (seperti lobbyist, perusahaan public relations) yang bekerja untuk kepentingan "asing" untuk mendaftarkan laporan kepada the Department of Justice dan membuat "file forms" setiap enam bulan. Collins & Co. mengarsipkan dibawah hukum tersebut beberapa copy dari kontrak asli dengan the Gus Dur Foundation/BIN berikut data dokumen pendukungnya. Dengan demikian tidak ada pelanggaran hukum, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia.

- Investigasi selama kurang lebih satu tahun dilakukan oleh ICIJ (the International Consortium of Investigative Journalists) yang merupakan bagian dari penyelidikan perubahan sikap Amerika Serikat pasca Teror 11 September dalam hal program asistensi dan bantuan militer serta dampak perubahan tersebut pada Hak Asasi Manusia--HAM. Investigasi tersebut difokuskan kepada 10 negara kunci termasuk Indonesia, serta dijadwalkan akan di-release pada awal tahun 2007.
- Satu-satunya wakil dari ASIA yang juga duduk sebagai Advisory Committee members ICIJ kebetulan juga berasal dari Indonesia yaitu, wartawan senior dengan segudang pengalaman Goenawan Mohamad. Saya pribadi cukup kagum dengan integritas beliau karena saya pernah bertemu pasca kasus Kapal Jerman Timur pada tahun 1994. Beliau adalah pendiri dan editor Majalah Tempo , konon Majalah berita yang paling dihormati. Pada tahun 1995, Goenawan Mohamad mendirikan the Institute for the Studies on Free Flow of Information (ISAI) yang menghasilkan

media alternatif yang ditujukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan sistem sensor media. Belakangan Mohamad juga membentuk the Alliance of Independent Journalists atau lebih dikenal AJI, yang sering dianggap sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang independen. Segudang penghargaan jurnalistik dan prestasi dalam dunia kewartawanan melat pada sosok Goenawan Mohamad. Sebagai anggota Advisory Committee ICIJ, pertanyaan dalam hati saya, apakah beliau tahu detail proses penyelidikan ini dan adakah kaitannya dengan perjuangan penegakkan HAM di Indonesia?

- Setelah saya membaca sendiri dokumen yang dimaksud (dokumen FARA), maka politisasi kasus ini untuk menekan pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus Munir akan semakin berat. Atau bila dibalik akan memudahkan pemerintah untuk akhirnya mengambil langkah-langkah nyata dan tegas dalam penyelesaian kasus Munir, tentunya dengan kalkulasi resiko seperti yang diungkapkan Gus Dur. Hal ini mirip dengan argumentasi akan lebih mudah "menjatuhkan" Suharto dengan memanfaatkan tekanan luar negeri bersamaan dengan gerakan dalam negeri dibandingkan tanpa adanya tekanan luar negeri. Mungkin memang perlu diakui bahwa solidaritas terhadap perjuangan Munir Thalib cukup kuat baik di dalam maupun di luar negeri. Tetapi karena kuatnya kelompok di dalam negeri, maka dianggap perlu untuk terus mencari cara menekan pemerintah Indonesia melalui tangan-tangan luar negeri.

- Mengapa akhirnya terkonsentrasi pada kasus Munir, karena untuk persoalan Aceh dan Papua bisa dilihat bahwa tekanannya tidak ke sana.
- Secara pribadi saya sangat salut dengan pimpinan BIN yang berani menempuh resiko dengan melobby Kongres melalui sebuah lembaga lobby. Saya tahu bahwa salah seorang tokoh BIN yang ikut serta adalah seorang agent senior yang sekarang menjadi deputi yang telah malang melintang di Amerika bertahun-tahun dan telah memperhitungkan segala sesuatunya. Target mencairkan kembali program IMET bisa dianggap sukses besar. Sementara dampak timbulnya tekanan pada kasus Munir adalah efek samping yang tidak terhindarkan. Belajar dari kasus tersebut, mengapa pemerintah Indonesia tidak pernah memikirkan untuk memiliki institusi yang bisa dipercaya khususnya dari kalangan swasta yang bonafid untuk bertindak atas nama Indonesia? Tanpa bermaksud mencemooh prinsip-prinsip kedaulatan dan kemandirian NKRI, fakta dalam politik internasional maupun hubungan internasional menunjukkan bahwa tekanan internasional, khususnya dari negara superpower seperti Amerika Serikat tidak dapat diabaikan. Itulah sebabnya hampir seluruh negara di dunia memiliki Institusi, tokoh lobby atau jalur khusus untuk mempengaruhi opini publik, kebijakan dan hukum di Amerika. Contoh yang paling sederhana tentu saja Lobby Israel.
- Bagi Gus Dur masalah ini tentu perlu dibantah karena akan menjadi tanda tanya besar bagi kredibilitas pribadi maupun Yayasannya. Lebih jauh, Gus Dur tampak memberikan dukungan

kepada Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali, ketika Gus Dur menegaskan bahwa As'ad bersih dari kasus Munir dan beliau adalah satu-satunya pimpinan BIN yang tidak dicopot dalam kepemimpinan Syamsir Siregar.

- Sebagai tambahan, pada 27 Oktober 2005, sebuah grup yg teridri dari 68 anggota the U.S. Congress mengirimkan sebuah surat kepada Presiden SBY yang intinya: *urging his government to implement the investigative team's suggestions on the Munir killing. "We understand the [report] suggests that the government should create a new commission with a strong mandate to explore the evidence wherever it may lead, including enforcement of full cooperation of all state agencies, including [BIN]."*

Bahkan sebuah surat yang didukung oleh dua partai politik (REPUBLIC-DEMOCRAT), disponsori bersama oleh Reps. Mark Kirk, R-Ill., and Jim McDermott, D-Wash., memberikan catatan : *"Munir devoted his life to finding the truth, and in the end he gave his life for that cause. Now his own death is the subject of an unprecedented fact-finding report. We strongly urge your government to fulfill Indonesia's promise as an open and democratic society by publicly releasing the report and acting on its recommendations."*

- Diperoleh informasi juga bahwa tokoh kunci dalam pembahasan HAM Indonesia di Kongres Amerika, Senator dari Partai Democrat, Patrick Leahy dari Vermont, baru-baru ini memasukan sebuah "provision" (ketentuan/syarat) kepada Senat dalam

tahun fiskal 2007 untuk Foreign Operations Appropriations Bill (belum melewati Kongress) yang mewajibkan the Secretary of State untuk menyerahkan sebuah laporan kepada the Committees on Appropriations "status investigasi kasus Munir Said Thalib, termasuk upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk menangkap setiap individu yang memerintahkan pembunuhan tersebut dan aksi lainnya yang diambil oleh pemerintah Indonesia (termasuk Peradilan Indonesian, Polisi dan Badan Intelijen Negara[BIN]), untuk membawa individu yang bertanggung jawab ke depan hukum."

- Informasi terakhir mengenai langkah yang ditempuh Leahy semakin jelas, bahwa konsentrasi persoalan memang ke arah tekanan untuk penuntasan kasus Munir. Seperti pernah saya ungkapkan dalam tulisan saya tentang kasus Munir yaitu Duka Cita Para Intel dan AM Hendropriyono Versus TPF Munir bahwa kasus Munir memang kompleks dan bahkan menyulitkan posisi Intelijen Indonesia secara keseluruhan (baik segenap anggota maupun institusinya). Posisi sebagian besar pemberitaan media dalam kasus Munir secara nyata telah menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap BIN (bila ada survey, saya berani bertaruh untuk asumsi ini). Lebih jauh, keresahan anggota intelijen dalam bekerja untuk rakyat, bangsa dan negara Indonesia menjadi semakin nyata. Karena saat ini praktis hanya intelijen sipil BIN yang tidak jelas masa depannya. Mulai dari ketiadaan payung hukum yang jelas, tuduhan secara institusional yang berarti menggeneralisir BIN sebagai salah satu lembaga

pelanggar HAM, dan sekarang secara khusus ada tekanan internasional (Amerika) yang khusus mengarah pada BIN melalui kasus Munir.

- Pemberitaan tentang pernyataan AM Hendropriyono di depan kader PDI-P (masalah kata **diMunirkan**) cukup tendensius dalam menggiring opini publik ke arah kesimpulan tertentu. Begitu juga soal hubungan telepon genggam/HP Muchdi Pr dengan Pollycarpus dan pada akhirnya akan berputar-putar dalam argumentasi hukum. Semakin lama kasus Munir semakin terbengkalai dan semakin sulit pembuktiannya di depan hukum. Bila semua hanya berangkat dari dugaan ataupun diduga kuat, maka sistem peradilan nasional Indonesia tidak akan bisa memutuskan sebuah keputusan hukum tanpa adanya bukti hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu, bila masalah hukum ini kemudian dicampur aduk dengan tekanan politik dari sejumlah tokoh penting negara superpower Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia, bisa dibayangkan semakin kompleks dan rumitnya masalah ini.
- Dari pengakuan beberapa anggota aktif BIN, ada sedikit berita yang mengiris hati, yaitu praktis BIN semakin dikebiri dengan berbagai persoalan yang membayangi. Mungkin tidak pernah terbayangkan oleh publik, bahwa tidak sedikit anggota BIN yang sungguh sungguh ingin membawa BIN menjadi organisasi profesional yang pro-gerakan demokrasi, penegakan hukum dan perlindungan HAM.

- Bila rekan sahabat Blog I-I bertanya bagaimana lantas posisi Senopati Wirang, hal ini sungguh sangat sulit. Meski misalnya saya memiliki data cukup belum tentu saya bisa merekomendasikan satu obat mujarab berdasarkan kalkulasi resiko yang akan dilalui Presiden SBY, Kapolri, BIN, maupun Peradilan Indonesia atas pilihan-pilihan langkah strategis penuntasan kasus Munir pasca dokumen FARA. Saya percaya Presiden SBY dan anggota Kabinet bidang Polkam sudah memiliki informasi cukup. Penuntasan secara hukum masalah ini sampai pada sasaran yang dikehendaki atau berdasarkan dugaan kuat TPF Munir maupun para "aktivis HAM" Indonesia dan luar negeri akan sulit karena lemahnya kecukupan barang bukti yang bisa dibawa ke pengadilan. Hal ini cukup jelas terlihat dari hasil kerja dan temuan TPF selama masa kerjanya dan hasil rekomendasinya, bahkan dari jalannya sidang kasus Munir di pengadilan. Mungkin bagi Senator Patrick Leahy kondisi ini cukup empuk untuk menjadi "pekerjaan rumah" bagi persoalan HAM Indonesia yang digelutinya. Leahy mungkin juga sudah melihat kondisi obyektifnya, dan justru karena kerumitan masalah inilah, maka beragam dugaan/asumsi dengan mudah digunakan secara logis untuk meyakinkan salah satu sudut pandang yang bisa menggiring opini publik.
- Sementara itu, kebenaran kasus Munir justru akan semakin kabur dan semakin jauh dari meja hukum karena memang ketiadaan barang bukti baru yang bisa digunakan untuk membuka kembali atau menuntaskan kasus Munir. Semakin performance

pemerintah Indonesia menjadi lebih buruk dalam kasus Munir, semakin membuka kesempatan bagi orang-orang seperti Leahy untuk terus menekan dengan alasan yang telah dipersiapkan dan cukup meyakinkan publik Amerika. Bila pun akhirnya-pun tekanan itu semakin kuat, maka pemerintah dalam hal ini Presiden SBY harus mampu mengambil langkah yang tepat, seperti dalam permainan catur, pengorbanan atau ketiadaan langkah terbaik karena hasilnya tetap pengorbanan. Nah siapa yang dikorbankan itu tergantung dari kalkulasi resikonya.

Bila ada kekeliruan data, mohon rekan-rekan sahabat Blog I-I memberikan koreksi.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /**Saturday, September 09, 2006**

Kepemimpinan Sipil BIN

Sekitar sebulan yang lalu, tepatnya sekitar hari-hari menjelang lebaran seorang lingkaran dekat Presiden menanyakan pendapat saya tentang calon pengganti Kepala BIN, Syamsir Siregar.

Beberapa nama yang beredar cukup menarik untuk dibahas, baik dari mereka yang berlatar belakang militer maupun sipil. Saya tidak akan membahas mereka yang berlatar belakang militer, karena siapapun Jenderal Bintang dua, tiga atau empat yang duduk di pucuk pimpinan BIN jarang mengalami resistensi internal maupun kemampuan dalam pengelolaan jaring intelijen domestik dan internasional.

Saya akan melakukan perbandingan antara dua calon dari kalangan sipil yang memiliki kans yang sama kuat, yaitu antara Sdr. As'at Said Ali dan Sdr. Makarim Wibisono.

Dari sudut pandang supremasi sipil dan pementapan organisasi intelijen sipil, maka kedua tokoh tersebut sama-sama menjanjikan reformasi organisasi BIN menjadi seperti CIA atau seperti lembaga intelijen sipil lainnya di dunia. Hal itu tentu bukan berarti terjadi pergeseran dari sifat militeristik menjadi murni sipil. Faktor penting dari kepemimpinan sipil semata-mata hanya bermakna simbolik bahwa dalam dunia intelijen Indonesia, kepemimpinan sipil tidak lagi diharamkan.

Selama ini, kepemimpinan sipil dikebiri dalam opini ketidakmampuan ataupun ketidaktegasan karakter yang sulit diperbaiki. Sementara kepemimpinan militer hampir selalu menjadi pilihan terbaik.

Tulisan ini bukan bermaksud menciptakan dikotomi sipil-militer, karena hal ini harus dibuang jauh-jauh dari benak komunitas intelijen. Apa yang dibutuhkan oleh dunia intelijen Indonesia adalah kepastian hukum,

pembinaan karir yang baik serta mekanisme dan sistem organisasi yang mantap. Kemudian mengenai siapa-siapa yang mengisi posisi-posisi penting intelijen tidak memandang seseorang itu sipil atau militer, melainkan dilihat dari kemampuannya. Sekali lagi bila seorang sipil naik sampai puncak pimpinan BIN, maka hal ini menjadi sebuah momentum keseimbangan yang di masa mendatang akan semakin mendewasakan sikap para pemimpin intelijen dalam memandang latar belakang seorang pimpinan intelijen, yaitu berdasarkan pada kemampuan dan prestasi.

Saya pribadi melihat bahwa kepemimpinan intelijen Indonesia baik dari kalangan sipil maupun militer telah memperlihatkan prestasi tersendiri yang tidak perlu diungkapkan. Sedangkan dari sisi kekurangannya kita juga bisa memperhatikan sejumlah pemberitaan yang menerpa dunia intelijen Indonesia.

As'at atau Makarim

Dari sudut pandang kapasitas intelektual, saya kira gelar-gelar akademis tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran. Karena meski hal itu secara jelas memperlihatkan sebuah catatan tertulis tentang prestasi seseorang, namun hal itu tidak menjamin seseorang mampu menjadi pimpinan intelijen.

Dari sudut pandang jaringan intelijen, Sdr. Makarim Wibisono mungkin bisa memperbesar kerjasama intelijen internasional dan menciptakan unit intelijen aktif (spionase). Hal sama tentu saja bisa dilakukan oleh Sdr. As'at karena pengalaman luar negeri Sdr. As'at yang begitu luas. Tetapi bagaimana dengan jaringan intelijen domestik yang utamanya diarahkan

pada kontra-intelijen, kontras-spionase, kontra-terorisme. Sdr. As'at jauh lebih unggul dibanding Sdr. Makarim.

Dari sudut pandang kedekatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik dalam negeri. Nilai lebih Sdr. Makarim hanya kedekatan dengan SBY dan lingkarannya dan basis organisasinya, yaitu Deparlu. Terbuka pula kemungkinan Makarim memiliki akses dengan sejumlah tokoh politik dalam negeri. Sementara itu, Sdr. As'at diterpa gosip kedekatan dengan PDI-P dan Partai Golkar, sehingga sebagian kalangan SBY merasa khawatir. Padahal Sdr. As'at lebih tepat bila dilihat sebagai tokoh intelijen yang memiliki kedekatan dengan hampir seluruh kelompok Islam Moderat di dalam negeri. Lebih jauh, sebagai seorang organik intelijen, bisa dikatakan bahwa semua unsur intelijen tidak ada bedanya dengan prajurit perang yang tidak akan melakukan pembangkangan politik kepada pimpinan negara (Presiden).

Dari sudut pandang organisasi, kekecewaan yang sangat besar akan dialami oleh lebih dari 80% organik BIN bila akhirnya orang sipil pertama yang memimpin BIN bukanlah seseorang yang sama-sama berjuang di dalam organisasi dalam waktu yang lama. Saya mendengar kabar akan ada pengunduran diri besar-besaran dari jajaran pimpinan BIN sebagai bentuk protes. Saya perkirakan hal ini akan menjadi awal kejatuhan SBY, yang bisa jadi akan semakin terpuruk popularitasnya.

Dari sudut pandang keinginan untuk memanfaatkan Sdr. Makarim sebagai bumper/martir menyelesaikan masalah HAM, khususnya kasus Munir. Saya kira setelah Sdr. Makarim melakukan evaluasi langsung pada intisari permasalahan juga akan terdiam seribu bahasa. Hal yang sama juga akan menimpa kepemimpinan Sdr. As'at, bahkan siapapun dari kalangan militer.

Perlu diketahui bahwa meskipun Sdr. As'at dan sebagian besar pimpinan sipil BIN bersih dari kasus Munir, namun kode etik dan sumpah intelijen sudah menjadi darah daging kehidupan insan intelijen. Khusus untuk masalah ini, sebaiknya SBY sendirilah yang mempersiapkan diri untuk mengambil langkah berani, sehingga seluruh jajaran polkam akan memberikan dukungan penuh.

Dari sudut penerimaan kalangan militer. Saya kira bila secara definitif kepemimpinan sipil bisa mencapai puncaknya di BIN, kalangan militer akan bisa menerima. Hanya saja hal ini membutuhkan kerja ekstra bagi seseorang yang jarang berinteraksi dengan kalangan militer.

Catatan penting!!!! Kepemimpinan saat ini ada ditangan Sdr. Syamsir Siregar yang meski saya lihat agak kelelahan selama memimpin BIN, telah menunjukkan dan meneruskan tradisi organisasi BIN yang terus berusaha meningkatkan profesionalitasnya. Seperti kita lihat bersama, persahabatan sipil-militer dalam tubuh BIN bisa tetap terjaga atas dasar saling menghormati dan bekerjasama dalam memenuhi tugas pokoknya.

Sekian

Senopati Wirang

Posted by Senopati Wirang /**Sunday, December 03, 2006**

Diskriminasi Penghasilan di BIN

Kurang lebih sebulan yang lalu saya mengangkat tema yang langsung membidik BIN, yaitu tentang kepemimpinan sipil BIN. Tidak disangka tidak dinyana berbagai pertanyaan mengenai pertimbangan siapa yang pantas menggantikan Sdr. Syamsir Siregar berhamburan ke Blog I-I. Di awal Januari ini isu itu kembali berhembus dan kali ini bukan di Istana melainkan di kalangan DPR, baca detik.com edisi 9-10 Januari 2007. Sungguh menarik karena saya bisa merasakan mayoritas anggota Dewan telah melihat sosok yang paling tepat untuk diangkat. Sementara dari pihak SBY justru masih terikat dengan janji ke kalangan dekat (eks Tim Sukses) serta hasil bisikan agen-agen CIA di Istana. Berapapun nama diajukan SBY, sebenarnya hanya ada satu calon yaitu yang pernah dijanjikan SBY.

Berlawanan dengan keinginan SBY, kondisi nyata di DPR dan organisasi BIN sungguh mendambakan kepemimpinan sipil dari dalam BIN.

Wah judul artikel tidak nyambung dengan paragraf pembukaan.....??? maklum sudah semakin pikun. Baiklah....akan saya kait-kaitkan dengan judul artikel kali ini.

DISENSOR ATAS PERMINTAAN AGEN P5

Berikut ini catatan yang diberikan agen P5 :

Yth. Pak Seno

Saya hanya ingin berbagi pendapat soal diskriminasi yang Pak Seno sebut-sebut dalam artikel yang berjudul **Diskriminasi Penghasilan di BIN**. Semoga Pak Seno berkenan dan juga menjadi bahan pemikiran bagi rekan-rekan pembaca Blog I-I.

Pertama, sangat tidak etis membeberkan "kelemahan" organisasi ke dalam media Blog I-I yang bisa dibaca di seluruh dunia. Kekecewaan yang mendalam dari sejumlah oknum yang mengirim informasi/e-mail kepada Pak Seno masih kurang cukup bila dijadikan satu-satunya referensi tulisan yang tendensius dan penuh tuduhan tersebut. Alangkah baiknya semua informasi dikumpulkan dan kemudian dikonfrontasikan langsung kepada pimpinan intelijen guna mendapatkan tanggapan yang berimbang.

Kedua, sadar maupun tidak sadar Pak Seno telah berkontribusi dalam merusak citra organisasi intelijen negara yang sedang dibangun. Alangkah baiknya jika memang ada hard fact tentang kerusakan organisasi di sektor manapun segera dilaporkan ke pihak yang berwenang. Kritik membangun ke dalam organisasi lebih diperlukan daripada teriak-teriak meludahi wajah sendiri (meminjam istilah Pak Seno, maaf).

Ketiga, dalam pengamatan saya Pak Seno telah memiliki pengaruh luas karena benar adanya bahwa Pak Seno telah menjadi bahan pembicaraan yang melebihi orang-orang intel yang telah dikenal publik di negeri ini. Posisi "maya" Pak Seno yang signifikan ini sebaiknya lebih terarah pada

reformasi dan penguatan organisasi intelijen yang tidak mengabaikan citra organisasi di mata masyarakat.

Demikian pendapat saya, mudah-mudahan Pak Seno tidak tersinggung dan menjadi bosan menyoroti dunia intelijen Indonesia.

Terima kasih

Posted by Senopati Wirang / **Wednesday, January 10, 2007**

Kepada Yang Tersayang Adik-Adik STIN

Tiga hari yang lalu seseorang menyampaikan peringatan bahwa Blog I-I bisa berdampak negatif kepada calon-calon agen potensial yang sedang digembleng. Karena Blog I-I hanya memberikan kesan suramnya masa depan karir di dunia intelijen. Diperkirakan telah terjadi penurunan semangat di kalangan calon agen setelah membaca tulisan-tulisan gila dari Senopati Wirang.

Sebelumnya saya mohon maaf bila tulisan dalam Blog I-I dianggap mengandung racun yang mematikan.

Secara singkat saya ingin membesarkan hati adik-adik bahwa kesuksesan hidup dunia tidak semata-mata dilihat dari cemerlangnya jalur karir, tidak dari gemerlapnya penghasilan harta, tidak dari kejeniusan belaka. Melainkan secara utuh menjadi bagian jati diri patriot bangsa yang merupakan identitas prajurit intelijen yang tidak cepat puas dan tidak cepat menyerah. Sesungguhnya hakikat keberhasilan berkarir di dunia intelijen bukan hanya terletak pada bukti-bukti suksesnya sebuah analisa atau operasi, melainkan lebih ke dalam prinsip hidup kita yang mengabdikan pada keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Andai pun harus mati demi prinsip tersebut akan terasa nyaman dan ringan. Perhatikan mereka yang menjadi legenda dalam dunia intelijen, banyak yang dihargai setelah melalui hinaan dan penderitaan. Hal itu semata-mata hanya tragedi kehidupan dimana intelijen dengan segala citra hebatnya hanyalah manusia biasa yang memegang keyakinan tentang fungsinya untuk menjaga seluruh komponen bangsa dari kehancuran. Ini hanya sebuah

pesan yang membuat saya masih hidup bergairah menyoroti dunia intelijen Indonesia. Merupakan pesan turun-temurun dari senior intelijen sejak masa perjuangan yang sebagian telah diabadikan dalam janji prajurit perang fikiran (semoga diajarkan di sekolah).

Sekian dan mohon maaf bila Blog I-I telah meracuni pikiran adik-adik. Saya terbuka untuk berdiskusi kritis bila memang perlu dan kepada segenap rekan Blog I-I jangan sungkan untuk memberikan koreksi dan teguran.

Posted by Senopati Wirang / **Wednesday, January 10, 2007**

Intel Menjawab

Beberapa e-mail dari rekan-rekan pembaca Blog I-I berisi keluhan dan pertanyaan bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang intel. Saya jadi teringat sekitar 20an tahun silam ketika beberapa intel junior dalam komunitas intelijen Indonesia bersenda gurau dan saling bercerita tentang betapa repotnya menjalani tugas sebagai anggota intelijen dalam kehidupan sehari-hari. "Enaknya" pada era Orde Baru adalah bahwa kekuasaan begitu besarnya, sehingga kerisauan intelijen itu hanya sebagai obrolan ringan setelah mendapatkan pelatihan masalah *cover* yang ideal.

Bagaimanapun juga, seorang intel adalah makhluk sosial dengan berbagai hubungan sosial yang harus dipelihara dengan baik serta dijalani secara normal seperti orang biasa.

Berikut ini, saya berikan beberapa catatan untuk rekan-rekan Blog I-I yang masih risau tentang menjalani kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat sekaligus juga sebagai petugas intelijen.

Pertama mempraktekan prinsip anonim. Seorang petugas intelijen perlu meresapi bahwa keberadaan dirinya yang terkait dengan institusi intelijen adalah tanpa nama. Saya sudah mencontohkan dengan eksistensi Senopati Wirang yang telah mengambil semua identitas, semua ide, semua intelektualitas jati diri saya yang kemudian dipublikasikan ke dalam dunia maya Blog I-I.

Kedua terkait dengan prinsip anonim, apabila sulit dihindari untuk terungkapnya identitas asli kepada keluarga, sahabat/teman, kolega kerja dari institusi lain, maka tidak ada gunanya apabila hal itu ditutup-tutupi dengan kebohongan. Langkah yang perlu ditempuh adalah dengan hanya mengakui adanya keterkaitan dengan institusi intelijen. Misalnya Saya Fulan bekerja di Baintelkam Polri, saya Johnny bekerja di BAIS TNI, saya Budi bekerja di Intelijen Imigrasi, saya Anto bekerja di BIN, saya Agus bekerja di Intelijen Kejaksaan Agung, dst. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa informasi itu tidak tersebar lagi lebih luas dengan meminta perhatian pihak yang sudah tahu. Lebih dari itu, misi utama, kegiatan, serta keahlian khusus anda sebagai petugas intelijen tetap dirahasiakan.

Ketiga terkait dengan keahlian khusus yang anda miliki sebagai seorang petugas intelijen, maka ada saat-saat dimana anda mendapat pelatihan/training. Sejumlah metode pelatihan adalah bersifat terbuka dan merupakan keahlian dasar yang wajib diketahui oleh seorang intel. Namun ada pelatihan yang sangat khusus yang sangat sensitif yang langsung terkait dengan pekerjaan anda, hal yang semacam ini bukan untuk dipamerkan ataupun diketahui banyak orang di luar organisasi. Sebagai contoh keahlian dalam menggunakan intelligence devices, keterampilan membunuh secara "wajar", dan keterampilan melakukan trick kotor intelijen. Saya kira rekan-rekan Blog I-I senior akan bisa mengingat siapa saya, karena keterampilan yang saya peroleh di CIA dan Mossad pada tahun 80-an hanya diikuti oleh sangat sedikit orang. Karena

sedikit itulah, maka saya cukup percaya diri akan kerahasiaan yang akan selalu melindungi.

Keempat masalah verifikasi pekerjaan yang harus dilakukan ketika kita melakukan hubungan dengan dunia praktis di sekitar kita. Misalnya hal ini terkait dengan hubungan dengan Bank (tabungan, kredit pinjaman, kartu kredit, dll), kepemilikan properti, dan data-data administrasi lainnya. Adalah sangat penting untuk mempersiapkan cover job yang sempurna, dalam artian benar-benar ada sampai pada tingkat verifikasi dan back stopping yang kuat.

Kelima masalah hubungan dengan media massa. Sebuah situasi yang ideal adalah keberadaan sebuah Divisi atau Direktorat Kebijakan Informasi Publik atau semacam Humas/PR. Organisasi Intelijen dari waktu ke waktu akan menjadi berita di media cetak, TV maupun internet. Oleh karena itu Divisi yang bertanggungjawab yang memberikan pernyataan resmi. Dalam kasus Indonesia, pimpinan Intelijen seperti KA BIN, KA BAIS, KA BAINTELKAM, sekaligus merangkap menjadi humas. Apabila anda telah mencapai posisi yang tinggi dan mulai dikenal publik, jangan sekali-kali memberikan konfirmasi ataupun penyangkalan atas sebuah informasi yang terkait dengan organisasi intelijen di mana anda bekerja. Jawaban singkat berupa *no comment* sudah cukup. Bahkan bila anda masih pada tingkatan yang lebih rendah, jangan sekali-kali memberikan konfirmasi atau penyangkalan walaupun hanya sebagai bincang-bincang ringan dengan anggota keluarga atau teman.

Keenam terkait dengan masalah kewaspadaan seorang intelijen adalah melekat dan sungguh-sungguh dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi *otomatis duluan* seperti iklan sebuah produk motor automatic. Misalnya dalam kasus konflik komunal, terorisme, dan kegiatan intelijen asing, maka menjadi kewajiban untuk melaporkan apabila anda sungguh-sungguh menemukannya walaupun itu di luar tugas pokok unit anda.

Ketujuh terkait masalah tingkatan klasifikasi informasi yang cara menanganinya. Mulai dari catatan tulisan tangan anda sampai laporan khusus. Secara umum hanya ada tiga tingkatan kerahasiaan yaitu Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia. Namun tingkatan itu bisa saja diperbanyak tergantung keputusan pimpinan masing-masing organisasi.

Kedelapan adalah prinsip need-to-know yang harus secara ketat dijalani dalam keseharian kerja seorang intelijen. Banyak omong, distribusi laporan yang sembarangan, atau kekeliruan dalam proses pelaporan adalah hal-hal yang bisa merusak mekanisme kerja intelijen. Mungkin anda berpikir Blog I-I sudah melanggar prinsip ini, saya tidak menyangkalnya karena Blog I-I memang menjadi konsumsi publik. Pembelaan saya adalah bahwa saya membuka diri untuk koreksi dari siapapun untuk bisa menyajikan sebuah proses pembelajaran dan reformasi Intelijen Indonesia.

Kesembilan prinsip For Official Use Only (FOUO) harus secara ketat diterapkan dalam setiap dokumen yang diberikan tanda Untuk Kepentingan Dinas. Jangan sampai anda campur adukkan dengan keseharian pekerjaan rutin maupun pribadi. Anda berkesempatan memanfaatkan informasi-informasi penting untuk hal-hal yang menyimpang. Misalnya untuk pemerasan, untuk mencari keuntungan, untuk membuka peluang bisnis, untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Oleh karena itu, janganlah tergoda untuk menjerumuskan diri ke situasi tersebut.

Kesepuluh masalah publikasi karya seorang petugas intelijen. Diperlukan persetujuan dari pimpinan intelijen untuk setiap publikasi seorang petugas intelijen yang mungkin berisi data-data intelijen. Bahkan meskipun bila anda sudah pensiun seperti saya, ada sebuah proses review atas hasil karya anda. Sekali lagi rekan-rekan Blog I-I akan bingung, apakah Blog I-I sudah direstui? jawabnya tanyakan pada jajaran pimpinan Komunitas Intelijen Indonesia (IC). Apapun kontroversinya, Blog I-I sekali lagi memberikan ruang koreksi yang sangat luas kepada organisasi intelijen di Indonesia untuk klarifikasi, koreksi, sensor, dan apapun namanya dengan catatan atau alasan yang dimenegrti Blog I-I.

Kesebelas masalah pengamanan pribadi anda sebagai seorang petugas intelijen. Ketika seorang petugas intelijen keluar dari kantornya, ada begitu banyak informasi yang ada di kepalanya. Oleh karena itu, seorang petugas intelijen juga menjadi target pihak oposisi yang ingin

membongkar informasi dari organisasi intelijen. Karena itu waspadalah dan jagalah keselamatan anda di manapun berada.

Keduabelas masalah hubungan dengan warga negara asing. Petugas Intelijen Indonesia seyogyanya waspada terhadap infiltrasi agen-agen asing ke dalam organisasi dan usaha-usaha menjadikan anda seorang double agent. Setiap hubungan dengan orang asing mencakup percintaan, kewajiban dalam satu organisasi internasional, dan hubungan profesional lainnya pada prinsipnya wajib diketahui organisasi. Apalagi jika hubungan tersebut menjadi semakin erat, misalnya dari percintaan mengarah pada pernikahan, harus ada proses clearance yang teliti. Meski begitu, hubungan-hubungan dengan WNA yang memang dirancang dalam sebuah rencana operasi yang dikendalikan oleh Case Officer dari Markas Pusat adalah sah-sah saja.

Ketigabelas korespondensi dengan warga negara asing. Berbeda dengan poin nomor dua belas, maka masalah korespondensi bisa dibedakan korespondensi sosial (*penpa*) dan korespondensi strategis, yaitu yang membahas aspek-aspek pekerjaan intelijen. Korespondensi yang berpotensi membahas pekerjaan organisasi adalah dilarang atau setidaknya diketahui pimpinan atau menjadi bagian dari operasi intelijen. Meskipun sangat sulit, karena sekarang sudah menjadi begitu cepat prosesnya melalui internet, maka tanggung jawab kontrolnya ada di tangan anda.

Keempatbelas Masalah mengunjungi Kedutaan Besar negara lain atau bertemu dengan diplomat asing. Karena dalam setiap Kedutaan Besar asing selalu ada agen intelijen, maka seorang petugas intelijen tidak dianjurkan untuk berkunjung ke Kedutaan Besar atau menemui diplomat asing (bisa jadi diplomat intel). Urusan Visa, dan masalah-masalah yang terkait dengan Kedutaan Besar asing seyogyanya dikondultasikan dengan unit liaison agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Kelimabelas masalah kegiatan radio amatir yang rawan dari eksploitasi intelijen asing termasuk kepemilikan website yang bisa membongkar individu-individu penting intelijen. Blog I-I berkali-kali menjadi sasaran desepsi asing yang seolah-olah merupakan sumbang saran dari sesama rekan Blog I-I yang nasionalis. Itulah sebabnya Blog I-I sangat berterima kasih kepada beberapa agen senior dan sedikit pimpinan intelijen yang memberikan perhatian berupa teguran, kritik, saran dan konfirmasi.

Keenambelas masalah perjalanan pribadi ke luar negeri. Setiap petugas intelijen Indonesia yang melakukan kunjungan ke luar negeri dalam urusan pribadi harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan intelijen. Hal ini terkait dengan pengamanan. Hukuman kepada petugas intelijen Indonesia yang lalai atau sengaja tidak melaporkan kunjungan ke luar negeri maksimal dikeluarkan dari kedinasan. Ini merupakan masalah prinsip disiplin petugas demi terjaganya fungsi pengawasan yang maksimal dari penghianat di dalam organisasi. Misalnya saja, pada tahun 1979 saya melakukan kunjungan pribadi kepada seorang tokoh KIN yang tersingkir

ke Taiwan, saya melaporkan secara rinci rencana tersebut langsung kepada pimpinan. Selain silaturahmi, ada misi memahami kebijakan baru RRC dalam kepemimpinan Teng Hsiao Bing.

Ketujuhbelas masalah keanggotaan dalam sebuah organisasi lokal, regional maupun internasional. Adalah sah-sah saja bila seorang petugas intelijen menjadi anggota atau bahkan pengurus organisasi. Persyaratannya sangat sederhana, jelas maksud dan tujuannya. Apalagi untuk organisasi internasional, tentu harus sepengetahuan pimpinan intelijen. Perlu diketahui bahwa ada organisasi yang dibentuk memang untuk menghancurkan organisasi intelijen, maka berhati-hatilah bila kegiatan yang dituju dalam organisasi bisa kontraproduktif terhadap kegiatan anda, pengecualian hanya bila ada dalam rencana operasi intelijen, misalnya organisasi target intelijen.

Kedelapanbelas masalah perubahan status pernikahan, perceraian, dan ganti nama. Kesemua itu wajib dilaporkan kepada organisasi.

Kesembilanbelas masalah narkoba adalah masalah yang sangat membahayakan kinerja seorang petugas intelijen. Hukuman berupa pemecatan secara tidak hormat adalah wajar.

Keduapuluh masalah senjata dan tanda pengenal dalam kantor pusat. Kedisiplinan dalam memperlakukan senjata dan tanda pengenal bagi petugas intelijen Indonesia adalah vital. Kedua hal tersebut melekat dalam identitas seorang petugas. Pada saat ke kantor pusat pemakaian

tanda pengenal adalah wajib, dan pada saat di luar tugas tanpa pengenal tidak boleh hilang ditempat umum. Demikian pula dengan senjata, kehilangan kedua hal tersebut bisa berakibat sanksi yang berat.

Keduapuluhsatu masalah kehilangan informasi penting harus dilaporkan kepada pimpinan langsung untuk dilakukan review tingkat resiko yang bisa ditimbulkan. Misalnya ketika terjadi pembocoran dari dalam organisasi hal ini harus diselidiki secara seksama untuk mengetahui pihak yang membocorkan yang bisa dihukum dengan pemecatan.

Keduapuluhdua masalah penggunaan jalur telepon dan fax aman dan tidak aman. Untuk pembicaraan yang rahasia seperti rencana operasi, maka wajib menggunakan jalur telepon aman yang bebas penyadapan. Anda bisa menggunakan berbagai metode, alat, atau sandi (encrypted).

Catatan tersebut di atas hanya sebagai masukan demi profesionalitas petugas intelijen yang memahami kewajibannya dalam menjalankan tugas serta menjalani kehidupan wajar sehari-hari. Bila rekan Blog I-I ada tambahan ide, silahkan ditambahkan.

Sekian, semoga bermanfaat

Posted by Senopati Wirang /**Saturday, February 24, 2007**

Cambridge Circus

"I get so angry but I keep my mouth shut"

Begitulah ekspresi seorang Senopati Wirang bila harus mendongeng tentang Cambridge Circus. Buat rekan-rekan yang belum terlalu banyak tahu tentang kisah-kisah penghianatan intelijen, ada baiknya mengunjungi link [Cambridge Circus](#) yang mudah-mudahan bisa mempersingkat waktu dalam memahami salah satu istilah yang wajib diketahui oleh insan intelijen. Namun bila rekan-rekan Blog I-I ingin lebih serius lagi maka akan sangat baik untuk membaca buku John Le Carre atau menonton film berikut ini :

Adalah seorang [Bird Commander](#) yang memancing saya untuk menulis artikel ini.

Silahkan dilanjutkan bila tertarik.....sebelum rekan-rekan Blog I-I melanjutkan ada baiknya dipahami bahwa masalah ini sangat serius sehingga saya harus sangat berhati-hati dalam penulisannya. Pertama-tama perlu diketahui bahwa kisah tentang Mole (agen penetrasi yang ada di dalam organisasi intelijen, umumnya double agent) merupakan keniscayaan yang sulit dihindari dalam dunia intelijen. Hal itu menjadi natural bagi orang-orang intel dan sangat dipahami bahwa tingkat probabilitasnya cukup tinggi. Di Indonesia pernah dihebohkan dengan kasus Susdaryanto yang kemudian menjadi catatan klasik dunia intelijen Indonesia. Belajar dari kasus tersebut, para tikus-tikus bermain dalam tataran yang lebih aman yaitu dengan mengembangkan sayap-sayap

pendukung yang kuat serta menghindari pertemuan langsung di Indonesia. Dengan mengandalkan alat komunikasi yang relatif lebih canggih dari alat-alat yang dimiliki Intelijen Indonesia, para tikus bisa merasa aman, dan demikianlah faktanya.

Celaknya Blog I-I melihat bahwa beberapa tikus tersebut termasuk intel andalan di jajaran Polri, TNI dan BIN. Tentu saja tuduhan Blog I-I akan berdampak serius dengan tuntutan adanya klarifikasi dengan fakta dan tunjuk muka siapa si tikus yang dimaksud. Sejujurnya Blog I-I tidak bisa tunjuk muka atau memberikan DPO Circus yang dimaksud. Mengapa demikian? karena memang tidak pernah ada lagi operasi pengungkapan infiltrasi intel asing ke dalam tubuh organisasi keamanan Indonesia. Selain dianggap naif dan mengada-ada, setiap kecurigaan ke arah sana selalu didahului oleh kelihaian para tikus untuk menghentikan kecurigaan tersebut.

Berikut ini saya kategorikan beberapa jenis kelompok Circus : Pertama **Circus Merdeka Philip** dibentuk pada masa operator CIA senior keturunan Vietnam bekerja di Indonesia, saat ini para tikus diperkirakan sudah atau akan menduduki posisi-posisi penting dalam organisasi Intelijen.

Kedua **Circus Graha TW**, motivasi pada uang dan aksi premanisme yang akan tergiring menuju gerakan membuka diri pada infiltrasi kepentingan China, Singapura dan Israel. Sangat kuat dalam organisasi TNI.

Ketiga **Circus Opera House** sedang bergerak cepat dalam tubuh Polri dan BIN, merupakan operasi penggalangan Australia yang memberikan begitu banyak bantuan uang dan teknis.

Keempat **Circus Mandarin** berjalan mantap karena sangat halusya senantiasa menjadi kepanjangan kepentingan negara-negara Eropa khususnya Inggris.

Kelima **Circus Sahara** yang secara berkelanjutan memposisikan Islam sebagai ancaman serius bagi NKRI, merupakan antek-antek Mossad yang sangat lihai.

Blog I-I mengangkat masalah Circus secara ringan hanya sebagai teguran halus sekaligus peringatan kepada rekan-rekan intel yang telah terperosok dalam permainan intelijen asing. Mengapa tidak secara keras dilakukan tindakan disiplin oleh pimpinan intelijen, Mabes Polri dan Mabes TNI? Blog I-I melihat bahwa kebanyakan anggota Circus tersebut masih dalam tahapan "tergalang" dan belum sungguh-sungguh melakukan pembelotan yang serius, motivasi harta dan karir gemilang merupakan faktor utama. Blog I-I meyakini bahwa mereka hanya salah jalan dan bisa kembali bertaubat. Dengan kata lain, hanya masalah waktu saja untuk proses pengumpulan bukti-bukti pro justisia, setidaknya di antara anda para tikus sudah ada yang bisa merasakan mengapa tiba-tiba karir anda mandeg bukan?

Semoga catatan yang dangkal ini tidak mengecewakan rekan-rekan Blog I-I.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /Tuesday, February 27, 2007

Refleksi Intelijen Indonesia

Tulisan ini tidak mengandung informasi yang akurat tentang peristiwa-peristiwa di tanah air. Hanya sebuah refleksi ringan.

Memang dasar negeri penuh misteri dan propaganda, hampir tak ada kasus yang benar-benar bersih dari unsur misteri alias ketidakjelasan informasi yang simpang siur. Itulah sebabnya teori konspirasi begitu laku. Bahkan sejujurnya lama-kelamaan saya jadi ikutan pusing. Bila kebenaran diungkapkan-pun tidak akan langsung bisa dilihat sebagai kebenaran. Melimpahnya informasi justru membuat pekerjaan intelijen menjadi harus ekstra hati-hati. Sementara itu, permainan demi permainan tanpa kenal ampun terus bergulir dari satu papan masalah ke masalah lain. Dari luar tampak sebuah dinamika yang sehat dan baik bagi kemajuan manusia Indonesia yang demokratis. Tetapi siapa yang bisa menduga kehancuran tiba-tiba Indonesia Raya bak kisah goro-goro ramalan Jayabaya.

Belakangan sejumlah kalangan mempertanyakan masalah Blog I-I, bisa dipercaya atau tidak? punya afiliasi dengan siapa? berapa besar jaring informasinya? apa maksud dan tujuannya? adakah kode-kode instruksi yang tersembunyi? membela kepentingan siapa? dst....dst....dst.

Kita akan sangat berbahaya apabila kita jujur di dunia yang penuh kebohongan. Ada yang perlu saya syukuri bahwa kepedulian rekan-rekan semakin lama semakin satu irama dengan Blog I-I, bahkan mereka yang kontra pun mulai berpikir panjang dan mengajak diskusi-diskusi sensitif tentang masa depan Indonesia. Sayang saya sudah lambat berpikir dan terlalu capek untuk mengikuti dinamika perkembangan yang begitu cepat.

Sebagai contoh, entah berapa puluh rekan Blog I-I yang menanyakan apakah artikel Blog I-I tentang Jamaah Islamiyah di Poso merupakan murni analisa Senopati Wirang. Perlu saya sampaikan bahwa simpati dan kesamaan visi dari rekan-rekan pembaca Blog I-I telah berkembang menjadi ikatan longgar untuk sharing informasi. Saya sendiri semakin sulit memperkirakan berapa besar perkembangan jaring informasi yang memiliki nafas sama Blog I-I. Banyak informasi yang merupakan serpihan fakta, banyak juga yang desepsi, serta tidak sedikit yang bertanya-tanya. Maka saya konfirmasi kepada rekan-rekan bahwa artikel dalam Blog I-I merupakan kumpulan dari sejumlah informasi dari rekan-rekan yang punya akses dan kemudian saya susun menjadi artikel yang mudah dibaca dan dipahami. Seperti pernah saya sampaikan dalam tulisan-tulisan awal, maka saya mematuhi kepatutan untuk tidak gegabah membahas suatu kasus yang masih dalam proses penyelidikan. Apalagi kasus sensitif gerakan kelompok teroris yang sedang dikejar-kejar Densus 88. Apabila saya bawaan oleh-oleh cerita tentang lolosnya NMT atau AD tentu akan pihak geregetan ingin menjitak kepala saya. Densus 88 sudah bekerja dengan sangat baik.

Informasi tentang Jamaah Islamiyah, NII KW 9, keterlibatan oknum aparat, keterlibatan intelijen asing, perang melawan teror, pembusukan citra Islam, adu domba Islam-Kristen, konflik komunal, operasi cabut mandat, masalah perampokan pasir oleh Singapura, sikap Malaysia yang arogan, isu HAM, kelompok neoliberal, bangkitnya Partai Komunis Indonesia, dll begitu simpang siur di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dalam forum komentar Blog I-I pun mulai tampak simpang siur yang saya

kewalahan untuk meresponnya satu per satu. Mudah-mudahan artikel-artikel dalam Blog I-I tidak semakin memperkeruh keadaan.

Ojo kagetan Ojo gumun kata mantan Presiden Suharto. Rekan-rekan juga tidak perlu emosional dalam menyikapi setiap suasana keruh yang disebabkan oleh menebalnya kabut persoalan yang harus disingkapkan oleh intelijen.

Bila Indonesia Raya memang berambisi menjadi negara 5 besar di dunia pada tahun 2030 dengan pendapatan per kapita US\$ 18.000 seperti diungkapkan oleh Presiden SBY, maka sudah tidak bisa ditawar lagi penguatan sektor intelijen sebagai garda depan penjaga keselamatan bangsa. Saya katakan demikian karena bila kita belajar dari RRC, jelas sekali bahwa sejak tahun 1960-an intelijen RRC yang dipimpin oleh Otak Revolusi Kebudayaan Kang Sheng yang telah merancang pondasi yang kokoh bagi intelijen modern RRC, diantaranya dengan pendataan seluruh Cina Perantauan yang potensial bagi pembangunan nasional RRC. Secara khusus misalnya ditetapkan target kepada Ilmuwan Cina Perantauan yang sangat cerdas untuk bekerja di luar negeri dan pada waktunya dipanggil kembali untuk membangun Cina. Kemudian target juga diarahkan kepada kapitalis Cina di dunia. Sehingga, meski Kang Sheng akhirnya harus dihukum karena tuduhan terlibat kasus Gang of Four. Intelijen RRC telah membangun jaring intelijen manusia yang luar biasa atau mungkin yang terbesar di dunia. Jaring itulah yang diteruskan oleh institusi intelijen untuk terus mendukung pembangunan RRC sebagai negara besar. Sehingga ketika terjadi pergeseran konsep pembangunan, tidak ada masalah atau gejolak yang berarti, secara mantap terjadi kesinambungan

dari pemimpin lama kepada pemimpin baru, bagaikan lari estafet yang tidak terputus di tengah jalan.

Bagaimana dengan Indonesia? dengan kondisi intelijen yang tercerai berai, kondisi demokrasi yang sarat politik kepentingan, adakah jaminan bahwa program pembangunan Indonesia akan konsisten dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Bukankah hampir menjadi tradisi di Indonesia untuk terjadinya jeda/putusnya kesinambungan pembangunan ketika terjadi perubahan pemimpin. Oh entah kapan lahir kesadaran komunal seluruh komponen bangsa untuk berperilaku benar demi kelangsungan Indonesia Raya.

Masalah yang ini belum selesai, meledak masalah yang itu. Masalah yang itu sedang ditangani, muncul lagi masalah yang lain, begitu dari waktu ke waktu. Derap langkah pembangunan yang tertatih-tatih dalam perbedaan konsep, keyakinan, kepentingan, strategi dan bahkan sampai level taktik pun terjadi perbedaan yang mengarah pada konflik.

Hal itu belum menyoroti soal kinerja. Tanggung jawab anggaran pemerintah yang hampa kinerja semakin rusak manakala para pelakunya bahkan tidak mengerti apa yang dimaksud bekerja sesuai dengan rencana yang dianggarkan. Ditengah perjalanan banyak bermunculan lembaga-lembaga ekstra (fungsional) karena lembaga struktural tidak berfungsi. Ada kesan banyak yang ingin berbuat namun hanya sebatas ingin saja, berandai-andai tanpa kerja nyata yang bisa dipertanggungjawabkan.

Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kontrol yang lemah di berbagai sektor baik di pusat maupun di daerah. Semuanya menjadi sebuah ramuan

maut yang mematikan. Sementara para pelakunya memiliki keyakinan aji mumpung yang sangat kuat. Mumpung aparat masih bisa dibeli, mumpung hukum masih bisa pilih kasih, mumpung pemerintahan bisa disandera oleh kepentingan politik, dan jutaan mumpung lainnya.

Insan intelijen yang ideal di Indonesia adalah sekumpulan orang stress yang nyaris gila karena harus melihat kenyataan pahit sulitnya menangkap asap tanpa menyeret anginnya. Sebuah pesan revolusi untuk menyalakan api karena asap akan hilang bila apinya sudah menyala. Atau menuang tuba/endrin bening ke dalam air agar ikan mati keluar dari dalam air dan mengapung, sehingga air tak bergolak ataupun menjadi keruh. Lagi-lagi pesan revolusi yang sungguh Blog I-I tidak setuju, karena sangat jarang terjadi revolusi damai, apalagi dalam sejarah bangsa Indonesia.

Tetapi tidak berarti intelijen ideal harus menyerah pada keadaan dan duduk bengong tanpa berbuat apapun. Manfaatkanlah Blog I-I untuk kepentingan bersama. Tegurlah Senopati Wirang bila ada artikel yang bernada kebohongan, fitnah, ataupun pengelabuan. Koreksilah untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sampaikanlah kebenaran informasi intelijen walaupun pahit. Tentunya perlu rekan-rekan renungi dahulu tingkat sensitifitas informasi yang pantas diangkat dalam Blog I-I, bisa dilihat dari manfaat yang bisa diberikan.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /Friday, March 23, 2007

Duduk Perkara Mossad dan Intel Asing di Indonesia

Mohon maaf kepada seluruh komponen bangsa Indonesia bila Blog I-I mengabarkan berita yang kurang enak didengar dan menimbulkan tanda tanya. Mohon maaf kepada segenap aparaturnya keamanan pemerintah yang masih aktif bila Blog I-I membawa kekisruhan. Mohon maaf kepada unsur pimpinan di Negeri tercinta Indonesia Raya bila informasi-informasi sensitif dari jaring Blog I-I membuat hati menjadi panas. Sungguh tidak ada maksud tersembunyi selain meningkatkan kewaspadaan publik serta mendorong peningkatan Intelijen Indonesia yang berwibawa, kuat, cerdas, dan cepat tanggap.

Informasi kedatangan Kidon di Indonesia telah mengundang terjadinya polemik hebat baik secara offline (copy darat) maupun online (silahkan dicari sendiri linknya). Beberapa kelompok agen binaan Mossad terdeteksi mengurangi aktivitas dan lebih berhati-hati, beberapa bahkan mulai menjadi ragu-ragu atas pilihan menjual diri kepada Israel. Dari sisi kesadaran ini saya merasa ada manfaat positif yang nyata dari Blog I-I.

Meskipun demikian, apa-apa yang dibahas dalam Blog I-I tentang Mossad maupun Intelijen Asing lainnya bukan sebuah generalisir kebencian terhadap unsur-unsur asing di Republik Indonesia. Melainkan sebuah proses kabar berita intelijen berdasarkan dukungan data yang mudah-mudahan bisa merangsang kewaspadaan yang lebih baik.

Blog I-I tidak bermaksud menjerumuskan bangsa Indonesia untuk berpandangan sempit kepada seluruh unsur asing yang ada di Indonesia. Blog I-I juga tidak bermaksud melimpahkan seluruh persoalan bangsa Indonesia kepada kambing hitam yang bernama unsur asing ataupun Mossad. Bahwa terlalu banyak unsur domestik, pemimpin, pengusaha, dan elit Indonesia yang menjadi pelacur busuk yang menjual diri kepada unsur asing itu ada benarnya. Namun kita juga sulit dalam berhadapan dengan pelacur berwajah manis dan menguasai ekonomi dan politik negara bukan? Salah-salah kita juga diajak sekalian melacurkan diri demi kesuksesan pribadi.

Bila artikel-artikel Blog I-I sebelumnya disimpulkan sebagai sebuah tuduhan yang tidak beralasan kepada Mossad dan Intelijen Asing lainnya, maka hal itu sebuah kekeliruan karena Blog I-I hanya bertanya-tanya dalam pengaruh teori konspirasi. Jadi bukan sebuah desepsi informasi yang bertujuan memanaskan situasi.

Jaring Blog I-I saat ini terus mengembangkan operasi pengumpulan bahan keterangan untuk menjaga agar kerusakan Indonesia Raya tidak semakin parah. Terima kasih kepada para ksatria Ronin yang menjadi garda terdepan dalam menginformasikan berbagai perkembangan keamanan dan intelijen. Silahkan menjadikan Blog I-I sebagai rumah bersama kumpulan Ronin atau Senopati tanpa Raja yang senantiasa mengasah diri. Demi Indonesia Raya, mungkin suatu saat kita bisa mendapat kehormatan untuk berjuang seperti Kisah 47 Prajurit Ronin di Edo pada masa akhir pemerintahan Shogun Tokugawa Tsunayoshi.

Kembali pada pokok pembicaraan, dan sebagai pemanasan awal, Blog I-I akan mengungkapkan satu bukti faktual operasi Kidon yang teramat sensitif dan resikonya sangat besar karena akan menyinggung unsur pimpinan intelijen atau bahkan berpotensi menyebabkan ybs turun jabatan.

Seperti pernah saya ungkapkan bahwa rencana infiltrasi yang lebih dalam ke NKRI telah menjadi agenda Mossad sejak tahun lalu. Sasarannya adalah lembaga keamanan Indonesia dengan tujuan menciptakan jalur komunikasi langsung yang tidak bisa diintersep oleh pihak ketiga. Jalur komunikasi tersebut dibangun atas biaya Mossad, dengan biaya yang sebenarnya tidak terlalu mahal bagi sebuah negara, namun cukup lumayan bagi instansi keamanan. Menurut informasi hasil intersep di Singapura, pembukaan jaring komunikasi tersebut merupakan ujian kenaikan bagi seorang agen yang telah bertahun-tahun menjadi Katsa di Indonesia. Selain itu, ada aspek bisnis yang besar berupa pembayaran atas jasa-jasanya dalam menciptakan jaring kegiatan di Indonesia. Agen tersebut berinisial ASGF, keturunan Arab serta memiliki hubungan dekat dengan pimpinan militer dan intelijen Indonesia. ASGF telah berhasil meyakinkan bahwa komunikasi Jakarta - Tel Aviv sangat penting dan harus dibangun tahun ini juga. Menurut informan Blog I-I yang berkantor di depan Kalibata Mall, bisa dipastikan bahwa alat tersebut sudah terpasang.

Tidak usah menuduh Blog I-I macam-macam, silahkan buktikan sendiri dan tanyakan langsung kepada pimpinan tertinggi di Kantor tersebut.

Setidaknya perlu ada konfirmasi apakah Blog I-I menyebarkan fitnah belaka atau fakta.

Mohon maaf sekali lagi bila Blog I-I tidak mampu menahan diri dan melanggar prinsip *Si decem habeas linguas, mutum esse addecet*.

Sesungguhnya Kidon sudah direstrukturisasi menjadi Komemite sesuai dengan konsep perang modern, assasination, sabotage, dll yang dilakukan Kidon bukan hanya aksi-aksi hebat dengan kemampuan teknis yang tinggi, melainkan mencakup operasi cuci otak atau dekonstruksi pikiran untuk menciptakan kondisi tertentu sesuai dengan keinginan Mossad. Bila proses dekonstruksi telah dilakukan, maka sasaran dianggap sudah "mati" karena tidak lagi menjadi oposisi atau musuh bagi Mossad. Sasaran dekonstruksi tersebut adalah tokoh-tokoh berpengaruh di NKRI. Meski saya belum paham bagaimana proses itu berjalan, tetapi konon sangat efektif.

Mengapa Indonesia? apa pentingnya Indonesia? sebuah pertanyaan desepsi untuk membodohi potensi bangsa dan negara Indonesia. Sebenarnya pertanyaan tersebut harus dibalik kapan Kidon datang dan kita menantikan juga dengan taraf kecerdasan yang seimbang sehingga mereka tidak mampu melakukan dekonstruksi pikiran para pemimpin kita. Indonesia Raya yang kuat adalah Mimpi Buruk bagi Israel sekutunya karena mereka juga memahami dan mempercayai kebangkitan kekuatan dari Selatan yang sebenarnya dipengaruhi cerita legenda berdasarkan kitab suci, diantaranya misalnya tafsir "bebas" dari surat Al Kahfi dalam

Al-quran yang mana hal itu juga menjadi obyek penerawangan kaum Kabalist yang berpengaruh.

Bila saya mencoba menarik perhatian para pembaca dengan tulisan provokatif tentang Mimpi Buruk Indonesia Raya, mohon dibaca sebagai penggugah dari tidur.

Mohon dimaafkan kelancangan Blog I-I.

Sekian

Posted by Senopati Wirang /**Monday, April 16, 2007**

IIN

Sekedar menjelaskan bahwa IIN - Institut Intelijen Negara sudah tidak ada dan berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Intelijen Negara - STIN. Bila ada yang berminat sekolah kesana, upaya untuk mencari tahu sudah menjadi bagian dari nilai keseriusan lulusan SMA yang ingin menekuni ilmu intelijen dan mengabdikan kepada Indonesia Raya. Meski begitu, para pencari bakat Intelijen juga melakukan aktivitas pemantauan untuk mencari bibit unggul yang berbakat di berbagai SMA.

Untuk rekan-rekan Blog I-I yang ingin mendalami S-2 Kajian Strategis Intelijen, Hubungi Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Informasi lengkap cari sendiri....Iha calon intel harus ada usaha, maaf informasi dari Blog I-I sangat terbatas. Nanti disangka promosi terselubung.....

Senang juga mendengar banyak sekali peminat sekolah intelijen.

Usulan untuk menyegarkan pembahasan dunia intelijen sedang saya pikirkan, salah-salah Blog I-I dituduh mengajarkan intelijen secara online serta mau menandingi Intelijen yang resmi.

Salam Indonesia Raya

Posted by Senopati Wirang /**Monday, June 11, 2007**

Intel oh Intel

Sekedar kilas balik dunia intelijen yang menyebarkan dalam sudut pandang individualistik yang melihat tidak adanya masa depan yang cerah dalam kehidupan pribadi seorang intel.

Ini merupakan counter pandangan negatif yang terlanjur menerpa dunia intelijen Indonesia.

Sungguh dimanapun kita bekerja akan ada orang yang tulus bekerja mencari nafkah yang halal dan ada orang brengsek yang mencari keuntungan pribadi duniawi semata.

Pekerjaan intelijen tidak ada bedanya dengan pekerjaan pengabdian yang lain kepada rakyat dan tanah air kita. Tetapi karena karakternya yang tidak transparan maka syak wasangka begitu kuat kepada intel. Seolah-olah intel adalah seorang berpenyakit kusta yang menjijikan dan miskin, atau sebaliknya intel adalah sosok perlente yang dibiayai pajak rakyat namun tidak peduli sedikitpun pada nasib rakyat.

Jadilah diri anda sendiri.

Meskipun begitu gelapnya masa depan Indonesia, intelijen tidak pernah putus asa melihat cahaya diujung labirin kegelapan dan tetap melangkah.

Bertanyalah mengapa sampai saat ini kita masih takut melangkah dalam kegelapan. Bukankah semua harus melangkah entah itu menuju kehancuran atau menyongsong masa gemilang.

Bukan soal ingin mempertahankan idealisme, tetapi masalahnya adalah memberanikan diri melakukan yang seharusnya dilakukan.

Intel oh intel, betapapun jasamu terhadap rakyat Indonesia, nasibmu bahkan lebih buruk dari pahlawan tanpa tanda jasa. Intel tak lebih dari orang biasa yang bermimpi tentang Indonesia Raya yang mengayomi rakyat dalam kehidupan yang sejahtera.

Bunga-bunga Intelijen

Posted by Senopati Wirang /**Tuesday, June 26, 2007**

Sekilas Info Intelijen

Bagi rekan-rekan Blog I-I yang paham bahasa Arab dipersilahkan untuk mempelajari pesan-pesan dalam forum ini:

<http://alfirdaws.org/vb/>

Ada seruan jihad global melawan Amerika Serikat dkk, diantaranya melalui teknologi informatika dan elektronika.

Posted by Senopati Wirang /**Tuesday, June 19, 2007**

Peringatan Untuk Intelijen Aktif

Sehubungan dengan kasus komentar saudara Bataviasaint di shoutbox tentang masalah daftar Ambalat, Blog I-I memutuskan untuk menghapusnya karena hal itu sudah mengarah pada suatu bentuk *disclosure* yang tidak bisa ditolerir Blog I-I.

Bagaimanapun juga kondisi amatiran rekan-rekan Blog dalam melakukan kegiatan intelijen atau jalan-jalan, ada kewajiban tidak tertulis untuk saling menjaga. Bahkan saya sendiri tidak sungkan untuk mengatakan *please watch my back* kepada seluruh rekan Blog I-I.

Saya paham bahwa beberapa rekan Blog I-I kecewa karena Blog I-I telah membiarkan cacik maki di shoutbox sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Namun hal ini jauh berbeda dengan komentar yang mengarah pada pengungkapan sesama rekan Blog I-I.

Semoga saudara Bataviasaint mengerti dan hal ini juga untuk seluruh rekan-rekan Blog I-I yang lain untuk tidak mengangkat hal-hal aktual dari unit intelijen manapun.

Mohon peringatan ini dianggap sebagai pembelajaran bersama tentang pentingnya saling menjaga, saling menghormati, dan saling memperingatkan sesama rekan Blog I-I demi kejayaan Intelijen Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Raya.

Salam Intelijen

SW

Posted by Senopati Wirang / **Tuesday, August 07, 2007**

Masa Depan Intelijen

Belum lama ini seorang rekan Blog I-I menanyakan tentang masa depan intelijen di Indonesia. Sebuah pertanyaan yang sederhana namun begitu luas dan tidak dapat dijelaskan hanya dari sudut pandang Blog I-I semata. Karena sekali lagi saya perlu nyatakan bahwa coretan tulisan dalam Blog I-I bukanlah sebuah kreasi ilmiah, bukanlah sebuah produk intelijen dan bukan pula sesuatu yang harus diyakini akurasi. Hanya sebuah ungkapan demi ungkapan yang sarat dengan keterbatasan dan subyektifitas.

Beberapa komentar rekan-rekan yang semakin merangsang daya nalar setiap pembaca Blog I-I sangatlah baik untuk masa depan penciptaan sistem dan mekanisme pertahanan dan ketahanan nasional Indonesia yang salah satunya ditopang oleh intelijen.

Sungguh saya sangat gembira meski beberapa komentar dengan tajamnya menyoroti kelemahan-kelemahan dalam Blog I-I yang sebenarnya menggugah untuk direspon dengan nada pembelaan...tetapi dari pada membela diri tanpa argumentasi yang memadai, akan lebih positif bila saya akui bahwa ada benarnya apa-apa yang rekan-rekan keluhkan terhadap Blog I-I. Sementara setiap upaya perbaikan sistem di negeri Indonesia Raya ini tampak begitu melelahkan, karena kecenderungan untuk tarik-menarik kepentingan tidak dapat dihindari. Jangankan membahas pengaruh Blog I-I dalam komunitas intelijen di Indonesia, bila kita bandingkan dengan pengaruh kaum reformis di DPR-RI, di Eksekutif dan di Yudikatif, rasanya kita masih harus terus berjuang lebih keras lagi

untuk melakukan perbaikan demi perbaikan. Blog I-I hanya bersuara di luar pagar komunitas intelijen sehingga pengaruhnya tidak sebesar para reformis di DPR, Eksekutif maupun Yudikatif.

Reformasi Intelijen tidak dapat dilepaskan dari Reformasi Militer atau Penataan Sistem Pertahanan dan Ketahanan yang harus seimbang dalam budaya kendali Sipil. Dalam makna yang lebih luas bukan mengarah pada dikotomi sipil-militer secara wujud, tetapi lebih dalam soal perwatakan kebijakan dan arah strategi pembangunan sistem pertahanan dan ketahanan. Sinergi seluruh komponen institusi keamanan dan pertahanan serta penegakkan hukum menjadi syarat mutlak bagi terciptanya keamanan bagi bangsa Indonesia.

Dalam kaitan ini, Blog I-I melihat bahwa upaya penciptaan sistem yang menyeluruh tersebut telah digagas oleh Departemen Pertahanan, namun karena adanya ego sektoral yang kuat dari salah satu institusi, maka Pimpinan Negeri ini lebih memilih mengambil langkah "aman" dengan menyingkirkan ide-ide reformasi sistem pertahanan dan keamanan negara yang komprehensif. Sebenarnya semua itu hanya menyimpan sebuah BOM waktu yang akan membahayakan serta menjadi kerawanan di masa mendatang.

Blog I-I sangat memahami perasaan Patriot Bangsa Indonesia yang dilecehkan sebagai pelanggar HAM serta menjadi pesakitan dalam berbagai kasus. Blog I-I juga memahami kekesalan kalangan civil society yang melihat bahwa TNI belum juga menuntaskan reformasinya.

Sementara konflik Polisi-TNI sepertinya akan terus meletup walaupun dalam skala terbatas.

Diperlukan dasar hukum yang kuat yang mengatur keseluruhan lembaga keamanan dan pertahanan untuk memberikan rasa adil kepada semua pihak.

Reformasi politik telah mempersempit ruang gerak perwira menengah dan tinggi TNI dalam meniti perjalanan karirnya sebagai abdi bangsa, ingat abdi bangsa dan bukan pencari kekayaan dan kekuasaan. Hal itu kemudian sudah bisa diterima dengan adanya aturan main yang sama bagi siapapun yang ingin terjun ke kancah politik. Lagi-lagi kita bisa mengaca pada sejumlah perubahan peraturan perundang-undangan di bidang politik.

Polisi secara khusus telah memiliki perundang-undangan sendiri, TNI pun tidak ketinggalan, tetapi tidak ada sinergi dan tidak ada mekanisme hubungan yang jelas. Lalu bagaimana dengan intelijen yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat selain kepres tentang kelembagaan intelijen. Lemahnya sinergi hukum jelas membuka peluang yang sangat besar bagi terciptanya kecurigaan dan saling bersaing secara tidak sehat.

Dalam kondisi tersebut, maka pengaruh individual seorang pimpinan intelijen menjadi sangat vital guna mengisi setiap kelemahan yang tercipta dalam ketiadaan aturan hukum.

Membicarakan masa depan intelijen tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang masa depan Indonesia. Betapapun ambisiusnya pimpinan negeri ini, tidak akan pernah terwujud sebuah negara yang besar dan kuat tanpa adanya intelijen yang kuat pula. Hal itu tidak berarti hanya intelijen yang menjadi tulang punggungnya, melainkan hal itu berangkat dari fakta bahwa intelijen memberikan laporan, analisa, penilaian dan saran yang idealnya menjadi salah satu rujukan utama dalam kebijakan nasional.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara intelijen dengan militer, polisi, kejaksaan agung dan berbagai institusi hukum dan keamanan lainnya, maka ancaman yang membahayakan Indonesia Raya bisa diantisipasi.

Lalu apakah dengan kuatnya intelijen, hal itu akan menginjak-injak hak warga negara? tentu saja tidak karena harus ada aturan hukum yang menciptakan transparansi intelijen secara terbatas dalam fungsi pengawasan yang diberikan kepada perwakilan rakyat. Dasar hukum intelijen juga secara otomatis akan memberikan batasan yang pasti tentang ruang gerak intelijen. Tanpa adanya aturan hukum, maka intelijen menjadi liar, contoh riilnya adalah senopati-senopati yang bergerak sendiri-sendiri atau bisa juga Blog I-I dijadikan contoh. Apabila ada aturan hukum intelijen dalam kerangka pertahanan dan keamanan yang jelas, Blog I-I mungkin akan kena imbasnya dan sudah tidak diperlukan lagi keberadaannya ditengah-tengah masyarakat.

Waduh maaf bila tulisan ini dan tulisan Blog I-I pada umumnya tidak terstruktur dengan baik. Bila ada manfaatnya silahkan dimanfaatkan, bila tidak lupakan saja.

Salam

SW

Posted by Senopati Wirang /**Tuesday, December 25, 2007**

Tentang RUU KAMNAS

Kepada rekan-rekan Blog I-I yang memiliki draft RUU KAMNAS mohon kiranya dapat menginformasikan kepada saya agar analisa atas RUU KAMNAS tersebut semakin mendalam di kalangan pemerhati keamanan dan aparat keamanan melalui Blog I-I. Saya pribadi hanya berkesempatan membahasnya sekilas waktu dalam sebuah acara makan malam bersama beberapa pengamat. Waktu itu saya tidak terlalu tertarik karena SBY sudah memutuskan untuk menyimpannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Dalam diskusi kami waktu itu, saya berada dalam posisi mendukung ide melakukan pendekatan yang komprehensif dalam penataan sistem pertahanan keamanan nasional termasuk upaya sinergi dari fungsi pertahanan negara (hanneg), keamanan dalam negeri (kamdagri) serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta kalo ingin sempurna termasuk di dalamnya sistem intelijen negara dan sistem pengambilan keputusan masalah keamanan nasional di level nasional.

Namun seorang rekan pejabat tinggi Polisi secara tegas menyampaikan bahwa ide tersebut akan kontraproduktif terhadap perundang-undangan yang telah melewati proses legislasi sebelumnya. Kami juga paham keberatan yang disampaikan oleh rekan Polisi dan melihatnya sebagai sebuah proses dialog menuju pada upaya penataan sistem keamanan yang mengakomodir pemikiran dari seluruh elemen keamanan nasional Indonesia.

Kemudian seorang rekan mempertanyakan proses penyusunan RUU KAMNAS di Dephan apakah hal itu hasil buah pemikiran segelintir akademisi, staf ahli di Dephan ataukah sungguh-sungguh telah melalui proses yang bertujuan mengakomodir pandangan dari seluruh elemen keamanan nasional. Benar bahwa proses dialog dari seluruh unsur keamanan nasional akan menyita waktu panjang, namun bila hal itu memiliki ujung keputusan yang kuat di tangan Presiden, maka seluruh elemen keamanan nasional harus tunduk. Persoalannya sekarang adalah bahwa masing-masing unsur pimpinan dalam sistem keamanan nasional saat ini tahu persis bahwa Presiden SBY sangat berhati-hati sehingga, dengan sedikit "ditakut-takuti", akhirnya lebih memilih penundaan. Hakikatnya SBY cukup paham akan masa depan sistem keamanan nasional Indonesia, namun karena kuatnya tarik-menarik kepentingan sektoral, akhirnya keputusan bijak untuk menundanya menjadi pilihan yang tak terhindarkan.

Sebuah keputusan tidak akan mampu menyenangkan semua pihak. Demikian juga dalam soal tarik-menarik kepentingan dalam penyusunan RUU KAMNAS.

Kepada pihak-pihak yang mengkampanyekan RUU KAMNAS coba lakukan sosialisasi yang bersifat komunikatif yaitu menyampaikan pemahaman kepada publik dan khususnya instansi terkait masalah keamanan nasional tentang pentingnya sinergi dari seluruh elemen keamanan nasional. Namun jangan lupa untuk tetap menjaga kehormatan seluruh institusi keamanan

nasional dengan tidak mengkurir tentang bagaimana menjaga keamanan nasional Indonesia karena seluruh elemen keamanan nasional Indonesia. Dengan kata lain lobby yang lebih halus dan cerdas serta proses meyakinkan seluruh unsur keamanan nasional sangatlah penting, sama pentingnya dengan sosialisasi publik guna mendapatkan dukungan politik dalam kerangka demokrasi.

Catatan: Ketika saya katakan mendukung ide RUU KAMNAS hal itu dalam cara pandang yang umum, dan belum masuk dalam pembahasan ayat per ayat serta analisa strategis arti penting keberadaan RUU KAMNAS. Lagi pula saya belum membaca keseluruhan isi dari RUU KAMNAS, jadi boleh dikatakan saya cukup tertarik dengan idenya semata, namun bila ingin lebih serius tentu harus ada pendalaman materinya serta melihat keberatan dari pihak-pihak yang berkeberatan.

Posted by Senopati Wirang /**Tuesday, January 08, 2008**

Intelijen dan Konspirasi

Beberapa komentar dan pandangan yang saya terima mempertanyakan konspirasi yang "sering" dilakukan intelijen. Wah..wah..wah, sungguh dahsyat pengaruh penciptaan opini publik yang membuat angker lembaga-lembaga intelijen di dunia dengan ketakutan adanya konspirasi. Apa sesungguhnya yang ada dalam hubungan antara intelijen dan konsep konspirasi?

Konspirasi adalah merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang disusun secara detail sedemikian rupa yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak yang bertujuan tertentu bergulir secara normal/wajar ditengah-tengah masyarakat. Konspirasi cenderung berkonotasi negatif karena tujuan-tujuan tertentu yang dirancang secara rahasia tersebut lebih banyak diisi oleh kepentingan golongan/kelompok yang melanggar kepentingan golongan/kelompok lain.

Dalam definisi yang lebih positif, konspirasi tidak ada bedanya dengan kerjasama rahasia untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya saja ketika Amerika Serikat dan sekutu Baratnya merestui integrasi Timor Timur ke dalam NKRI. Dalam kacamata kelompok Komunis Fretilin, kerjasama/persetujuan/dukungan rahasia AS kepada Indonesia merupakan suatu konspirasi, karena beragam peristiwa di Timor Timur (sekarang Timor Leste) tersebut seluruhnya terbungkus secara "baik" dalam genggaman kekuatan kelompok Liberal Barat yang anti Komunis. Hanya karena intelijen yang hampir selalu bersentuhan dengan kerjasama rahasia tingkat regional maupun internasional, maka masyarakat awam

akan langsung menuduh adanya suatu konspirasi tertentu dalam terjadinya peristiwa-peristiwa di masyarakat.

Contoh lain yang menarik adalah kasus Bom Bali dan terciptanya kelompok Jemaah Islamiyah. Masih banyak pihak di kalangan Muslim yang meyakini bahwa ada konspirasi Barat dalam mengkondisikan terciptanya kelompok teroris, misalnya dengan kegagalan penanganan Hambali dan kasus Omar Faruq. Banyak pandangan ditengah-tengah komunitas Islam yang militan yang menduga kuat bahwa Hambali dan Omar Faruq adalah agen CIA, dan segala cerita Jemaah Islamiyah adalah hasil konspirasi kaum Yahudi dan kerjaan CIA untuk menjebak kelompok Muslim tertentu ke dalam aksi teror regional atau global. Bahkan pemicu peristiwa besar seperti 9/11 pun banyak diwarnai analisa konspirasi yang secara umum kita kenal sebagai teori konspirasi.

Teori konspirasi atau persekongkolan hanya suatu pendekatan (belum sah diakui sebagai teori) yang berusaha memahami serta menjelaskan latar belakang peristiwa atau rangkaian peristiwa tertentu (khususnya yang menarik perhatian khalayak banyak seperti pada peristiwa pembunuhan politik, krisis ekonomi, revolusi sosial, atau terorisme, dll) dari sudut pandang adanya kekuatan **rahasia** yang merancanganya dan menggulirkannya secara wajar. Kekuatan rahasia tersebut biasanya diterjemahkan kepada kelompok rahasia tertentu termasuk intelijen. Jalan cerita konspirasi umumnya bersifat memperdaya logika publik dan menghasilkan polemik yang tidak akan pernah diketemukan kebenaran hakikinya. Klaim pandangan konspirasi yang agak berlebihan misalnya peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah adalah hasil kerja para konspirator belakang layar yang memanipulasinya.

Benarkah kerjaan Intelijen selalu terkait dengan konspirasi?

Konspirasi dari konotasi negatif sangat jarang dilakukan oleh intelijen karena tingkat kerumitan rancangan kegiatannya bertingkat sampai minimal lima level yang terputus sebagaimana dasar penerapan operasi standar situasi perang. Hampir bisa dipastikan tidak akan terbongkar atau yang sering kita kenal sebagai *a perfect crime*, yang akan selalu dibantah oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian. Padahal apa-apa yang tercatat dalam sejarah sebagai *unsolved mystery* cenderung dianggap sebagai bagian dari hasil kerja konspirasi. Namun dalam generalisasi kerja intelijen yang rahasia segala yang disentuh intelijen kemudian dibungkus dalam sudut pandang konspirasi, padahal terlalu ceroboh dan dangkal apabila hal itu dikerjakan oleh intelijen, apalagi bila langsung bersentuhan dengan tangan petinggi intelijen. Bisa jadi konspirator yang mudah tercium oleh publik adalah pelaku pemula bermodal kecil serta belum berpengalaman sehingga tampak belepotan di mana-mana.

Betapapun lemahnya suatu konspirasi, apabila dilakukan berdasarkan pada kerjasama sejumlah pihak untuk mencapai kepentingan bersama, maka cerita yang meluncur kepada publik akan samar dan sulit ditentukan mana yang benar. Hal itu didukung oleh fakta bahwa waktu terus berputar dan generasi berganti, sehingga akan banyak cerita yang terkubur begitu saja. Standar minimal terjaganya sebuah cerita konspirasi adalah minimal 25 tahun yaitu setara dengan boleh-tidaknya suatu file rahasia dibaca oleh publik sebagai bahan riset penelitian sejarah dan rekayasa sosial atau konstruksi masyarakat. Tetapi tidak sedikit kelompok rahasia yang

membawa mati seluruh cerita konspirasi karena kuatnya prinsip kerahasiaan individu anggota-anggotanya.

Intelijen lebih banyak berurusan dengan kegiatan nyata menyelamatkan bangsa dan negara, ya memang kedengaran klise dan seperti manusia super yang waktunya habis untuk bangsa dan negara. Ideal sekali bukan?

Keseharian intelijen boleh dikatakan jauh dari wacana konspirasi, karena utamanya adalah deteksi dini atas setiap potensi ancaman kepada bangsa dan negara. Deteksi dini pada garis terdepan adalah akses kepada informasi yang diperlukan. Selanjutnya analisa dan akhirnya adalah rekomendasi yang seyogyanya diperhatikan oleh pimpinan negara.

Namun karena kemampuan individu intelijen yang rata-rata sudah terlatih dalam soal kerahasiaan, pesanan untuk melakukan kerjasama rahasia dalam rangka mewujudkan suatu peristiwa tertentu tidaklah terlalu sulit untuk dikerjakan dan hal ini hanya membutuhkan satu dukungan, yaitu dana segar.

Cukup jelas bukan?

Intelijen bukanlah konspirator, tetapi tidak sulit bagi intelijen untuk melakukan konspirasi.

Semoga Bermanfaat

SW

Posted by Senopati Wirang / **Tuesday, March 11, 2008**

Selamat Jalan Bapak Intelijen Indonesia

Jenderal Besar Haji Muhammad Suharto pada hari ini tanggal 27 Januari 2008 pukul 13.10 waktu Indonesia bagian barat wafat meninggalkan kita. Dunia Intelijen Indonesia kehilangan salah seorang Master Spy yang telah menjadi legenda tersendiri dengan segala misterinya.

Blog I-I secara khusus menyampaikan penghormatan tertinggi atas jasa-jasa Master Spy Suharto dalam membangun Intelijen Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan ini izinkanlah saya memberikan gelar sebagai Bapak Intelijen Indonesia.

Berikut ini memoir khusus untuk Master Spy Suharto:

Jenderal Besar Haji Muhammad Suharto yang wafat pada usia 86 tahun merupakan prajurit perang fikiran sejati yang memiliki karakter menjadi semakin kuat dalam tekanan pekerjaannya. Bangsa Indonesia lebih mengenalnya sebagai sosok pemimpin negara selaku Presiden selama kurang lebih 32 tahun. Namun bagi Intelijen Indonesia, Jenderal Besar Soeharto adalah peletak dasar Intelijen Strategis yang fokus pada urusan politik dan khususnya pemeliharaan kekuasaan. Dengan langkah awal pembubaran dan pembersihan Badan Pusat Intelijen (BPI) pada tanggal 22 Agustus 1966, Master Spy Suharto membentuk Komando Intelijen Negara (KIN) dan langsung mengkomandoinya dengan bantuan tokoh intel kawakan Sudirgo. Sebagaimana lembaga intelijen di seluruh dunia, ada unit prestigius yang memiliki power kuat dalam KIN yaitu Opsus yang dipimpin oleh Letkol. Ali Moertopo dengan asisten Leonardus

Benyamin (Benny) Moerdani dan Aloysius Sugiyanto. Dengan cikal bakal KIN tersebutlah kemudian pada tanggal 22 Mei 1967, KIN yang telah "bersih" dari unsur komunis berganti nama menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), dan almarhum Suharto secara cerdas mengelolanya melalui Jenderal-jenderal terdekat dengannya. Mulai tahun 1970 terjadi reorganisasi Bakin dengan tambahan Deputy III dan pos Opsus di bawah Brigjen. Ali Moertopo.

Pada era kepemimpinan Mayjen. Sutopo Juwono, Bakin memiliki Deputy II di bawah Kolonel Nicklany Soedardjo, perwira Polisi Militer (POM) lulusan Fort Gordon, AS. Pada awal 1965 Nicklany telah membangun unit intel PM, yaitu Detasemen Pelaksana Intelijen (Den Pintel) POM. Secara resmi, Den Pintel POM menjadi Satuan Khusus Intelijen (Satsus Intel), lalu tahun 1976 menjadi Satuan Pelaksana (Satlak) Bakin dan di era 1980-an dan kemudian berubah nama menjadi Unit Pelaksana (UP) 01. Pada saat yang bersamaan dengan jalannya sejarah, intelijen militer yang secara teori harus fokus pada masalah intelijen tempur dengan segala informasi pertahanan dan ketahanan didesain oleh Master Spy Suharto sebagai penyeimbang informasi BAKIN sekaligus sebagai cross check.

Sebelum BPI dibersihkan dari unsur komunis, di Angkatan Darat ada lembaga yang bernama Pusat Psikologi Angkatan Darat (disingkat PSiAD) milik Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) yang mengimbangi Biro Pusat Intelijen (BPI) yang saat itu di bawah pimpinan Subandrio. Seiring dengan pembersihan pada tubuh BPI, pada periode awal Orde Baru, Dephankam mendirikan Pusat Intelijen Strategis (disingkat

Pusintelstrat) dengan anggota-anggota PSiAD sebagian besar dilikuidasi ke dalamnya. Pusintelstrat dipimpin oleh Ketua G-I Hankam Brigjen L.B. Moerdani. Jabatan tersebut terus dipegang sampai L.B. Moerdani menjadi Panglima ABRI. Pada era tersebut, intelijen militer memiliki badan intelijen operasional yang bernama Satgas Intelijen Kopkamtib. Tahun 1980, Pusintelstrat dan Satgas Intel Kopkamtib dilebur menjadi Badan Intelijen ABRI (disingkat BIA). Jabatan Kepala BIA dipegang oleh Panglima ABRI, sedangkan kegiatan operasional BIA dipimpin oleh Wakil Kepala. Tahun 1986 BIA diubah menjadi BAIS yang berdampak kepada restrukturisasi organisasi yang harus mampu mencakup dan menganalisis semua aspek Strategis Pertahanan Keamanan dan Pembangunan Nasional.

Master Spy Suharto yang Blog I-I kenal adalah sosok intelijen yang tegas dan sangat memperhatikan kecepatan dan keakuratan informasi sebagai dasar pengambilan keputusannya. Selain itu, Master Spy Suharto juga faham tentang pahitnya kebenaran dan jahatnya manipulasi informasi, sehingga ketabahannya dalam menghadapi perang opini tentang dirinya memperlihatkan kematangan mentalitas intelijennya. Begitu dingin dalam senyum yang sulit dipahami oleh kawan maupun lawannya.

Semua legenda Intelijen Indonesia seperti Zulkifli Lubis, Yoga Sugama, Ali Murtopo, Benny Moerdani, serta berbagai unsur pimpinan militer dan intelijen yang ada selama periode Orde Baru berada dalam genggaman strategi intelijen Master Spy Suharto. Perhatikan bagaimana kelihaian intelijen Master Spy Suharto dalam mengelola keberadaan Bakin-Bais yang praktis memiliki banyak kesamaan dalam operasinya.

Satu-satunya kelemahan Master Spy Suharto di mata Intelijen Indonesia adalah keterlupaannya dalam membangun pondasi yang kuat bagi masa depan Intelijen Indonesia. Ketakutan yang kuat kepada loyalitas Intelijen yang dalam sejarah sering menjadi negara dalam negara menyebabkan besarnya kepentingan untuk mengkerdikan intelijen. Rapuhnya struktur, mekanisme dan landasan kerja Intelijen Indonesia menyebabkan situasi dan kondisi intelijen bagaikan terombang-ambing dalam kepentingan politik. Sementara perubahan dan tantangan zaman yang begitu cepat telah meninggalkan dinamika Intelijen Indonesia yang tersangkut dalam pola dan paradigma kejayaan di masa perang dingin.

Jasa almarhum Jenderal Besar Haji Muhammad Suharto dalam dunia intelijen telah menjadi amalan yang tidak akan dilupakan oleh Intelijen Indonesia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Intelijen Indonesia mendo'akan semoga amal-amal baik almarhum diterima Allah SWT dan kekeliruannya dapat diampuni.

Bagi Prajurit Perang Fikiran tidak ada dendam dalam setiap perbedaan dan konflik, semuanya begitu dingin dan beku dalam keheningan pengorbanan. Membawa rahasia negara sampai kematian menjemput. Bertahan dalam kesabaran dan pengharapan bahwa akhirnya dosa-dosa kita diampuni baik oleh Tuhan semesta alam maupun oleh umat manusia yang telah kita sakiti.

Semoga Insan Intelijen Indonesia di manapun berada tidak melupakan jati diri dan sejarahnya, namun demikian tetap berpegang pada tali yang

kokoh yaitu misi dan visi memperjuangkan kepentingan nasional rakyat, bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama mencapai Indonesia Raya yang adil dan makmur sejahtera.

Hormat Intelijen Indonesia

Hormat Khusus Prajurit Perang Fikiran

Senopati Wirang

Posted by Senopati Wirang /**Sunday, January 27, 2008**